

**KONTRIBUSI SEKTOR MIGAS TERHADAP PENERIMAAN DAERAH
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAERAH DI
KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

**Odha Adhitama
105030101111066**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

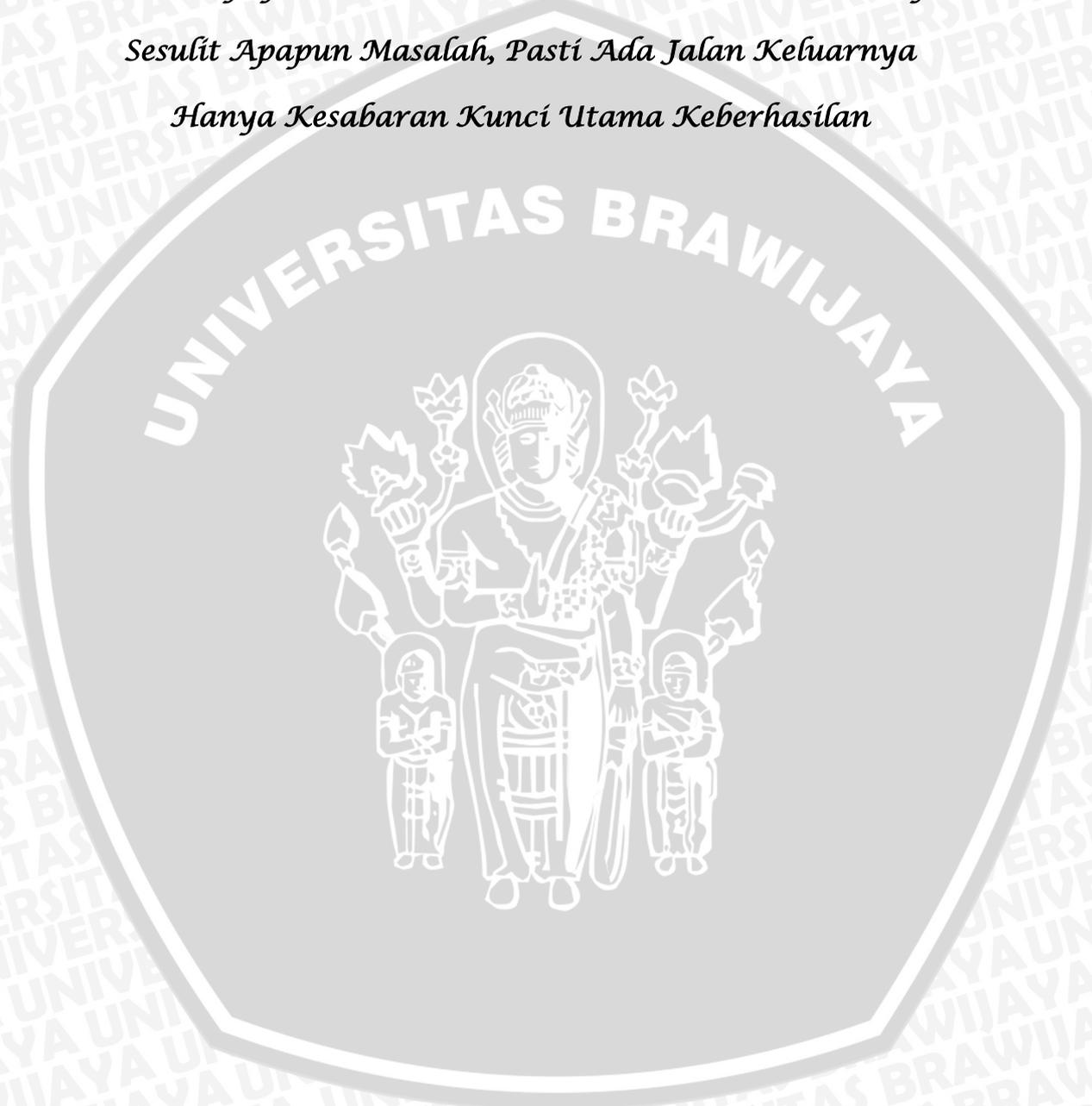
2014

MOTTO

Sekecil Apapun Sebuah Usaha, Pasti Akan Ada Hasilnya

Sesulit Apapun Masalah, Pasti Ada Jalan Keluarnya

Hanya Kesabaran Kunci Utama Keberhasilan



PERSEMBAHAN

Hasil karya Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua dan keluarga saya yang telah mendoakan dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk teman-teman angkatan FIA Publik 2010 yang banyak membantu dalam proses pengerjaan. Untuk teman-teman UKM Unitantri yang memberikan dukungan berupa semangat selama proses pengerjaan.



TANDA PERSETUJUAN

Judul : Kontribusi Sektor Migas Terhadap Penerimaan Daerah
Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Daerah di
Kabupaten Bojonegoro

Disusun Oleh : Odha Adhitama

NIM : 105030101111066

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, Mei 2014

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota


Dr. Bambang Santoso H, MS.
NIP. 19610204 198601 1 001


Dr. Riyanto, M.Hum
NIP: 19600430 198603 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

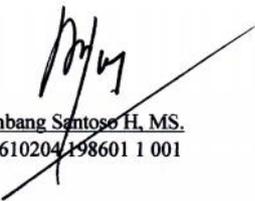
Hari : Selasa
Tanggal : 20 Mei 2014
Jam : 12.00-13.00 WIB
Skripsi atas nama : Odha Adhitama
Judul : "KONTRIBUSI SEKTOR MIGAS TERHADAP PENERIMAAN DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BOJONEGORO".

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

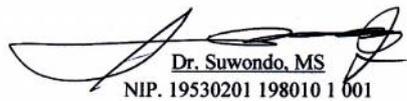
Ketua

Anggota


Dr. Bambang Santoso H, MS.
NIP. 19610204 198601 1 001


Dr. Riyanto, M.Hum
NIP: 19600430 198603 1 001

Anggota


Dr. Suwondo, MS
NIP. 19530201 198010 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat2 dan pasal 70)

Malang, 29 April 2014

Odha Adhitama
105030101111066

RINGKASAN

Adhitama, Odha. 2014. *Peran Sektor Migas Dalam Meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bojonegoro*. Dr. Bambang Santoso H, MS., Dr. Riyanto, M, Hum, 159 hal + xv

Sektor migas merupakan salah satu sumber daya alam yang fungsi dan manfaatnya sangatlah besar. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi migas yang sangat besar dan salah satunya terletak di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Tingginya potensi migas yang ada di Bojonegoro menjadikan daerah tersebut sebagai salah satu daerah eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia. Terbukti dari tingginya hasil produksi dan terus meningkatnya hasil produksi tersebut disetiap tahunnya. Kondisi sektor migas tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro.

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan peran sektor migas tersebut dalam meningkatkan pembangunan daerah serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan dan mengelola sektor migas dan juga untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan dan pengelolaan sektor migas demi mendukung proses pembangunan daerah di Bojonegoro.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dan situs penelitian ditentukan pada Kabupaten Bojonegoro dengan situs di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas peran sektor migas dalam meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro. Peran sektor migas tersebut diantaranya adalah: (1) peran sektor migas sebagai sumber penerimaan daerah, (2) sektor migas sebagai penggerak pembangunan daerah, (3) peran sektor migas dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal sebagai salah satu dampak positif yang diharapkan pemerintah daerah. (4) sektor migas juga berperan dalam pembangunan daerah melalui program CSR. Dalam meningkatkan pembangunan daerah dan pengelolaan sektor migas tersebut terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya adalah besarnya sumber daya alam yang tersedia di Bojonegoro khususnya di sektor migas. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah terbatasnya wewenang pemerintah daerah terhadap pengelolaan sektor migas tersebut. Salah satu bentuk keterbatasan tersebut adalah kecilnya peran pemerintah daerah dalam ikut serta dalam perencanaan tata kelola sektor migas dan tidak transparasinya laporan hasil pengolahan dan produksi migas.

Berdasarkan uraian tersebut perlu adanya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak pengelola agar dapat memaksimalkan pemanfaatan dan peningkatan hasil produksi sektor migas dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro.

Kata kunci : Kontribusi, Sektor Migas, Penerimaan dan Pembangunan Daerah

SUMMARY

Adhitama, Odha, 2014. The Role of Oil-and-Gas Sector to Improve Local Development in Bojonegoro District. Dr. Bambang Santoso H, MS., Dr. Riyanto, M, Hum, 159 pages + xv

Oil-and-gas sector is a natural resource with very huge functions and benefits. Indonesia is a country with the biggest oil-and-gas potential. The precise location is found at Bojonegoro District region. High oil-and-gas potential in Bojonegoro has converted this region into a region for exploration and exploitation. High productivity and production increase are prominent every year. Such oil-and-gas sector condition indirectly influences local development in Bojonegoro District.

The objectives of research are to describe the contributions of oil-and-gas sector to improve local development and the effort of local government to increase and to manage oil-and-gas sector, and to describe and to analyze the factors supporting and constraining the implementation and management of oil-and-gas sector in favor of local development in Bojonegoro.

Research method is diskriptive, qualitative approach. Location and site research in Bojonegoro District and in official of local revenue Bojonegoro District.

Result of research indicates that the author obtains answer about the contributions of oil-and-gas sector to the local development improvement in Bojonegoro District. The contributions of this oil-and-gas sector include (1) the contribution to local revenue source, (2) being the driver of local development, (3) the opening of employment for local community which may lead to positive impact expected by local government, (4) the contribution to local development through CSR Program. Moreover, there are factors supporting and constraining local development improvement and oil-and-gas management. The supporting factor is the supply of natural resource available in Bojonegoro, especially for oil-and-gas sector. The constraining factor is the limited authority of local government onto the management of oil-and-gas sector. This limited authority is shown by small contribution of local government in planning the code of conduct of oil-and-gas sector and less transparence of the report of output of processing and production of oil-and-gas sector.

Based on these results, it may be suggested that the central government, the local government and the management must agree on the cooperation to maximize the utilization and improvement of production output of oil-and-gas sector in supporting local development of Bojonegoro District.

Keywords :Contributions, Oil and Gas, Acceptance and Regional Development

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peran Sektor Migas Dalam Meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bojonegoro”.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melaporkan hasil penelitian dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian SDA Kabupaten Bojonegoro serta sebagai pengevaluasi hasil pelaksanaan berdasarkan teori yang diperoleh pada bangku kuliah. Dengan demikian penelitian ini diajukan sebagai syarat untuk menempuh ujian akhir Program Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

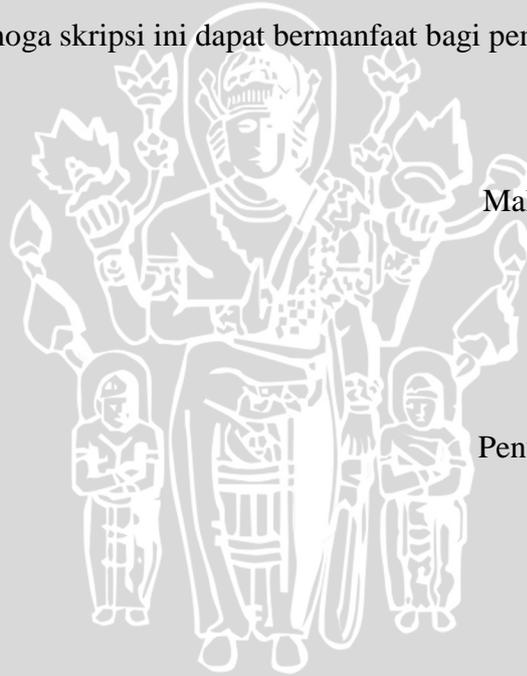
Atas tersusunnya skripsi ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesungguhan dan tulus ikhlas. Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Lely Indahmindarti, M.Si selaku ketua Prodi Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Dr. Bambang Santoso H, MS dan Dr. Riyanto, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu untuk bimbingan dan petunjuknya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Herry Sudjarwo, SH, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro atas waktu dan kemudahan yang diberikan dalam melakukan penelitian.

6. Teman-teman semua yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibuserita seluruh keluarga terima kasih atas doa yang selalu mengalir, tuntunan, dukungan, serta usahanya yang diberikan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat diterima Allah SWT, sebagai suatu berkah bagi penulis dan dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk penulis selanjutnya..

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.



Malang, 29 April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN	iv
TANDA PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah	14
1. Desentralisasi	14
2. Pemerintah Daerah	16
3. Otonomi Daerah	17
B. Keuangan Daerah	18
1. Pengertian Keuangan Daerah	18
a. Pendapatan Asli Daerah	20
b. Dana Perimbangan	22
c. Pendapatan Lain-lain	26
C. Pembangunan Daerah	27
1. Pengertian Pembangunan Daerah	27
2. Perencanaan Pembangunan Daerah	29
D. Pembangunan Berkelanjutan	32
1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan	32
2. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	34
3. Konsep Pembangunan Berkelanjutan	36
4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	39
D. Sektor Migas	41
1. Pengertian Migas	41
2. Pengolahan Sektor Migas	42



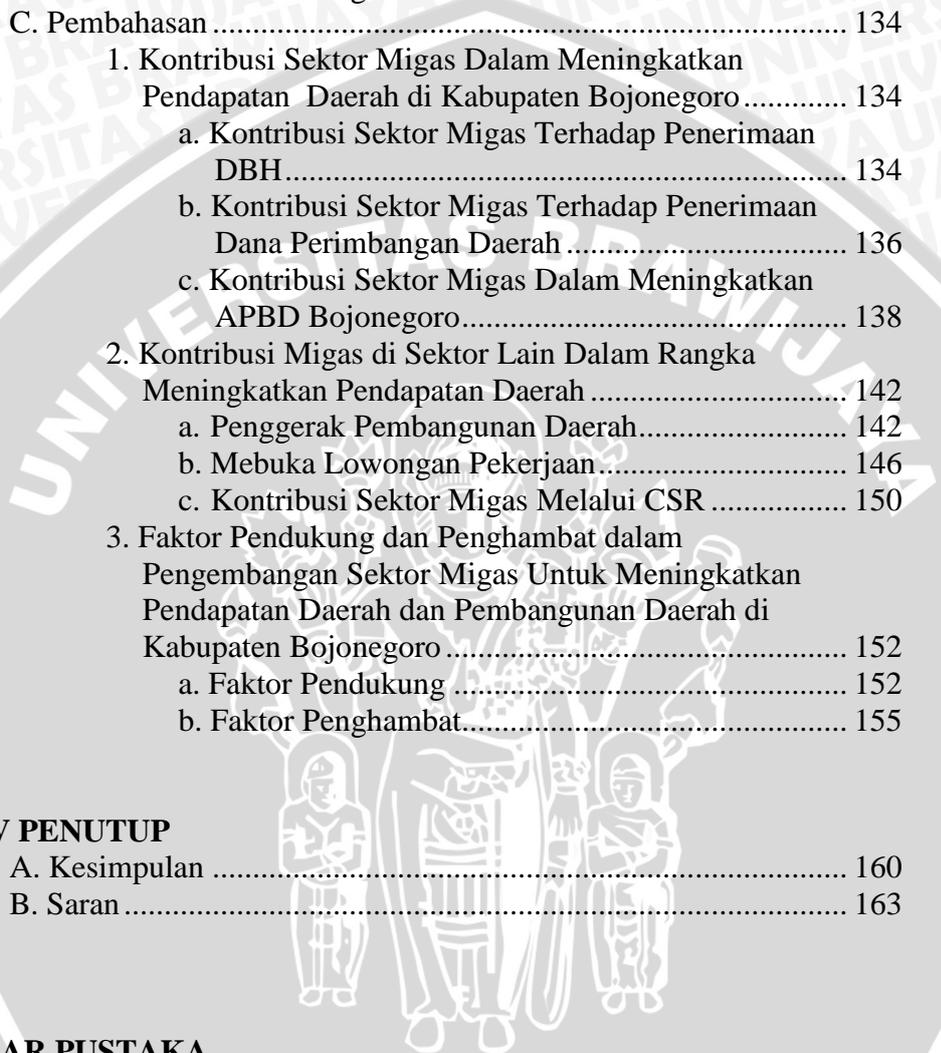
3. Kontribusi Sektor Migas	43
----------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	52
B. Fokus Penelitian	53
C. Lokasi dan Situs Penelitian	54
D. Jenis dan Sumber Data	55
1. Jenis Data	55
2. Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data	58
1. Observasi	58
2. Wawancara	58
3. Dokumentasi	58
F. Instrumen Penelitian	59
G. Analisis Data	59

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Situs Penelitian	62
1. Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro	62
a. Kondisi Geografis	62
b. Kondisi Perekonomian	63
c. Potensi Migas	65
2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro	69
a. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro	69
b. Struktur Organisasi	70
c. Tugas Pokok dan Fungsi	73
d. Sumber Daya Aparatur	86
B. Hasil dan Pembahasan	89
1. Kontribusi Sektor Migas Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Bojonegoro	89
a. Kontribusi Sektor Migas Terhadap Penerimaan DBH	92
b. Kontribusi Sektor Migas Terhadap Penerimaan Dana Perimbangan Daerah	97
c. Kontribusi Sektor Migas Dalam Meningkatkan APBD Bojonegoro	102
2. Kontribusi Migas di Sektor Lain Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah	109
a. Penggerak Pembangunan Daerah	109
b. Membuka Lowongan Pekerjaan	115
c. Kontribusi Sektor Migas Melalui CSR	119
3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam	



Pengembangan Sektor Migas Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bojonegoro 124

 a. Faktor Pendukung 125

 b. Faktor Penghambat..... 129

C. Pembahasan 134

 1. Kontribusi Sektor Migas Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Bojonegoro 134

 a. Kontribusi Sektor Migas Terhadap Penerimaan DBH..... 134

 b. Kontribusi Sektor Migas Terhadap Penerimaan Dana Perimbangan Daerah 136

 c. Kontribusi Sektor Migas Dalam Meningkatkan APBD Bojonegoro..... 138

 2. Kontribusi Migas di Sektor Lain Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah 142

 a. Penggerak Pembangunan Daerah..... 142

 b. Membuka Lowongan Pekerjaan..... 146

 c. Kontribusi Sektor Migas Melalui CSR 150

 3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Sektor Migas Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bojonegoro 152

 a. Faktor Pendukung 152

 b. Faktor Penghambat..... 155

BAB V PENUTUP

 A. Kesimpulan 160

 B. Saran 163

DAFTAR PUSTAKA

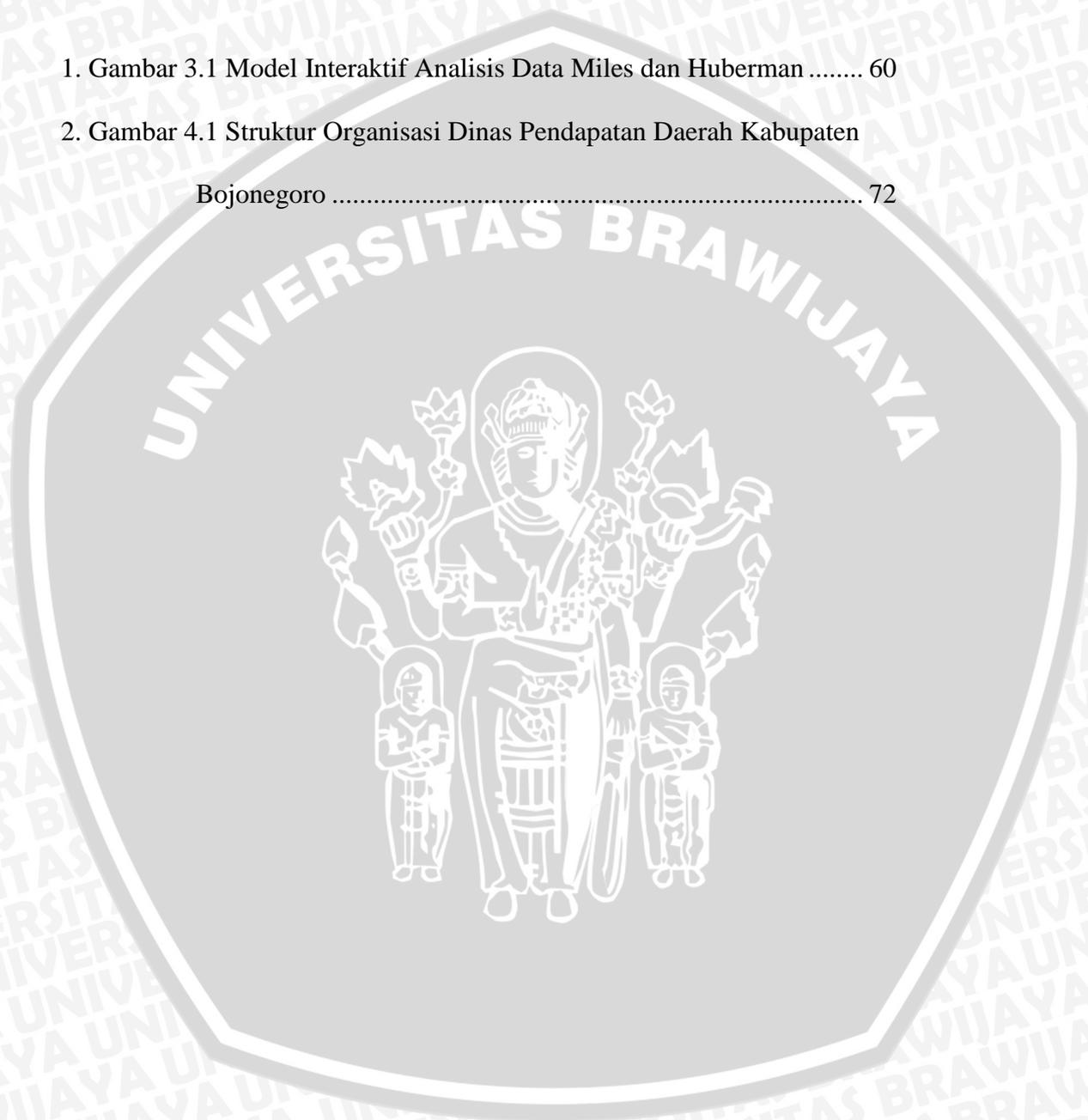


DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Pembagian Dana Bagi Hasil	25
2. Tabel 4.1 Realisasi Produksi Minyak Bumi Tahun 2012	66
3. Tabel 4.2 Realisasi Produksi Gas Bumi Tahun 2012.....	68
4. Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	87
5. Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	87
6. Tabel 4.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	88
7. Tabel 4.6 Data Pendapatan DBH Bukan Pajak Tahun 2009.....	93
8. Tabel 4.7 Data Pendapatan DBH Bukan Pajak Tahun 2010.....	94
9. Tabel 4.8 Data Pendapatan DBH Bukan Pajak Tahun 2011.....	94
10. Tabel 4.9 Data Pendapatan DBH Bukan Pajak Tahun 2012.....	95
11. Tabel 4.10 Perkembangan Dana Perimbangan 2009	98
12. Tabel 4.11 Perkembangan Dana Perimbangan 2010	99
13. Tabel 4.12 Perkembangan Dana Perimbangan 2011	99
14. Tabel 4.13 Perkembangan Dana Perimbangan 2012	100
15. Tabel 4.14 Perkembangan Penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2008-2011	106
16. Tabel 4.15 Perkembangan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2008-2012.....	106
17. Tabel 4.16 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008-2012	107
18. Tabel 4.17 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Bojonegoro	108
19. Tabel 4.18 Data Sarana Prasarana Umum Bojonegoro.....	110
20. Tabel 4.19 Program Kemasyarakatan dari Perusahaan di Bojonegoro.....	123

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 3.1 Model Interaktif Analisis Data Miles dan Huberman 60
2. Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Bojonegoro 72



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Melakukan Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab Bojonegoro xvi
2. Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bojonegoro xvii
3. Surat Keterangan Penelitian dari Bagian SDA Kabupaten
Bojonegoro xviii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Dengan bentuk negara kepulauan, bentuk sumber daya alam yang terkandung didalamnya sangatlah beragam. Sumber daya yang melimpah tersebut tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dengan kondisi geografis yang berbeda-beda disetiap daerahnya, potensi sumber daya alam yang terkandung dimasing-masing daerahpun juga berbeda-beda. Sumber daya alam itu sendiri merupakan segala sesuatu yang muncul dan ada secara alami dan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya. Yang tergolong didalamnya tidak hanya sumber daya biotik seperti hewan, tumbuhan dan mikroorganisme tetapi juga ada sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam abiotik merupakan sumber daya alam yang menjadi pusat perhatian manusia untuk memanfaatkannya. Sumber daya alam abiotik sendiri terdiri dari minyak bumi atau migas, gas alam, dan logam. Semua sumber daya abiotik tersebut adalah sumber daya alam yang kini menjadi kebutuhan mutlak bagi perkembangan manusia. Tapi pada dasarnya sumber daya abiotik tersebut tidak merata keberadaannya. Seperti sumber daya alam berupa gas bumi yang hampir sepertiganya berada di kawasan timur tengah. Oleh karena itu setiap negara penghasil memiliki andil besar dalam memenuhi kebutuhan sumber daya alam abiotik pada negara-negara lain yang bukan sebagai negara penghasil.

Dari sekian banyak sumber daya alam abiotik tersebut, hampir semuanya ada di wilayah Indonesia. Salah satu sumber daya alam yang sangat potensial di Indonesia adalah minyak bumi atau migas. Minyak bumi atau biasa disebut dengan emas hitam, merupakan hasil bumi berupa minyak hitam yang sifatnya mudah terbakar dan berada pada lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi diambil dari proses penambangan-penambangan melalui sumur minyak. Lokasi penentuan sumur minyak ini didapat melalui proses studi geologi dan berbagai macam studi lainnya dalam proses penemuan sumber minyak bumi tersebut. Sumber daya alam berupa minyak bumi atau migas ini sangat banyak ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu daerah potensial penghasil migas yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian pemerintah pusat maupun daerah adalah Bojonegoro.

Bojonegoro merupakan salah satu daerah dari 38 daerah yang ada di provinsi Jawa Timur. Daerah ini merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah dan merupakan daerah yang berada di sebelah utara wilayah Jawa Timur. Berjarak kurang lebih 110 km atau dua jam perjalanan darat ke arah barat dari Surabaya. Jumlah penduduk Bojonegoro sendiri sekitar satu juta jiwa lebih dengan 80 persen dari jumlah penduduk tersebut hidup dari kegiatan pertanian. Dengan kondisi wilayah yang merupakan perbukitan, Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang sukses dalam segi kehutanan. Terbukti dengan 44 persen wilayah Bojonegoro merupakan kawasan hutan jati yang dikuasi oleh negara melalui Perhutani. Meski wilayah Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi berupa

kayu jati, namun pada kenyataannya kekayaan alam tersebut tidak dapat memberikan dampak pada kesejahteraan pada masyarakat.

Beberapa tahun sebelumnya kondisi Bojonegoro masih belum stabil dengan jumlah penduduk miskin yang mencapai 17% dari total penduduk Bojonegoro. Hampir sebagian besar masyarakat Bojonegoro masih menggantungkan hidupnya pada pertanian. Dari kondisi tersebut belum ada perubahan yang layak pada kehidupan masyarakat Bojonegoro. Bahkan besarnya penduduk yang menggantungkan kehidupannya pada hasil tani, sedikit banyak telah menimbulkan dampak negatif. Yaitu dengan banyaknya pengalih fungsian kawasan hutan menjadi lahan pertanian secara ilegal. Kondisi ini juga menjadi sebuah ancaman baru bagi pertumbuhan dan perkembangan Bojonegoro.

Namun pada tahun 1999, Mobil Oil Indonesia (MOI) menemukan cadangan migas yang melimpah di wilayah Bojonegoro. seiring dengan berjalannya waktu, penemuan cadangan minyak tersebut belum bisa memberikan dampak yang lebih terhadap perkembangan dan kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan karena belum adanya pengelolaan yang maksimal atas hasil migas yang telah ada. Dalam rentang waktu yang tidak lama juga ditemukan banyak titik-titik lokasi sumber cadangan migas yang tersebar di wilayah Bojonegoro. Dari sinilah peran pemerintah dalam memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan migas tersebut terus dilakukan. Baik dalam bentuk kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaannya maupun dalam proses pemanfaatannya. Hingga saat ini Bojonegoro telah menjadi kawasan eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia.

Bahkan diperkirakan 20% cadangan minyak Indonesia saat ini berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa setiap pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Dengan adanya kewenangan tersebut maka pemerintah daerah bertanggung jawab atas perkembangan dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab tersebut bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu memanfaatkan dan mengelola dengan baik sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut.

Dalam pelaksanaan kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengatur dan mengelola daerahnya dalam mensejahterakan masyarakat secara luas. Demi tercapainya tujuan tersebut, pemerintah daerah harus mampu menggali dan memanfaatkan sumber pendapatan daerahnya sendiri agar terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut. Fauzan (2006:227) menjelaskan bahwa membiayai diri sendiri dari pendapatan sendiri menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus mempunyai sumber-sumber pendapatan sendiri. Jadi pada dasarnya pemerintah daerah harus bisa membiayai kebutuhan daerah dengan pendapatan asli daerah sendiri. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memaksimalkan potensi sumber pendapatan asli daerah dan

mengelola semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Dari segi pendapatan, salah satu pemasok Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD sendiri merupakan pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004). PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam Undang Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, dijelaskan mengenai jenis-jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dari kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri, maka pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas pengelolaan PAD. Setiap daerah memiliki strategi sendiri dalam meningkatkan pendapatan daerahnya dalam rangka memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apalagi dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya, pemerintah daerah dituntut untuk bisa meningkatkan pendapatan daerahnya disetiap tahunnya. Namun dalam kenyataan di lapangan banyak penyebab ketidakmampuan daerah antara lain disebabkan oleh terlalu bergantungnya daerah terhadap subsidi dari pusat karena rendahnya PAD.

Hal ini disebabkan antara lain :

- a. kurangnya berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
- b. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan (desentralisasi fiskal yang masih didominasi pusat).

- c. Kendati pajak cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan.
- d. Pengaruh politis yang kuat.
- e. Ketidakseimbangan pemberian subsidi pemerintah pusat pada pemerintah daerah. (Fauzan, 2006:227)

Bojonegoro yang sekarang merupakan salah satu kawasan eksplorasi dan eksploitasi juga harus bisa memanfaatkan kondisi tersebut sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan PAD. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan PAD dan pembangunan daerah Bojonegoro adalah melalui pengelolaan dan pemanfaatan sektor migas. Pengembangan dan pengelolaan sektor migas ini akan memberikan dampak atau pengaruh yang bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan daerah tersebut. Sumber daya alam berupa minyak bumi ini merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai jual sangat tinggi yang pada akhirnya nanti akan berpengaruh terhadap perkembangan daerah tersebut. Beberapa daerah maju telah membuktikan bahwa sektor migas dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan daerah.

Pada tahun 2011, Kabupaten Bojonegoro memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 9,24%. Sedangkan disisi lain Kabupaten Bojonegoro ini belum bisa dikatakan maju atau masih belum berkembang bila dilihat dari beberapa indikator pembangunan, seperti pendapatan perkapita dan tingkat kemiskinan. Produksi migas yang ada di Bojonegoro banyak memberikan pengaruh yang besar terhadap pembangunan dan perkembangan daerah Bojonegoro. Salah satu dampak dari pengembangan sektor migas adalah pembangunan pada bidang ekonomi, pendapatan perkapita, dan tingkat kemiskinan Kabupaten Bojonegoro. Jadi

apabila produksi dan pengelolaan sektor migas meningkat, maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Bojonegoro juga akan meningkat. Bahkan meningkatnya produksi migas tersebut seharusnya juga dapat meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dan mengurangi tingginya tingkat kemiskinan. Tapi dalam pembangunan Kabupaten Bojonegoro tersebut harus ada faktor pendukung lain selain dari sektor migas untuk menunjang pembangunan Bojonegoro. Mulai dari peningkatan mutu pendidikan yang sesuai hingga infrastruktur yang memadai. Pendidikan sangat dibutuhkan dalam menunjang pengelolaan serta pengembangan sektor migas tersebut. Karena semakin banyak tenaga ahli yang ada dalam pengembangan sektor migas tersebut maka akan semakin tinggi pula pendapatan perkapita dan rendahnya tingkat kemiskinan yang ada.

Melalui sektor migas tersebut pemerintah daerah Bojonegoro terus berupaya untuk memaksimalkan pengaruh dan dampak dari keberadaan sektor migas tersebut. Dari tahun 2009 hasil produksi migas secara keseluruhan yang ada di Bojonegoro terus mengalami peningkatan secara signifikan di setiap tahunnya. Peningkatan hasil produksi tersebut sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Bojonegoro melalui dana perimbangan. Sektor migas sendiri adalah salah satu penerimaan unggulan atau pemasok terbesar pendapatan daerah Bojonegoro. Meningkatnya pendapatan daerah sendiri secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan daerah Bojonegoro. Hal tersebut didasarkan dari tidak terlepasnya proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dari kondisi pendapatan daerah. Dapat

disimpulkan bahwa meningkatnya pendapatan Bojonegoro seharusnya dapat berpengaruh terhadap meningkatnya perencanaan pembangunan daerah Bojonegoro. Secara berurutan meningkatnya hasil produksi migas sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah diikuti juga dengan meningkatnya perencanaan pembangunan daerah. Permasalahannya adalah pengaruh keberadaan sektor migas tersebut telah sesuai dengan perencanaan dan harapan pemerintah belum dapat dipastikan.

Keberadaan dan meningkatnya produksi migas di setiap tahun seharusnya dapat memberikan pengaruh lebih terhadap perkembangan pembangunan daerah Bojonegoro. Pengaruh tersebut harus dapat dirasakan oleh masyarakat baik dari segi sosial maupun perekonomiannya. Karena kesejahteraan masyarakat juga harus diperhatikan atas keberadaan sektor migas tersebut. Keberadaan sektor migas sendiri sedikit banyak telah berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Berawal dari pembebasan lahan warga demi kepentingan eksplorasi dan eksploitasi hingga dampak lingkungan atas keberadaan industri migas tersebut. Banyaknya masyarakat sekitar yang menganggur karena sebagian besar masyarakat sekitar yang dulunya menggantungkan hidup terhadap hasil pertanian harus melepaskan lahan tersebut untuk kepentingan industri. Banyak permasalahan yang timbul baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan sekitar. Keberadaan sektor migas tersebut seharusnya mampu berperan aktif tidak hanya pada pembangunan daerah tetapi juga membangun kesejahteraan masyarakat sekitar. Proses pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat

menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah, tetapi industri migas juga memiliki tanggung jawab atas daerah sekitar atas keberadaannya tersebut.

Untuk perencanaan dan proses pelaksanaan pembangunan sendiri harus sesuai dengan tujuan awal pemerintahan bahwa pembangunan serta pengembangan daerah harus dilakukan merata hingga daerah tingkat bawah. Tapi dalam pelaksanaan tersebut banyak kendala ataupun masalah yang dihadapi mulai dari masalah internal maupun masalah eksternal. Seperti belum merata sepenuhnya proses pembangunan yang dilakukan daerah dalam menunjang perkembangan daerah sekitar. Ditambah dengan kurangnya pengawasan pemerintah daerah dalam proses pembangunan hingga tingkat desa juga menjadi salah satu tidak maksimalnya pemerataan pembangunan daerah. Dengan nilai produksi sektor migas yang terus meningkat setiap tahunnya seharusnya bisa memenuhi pembangunan yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya meningkatnya pendapatan daerah, baiknya juga diikuti oleh meningkatnya perencanaan dan proses pembangunan daerah. Ditambah dengan keberadaan perusahaan-perusahaan sektor migas yang juga memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan daerah seharusnya pihak swasta tersebut juga dapat mendukung proses pembangunan daerah Bojonegoro. Karena keberadaan sektor migas tersebut harus dapat memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi sekitar. Apalagi produksi migas tiap tahunnya mengalami peningkatan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah Bojonegoro. Kondisi tersebut seharusnya berpengaruh terhadap pengembangan dan pembangunan daerah Bojonegoro. Jadi keberadaan sektor

migas di Bojonegoro dengan hasil produksi yang terus mengalami peningkatan disetiap tahun, harusnya memiliki kontribusi serta peran penting dan cukup besar terhadap penerimaan dan pembangunan daerah di Bojonegoro.

Oleh karena itu perlu adanya analisis tentang kontribusi sektor migas tersebut dalam meningkatkan pembangunan Daerah demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul tentang **Kontribusi Sektor Migas Terhadap Penerimaan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bojonegoro.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kontribusi sektor migas terhadap penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro?
- b. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat pengembangan sektor migas dalam rangka meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah digunakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendiskripsikan kontribusi sektor migas terhadap penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah serta upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mengelola sektor migas Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro
- b. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan dan pengelolaan sektor migas dalam meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro.

D. Kontribusi Penelitian

- a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi instansi – instansi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait di dalam proses pelaksanaan dan pengembangan sektor migas, agar nantinya dalam proses pengembangan sektor migas tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat serta pemerintah sekitar tentang kontribusi sektor migas terhadap penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan dan mendukung proses pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini merupakan latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan mengenai analisis kontribusi sektor migas terhadap penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro.

BAB II : Kajian Pustaka

Berisi landasan teori dan pernyataan pakar mengenai peran serta pengembangan sektor migas, penjelasan tentang otonomi daerah, penjelasan tentang keuangan daerah, serta pembangunan daerah. Teori serta pernyataan pakar tersebut digunakan untuk memperkuat hasil analisis yang ada di lapangan.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, fokus penelitian yang mengemukakan data yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis. Kemudian lokasi dan situs penelitian, tempat penelitian dilakukan, sumber data yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data yang menyangkut bagaimana penulis memperoleh data dan analisis data yang mengemukakan dan bagaimana penulis mengelompokkan data sehingga siap dianalisis serta metode analisis yang digunakan, yakni menggunakan metode kualitatif.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menyajikan deskripsi wilayah penelitian dengan mengemukakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, penyajian data, dan gambaran umum lokasi penelitian dan interpretasi data, serta pembahasan data secara lengkap.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang garis besarnya merupakan temuan pokok, baik bersifat substansial maupun metode teknis serta dikemukakan pula analisis dari hasil pembahasan, serta saran yang merupakan rekomendasi yang berisi tentang masukan dari peneliti yang bisa dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan sektor migas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah

1. Desentralisasi

Desentralisasi secara umum merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Dasar dari sistem desentralisasi adalah untuk memudahkan pemerintah dalam mengatur dan mensejahterakan masyarakatnya melalui pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah lebih dekat jangkauannya kepada masyarakat sekitar dari pada pemerintah pusat. Sehingga keputusan bisa diambil secara cepat karena pemerintah daerah lebih mengerti kondisi masyarakat sekitar. Di dalam desentralisasi juga dijelaskan bahwa sebagian urusan pemerintah dan sumber-sumber pembiayaan diserahkan kepada pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Ini berarti, bahwa pengambilan keputusan sepenuhnya menjadi hak, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah menentukan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan serta pengembangan sumber daya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri, yaitu dinas-dinas daerah.

Sebagaimana Conyens dalam Muluk (2006:6) membagi jenis desentralisasi berdasarkan beberapa pertimbangan yakni :

“Aktivitas fungsional dari kewenangan yang ditransfer, jenis keuangan atau kekuasaan yang ditransfer pada setiap aktivitas fungsional, tingkat atau area kewenangan yang ditransfer, kewenangan atas individu, organisasi atau badan yang ditransfer dalam setiap kegiatan, dan kewenangan yang ditransfer secara legal atau administratif.” (Conyens dalam Muluk, 2006:6)

Desentralisasi dalam arti sempit berkaitan dengan dua hal, yaitu pertama, adanya subdevisi teritori dari suatu negara yang mempunyai ukuran otonomi. Subdivisi teritori ini memiliki *self governing* melalui lembaga politik yang memiliki akar dalam wilayah yang sesuai dengan batas yuridiksinya. Kedua, lembaga-lembaga tersebut akan direkrut secara demokratis. (Muluk, 2006:6)

Tujuan dari desentralisasi sendiri adalah untuk memaksimalkan pelayanan publik hingga tingkat daerah. Alasannya adalah karena pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi daerahnya dan juga mengerti kebutuhan yang sedang dibutuhkan masyarakat sekitar. Di harapkan melalui sistem desentralisasi ini pemerintah daerah dapat memaksimalkan pembangunan daerahnya dan juga memaksimalkan pengelolaan sumber daya-sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Masyarakat daerah juga dituntut untuk bisa mandiri dalam keikutsertaan masyarakat di pemerintahan. Dalam sistem desentralisasi pemerintah pusat juga berperan aktif dalam mengontrol dan mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya.

Di lihat dari sudut pandang manajemen pembangunan, desentralisasi di negara berkembang terdiri dari dua bentuk desentralisasi, yaitu yang bersifat administratif dan yang bersifat politik. Desentralisasi administratif merupakan sebuah delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di

tingkat lokal. Para pejabat tersebut dalam batas-batas rencana dan sumber-sumber pembiayaan yang sudah ada ditentukan, namun juga memiliki keleluasaan, kewenangan, dan tanggung jawab tertentu dalam mengembangkan pelayanan ditingkat lokal. Kewenangan tersebut terdiri dari penetapan peraturan-peraturan yang sifatnya formal hingga keputusan-keputusan yang lebih substansial. Untuk desentralisasi politik sendiri menyangkut wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah regional dan lokal dalam rangka mengurus kepentingan rumah tangga daerahnya.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai konsekuensi dari asas ini, dibentuklah unit pemerintahan setempat yang disebut dengan daerah otonom. Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia yang didasarkan pada sistem desentralisasi. Otonomi daerah sendiri memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan, kemampuan serta kebutuhan daerah tersebut. Wujud dari sistem desentralisasi tersebut adalah diberikannya otonomi daerah atau kata lainnya adalah daerah otonom. Yang di maksud dengan daerah otonom adalah daerah yang berhak dan berkewajiban mengatur dan mengawasi rumah tangganya sendiri atas dasar kebijaksanaan dan inisiatif, pembiayaan dan dilakukan oleh perangkat daerah sendiri. Biasanya suatu daerah diberi sistem ini karena keadaan geografisnya yang unit atau penduduknya merupakan minoritas negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum khusus yang hanya cocok diterapkan untuk daerah tersebut. Selanjutnya disebutkan pula bahwa daerah otonom, yang disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara

memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Hasil yang diharapkan dari otonomi adalah pemberian pelayanan publik yang lebih memuaskan, pengakomodasian partisipasi masyarakat, pengurangan beban pemerintahan pusat, penumbuhan kemandirian dan kedewasaan daerah, serta penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.

B. Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. (pasal 1 butir 55 PP No. 58 Tahun 2005).

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000. Saat ini disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 32 dan 34 tahun 2004. Definisi keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam mengatur, mengawasi dan mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembangunan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PDB).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka APBD.

Di dalam Undang-Undang yang mengatur keuangan negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan yang berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintah daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai pemerintah daerah. Kebijakan keuangan daerah sering kali diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata. Dalam peraturan perundang-undangan, sumber pendapatan daerah sendiri terdiri atas :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah berbagai sumber pendapatan daerah yang merupakan hasil dari usaha daerah tersebut dalam mendapatkan pendapatan yang digunakan untuk menyelenggarakan dan mengolah kebutuhan rumah tangganya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 33 pasal 1 ayat 7 tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa tujuan dari PAD adalah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang nomor 32 pasal 157 tahun 2004 terdiri dari :

a. Hasil pajak

Menurut Suparmoko pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya Suparmoko menyebutkan bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten dan kota. (Suparmoko, 2002:56)

b. Hasil retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atas perizinan tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

(Suparmoko, 2002:82).

- c. Hasil perusahaan daerah milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pemasukan daerah lain-lain yang dianggap sah. Dalam rangkaian meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah daerah dilarang (Mardiasmo, 2002:132) :

- a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan import/eksport.

Larangan tersebut merupakan salah satu peraturan dan pengawasan khusus untuk pemerintah daerah agar pengelolaan PAD tersebut tidak berdampak negatif. Karena dalam hal ini pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan PAD tersebut. Jadi setiap kebijakan maupun keputusan yang dibuat pemerintah tentang pengelolaan pendapatan daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Karena pemenuhan kebutuhan daerah tersebut melalui pengelolaan pendapatan

asli daerah tersebut. Jadi pengelolaan pendapatan daerah tersebut merupakan faktor utama dalam pemenuhan kebutuhan dari daerah tersebut. Di samping itu kemampuan melaksanakan ekonomi daerah diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah bantuan yang diberikan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2) Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah. Di jelaskan pula bahwa tujuan dari dana perimbangan adalah untuk

menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antar pemerintah daerah. Dalam dana perimbangan terdapat tiga komponen yaitu :

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengaturan DBH sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang tersebut dimuat pengaturan mengenai Bagi Hasil penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21 serta sektor pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Selain itu, dana reboisasi yang semula termasuk bagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dialihkan menjadi DBH. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

2. Sumber Dana Bagi Hasil dari Pajak dan Sumber daya alam.

1. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21. DBH dari

penerimaan PBB dan BPHTB dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota dan pemerintah. DBh dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a) 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi.
- b) 64,8% untuk daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten atau Kota; dan
- c) 9% untuk pembiayaan pemungutan.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% dengan rincian sebagai berikut :

- a) 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi; dan
- b) 64% untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten atau Kota.

2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber daya alam berasal dari:

- a) Kehutanan
- b) Pertambangan Umum
- c) Perikanan
- d) Pertambangan Minyak Bumi
- e) Pertambangan Gas Bumi
- f) Pertambangan Panas Bumi

Untuk mempermudah pemahaman tentang Dana Bagi Hasil, dapat dijabarkan melalui table berikut :

Tabel 2.1 Pembagian Dana Bagi Hasil

Sumber DBH	Pemerintah Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota	Keterangan
PBB	10%	16,2%	64,8%	9% biaya pungut
BPHTB	20%	16%	64%	
PPH Pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pasal 21	80%	8%	12%	
Kehutanan: a. Iuran HPH b. Provinsi SDH	20%	16% 16%	64% 32% 32%	Kab/Kot penghasil Kab/Kot lain se-provinsi
c. Dana Reboisasi	60%		40%	
Pertambangan Umum a. Land-rent b. Royalti	20%	16% 16%	64% 32% 32%	Kab/Kot Penghasil Kab/Kot lain se-provinsi
Perikanan	20%		80%	Seluruh Kab/Kot
Pertambangan Minyak Bumi	84,5%	3% 0,1%	6% 6% 0,4%	Kab/Kot Penghasil Kab/Kot lain se-provinsi Untuk menambah anggaran pendapatan dasar
Pertambangan Gas Bumi	69,5%	6% 0,1%	12% 12% 0,4%	Kab/Kot Penghasil Kab/Kot lain se-provinsi Untuk menambah anggaran
Pertambangan Panas Bumi	20%	16%	32% 32%	Kab/Kot Penghasil Kab/Kot lain se-provinsi

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil. DBH yang merupakan bagian daerah disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana yang berasal dari pemerintah pusat (APBN) untuk pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang penggunaannya diserahkan kepada pemerintah daerah guna mengurangi atau menutup kesenjangan anggaran pemerintah daerah. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana yang berasal dari pemerintah pusat (APBN) yang dialokasikan pada pemerintah daerah tertentu untuk membantu membiayai kegiatan khusus tertentu yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standart tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Daerah penerima DAK wajib menyediakan sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK yang dianggarkan dalam APBD.

3) Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak

mengikat. Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Tata cara pemberian, penerimaan dan penggunaan hibah baik dalam negeri maupun luar negeri telah diatur dalam peraturan pemerintah. Sementara dana darurat dialokasikan pemerintah dari APBN untuk keperluan mendesak. Adapun sumber pendapatan daerah lain adalah pinjaman daerah. Pinjaman daerah adalah pinjaman yang dilakukan oleh daerah dari sumber dalam negeri maupun dari luar negeri. Sumber pinjaman dalam negeri meliputi pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat. Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui pasar modal. Pinjaman sendiri bisa dilakukan dalam bentuk pinjaman jangka panjang pendek maupun jangka panjang untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana sebagai asset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan guna pembayaran pengembalian atau pelunasan pinjaman.

C. Pembangunan Daerah

1. Pengertian Pembangunan Daerah

Pembangunan adalah salah satu bentuk dari sebuah perkembangan ataupun perbaikan dari sesuatu hal yang belum sempurna. Banyak pengertian maupun definisi mengenai pembangunan, secara umum pembangunan sendiri merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk memperbaiki maupun memperbarui sesuatu melalui perencanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara teori pembangunan sendiri diartikan sebagai usaha untuk menyelesaikan sebuah

masalah yang dihadapi oleh negara maupun daerah miskin maupun terbelakang atau yang sedang berkembang. Menurut Siagian (Suryono, 2010:46) pembangunan adalah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan demikian, ide pokok pembangunan menurut Siagian mengandung makna: (a) bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir, (b) pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus, (c) pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan, (d) pembangunan mengarah kepada modernitas, (e) modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Dari segi daerah pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah

tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah suatu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternative, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, ahli ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Berbicara tentang pembangunan suatu wilayah tidak bisa terlepas dari perencanaan pembangunan itu sendiri. Menurut Nugroho dan Dahuri (2012:12) pengertian pembangunan wilayah atau daerah adalah konsep yang utuh dan menyatu dengan pembangunan wilayah. Secara luas pembangunan wilayah atau daerah diartikan sebagai suatu upaya yang merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.

Sejalan dengan pernyataan diatas menurut Nugroho dan Dahuri (2012:13) perencanaan pembangunan daerah menjadi relevan karena di dalam aspek wilayah dan implementasi ke dalam kebijakan ekonomi menyimpan tiga pilar penting yaitu :

Pertama, keunggulan komparatif. Pilar ini berhubungan dengan keadaan bahwa ditemukan sumberdaya-sumberdaya tertentu yang secara fisik relatif sulit atau memiliki hambatan untuk digerakkan antar wilayah. Hal

ini disebabkan adanya faktor-faktor lokal (bersifat khas atau endemik misalnya iklim, budaya) yang mengikat mekanisme produksi sumberdaya tersebut sehingga wilayah memiliki keunggulan komparatif.

Kedua, aglomerasi. Pilar aglomerasi merupakan fenomena eksternal yang berpengaruh terhadap pelaku ekonomi berupa meningkatnya keuntungan-keuntungan sebagai akibat keputusan ekonomi secara spasial. Hal ini terjadi karena berkurangnya biaya-biaya produksi akibat penurunan jarak dalam pengangkutan bahan baku maupun distribusi produk.

Ketiga, *transport cost*. Pilar ini adalah yang paling kasat mata mempengaruhi aktivitas perekonomian. Implikasinya biaya-biaya yang terkait dengan jarak dan lokasi tidak dapat lagi diabaikan dalam proses produksi dan pembangunan wilayah.

Terdapat 3 perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut :

a. Pola dasar pembangunan daerah

Pola dasar pembangunan daerah analog dengan pola dasar yang tercantum dalam GBHN pada tingkat nasional, berisi garis-garis besar kebijaksanaan atau strategi dasar pembangunan daerah baik untuk jangka panjang maupun untuk jangka pendek.

b. Repelita daerah

Repelita daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari pola dasar pembangunan daerah yang dinyatakan berlaku dengan surat keputusan gubernur maupun kepala daerah.

c. Rencana tahunan dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)

Rencana tahunan merupakan pedoman penyusunan APBD sedangkan APBD merupakan tindakan pelaksanaan repelita daerah, karena itu harus terlihat

jelas kaitan atau hubungan antara anggaran dan repelita seperti juga halnya hubungan antara GBHN atau pola dasar dengan repelita atau repelita daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan, pembangunan dan daerah yang meliputi pengertian sebagai suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetap berpegang pada azas prioritas. Ciri-ciri perencanaan pembangunan daerah, meliputi :

- a. Menghasilkan program-program yang bersifat umum
- b. Analisis perencanaan yang bersifat makro/luas
- c. Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang
- d. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas
- e. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek

D. Pembangunan Berkelanjutan

1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan sendiri merupakan seperangkat usaha yang terencana dan terarah dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Dalam kaitannya peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan hidup juga merupakan salah satu tujuan dari pembangunan tersebut. Dalam usaha dan upaya tersebut diperlukannya berbagai modal yaitu berupa sumber daya yang dimiliki dan dapat digunakan dalam proses pembangunan tersebut. Dalam hal ini negara memiliki peran penting dalam proses pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki negara tersebut secara bijaksana.

Menurut Ginanjar Kartasasmita (Riyadi dan Baratakusumah, 2004:4) memberikan pengertian pembangunan secara sederhana yaitu suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Todaro berpendapat bahwa paling tidak ada tiga komponen dasar atau esensi yang harus dijadikan dasara untuk memahami pembangunan yang hakiki yaitu: (a) Kecukupan (*Sustenance*) yaitu terpenuhinya semua hal yang merupakan kebutuhan dasar dari manusia yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan, (b) Jati diri (*Self Esteem*) yaitu adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, menghargai diri sendiri, merasa diri pantas dan layak untuk mengejar atau melakukan sesuatu dan seterusnya, (c) Kebebasan (*Freedom*) yaitu kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materiil dalam kehidupan. (Todaro, 2002:21)

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprinsip pada pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa harus merusak pemenuhan kebutuhan mendatang. Berdasarkan prinsip tersebut pembangunan berkelanjutan mencakup tiga aspek kebijakan yaitu: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan. Tiga aspek tersebut merupakan faktor penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Misalnya pada pembangunan ekonomi yang dituntut untuk memajukan perekonomian dalam jangka panjang tanpa menghabiskan modal alam yang ada. Karena memang fokus dari pembangunan berkelanjutan adalah pada pembangunan masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi pembangunan yang dilakukan harus juga memprioritaskan pada masa yang akan datang. Mulai dari kegunaan hingga dampak yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

Pembangunan yang dimaksud dalam pengertian pembangunan berkelanjutan memiliki konteks yang luas, misalnya pembangunan kota atau wilayah, lahan, masyarakat, bisnis, ekonomi dan lain sebagainya. Pada intinya pembangunan berkelanjutan tidak hanya memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, atau bagaimana pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan semestinya, pembangunan berkelanjutan mencakup keseluruhan pembangunan dan bagaimana suatu pembangunan dijalankan, tanpa mengorbankan aspek-aspek lainnya. Ada tiga alasan utama penggunaan istilah pembangunan berkelanjutan :

a) Ekologi

Nilai ekologi dari keanekaragaman hayati sangat tinggi, oleh sebab itu kegiatan ekonomi seharusnya tidak hanya pemanfaatan sumber daya alam atau lingkungan semata karena dapat mengancam fungsi ekologi tersebut.

b) Moral

Kekayaan sumber daya alam serta lingkungan yang telah diolah menjadi barang, hendaknya secara moral kita harus memikirkan juga mengenai ketersediaan SDA untuk orang-orang yang hidup dimasa depan.

c) Ekonomi

Hingga saat ini masih dalam perdebatan apakah kegiatan ekonomi sudah memenuhi kriteria pembangunan berkelanjutan atau belum, karena ekonomi berkelanjutan tersebut biasanya bersifat paradox, disatu sisi bisa disebut pembangunan berkelanjutan, disisi lainnya dapat mengurangi kualitas ekonomi lainnya, lingkungan atau moral.

2. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai pedoman dalam menilai pembangunan yang berjalan. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menurut Robinson (Mitchell dkk, 2007:36) dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Prinsip lingkungan

- 1) Melindungi sistem penunjang kehidupan.
- 2) Melindungi dan meningkatkan keanekaragaman biotik.

- 3) Memelihara atau meningkatkan integritas ekosistem, serta mengembangkan dan menerapkan ukuran-ukuran rehabilitasi untuk ekosistem yang sangat rusak.
- 4) Mengembangkan dan menerapkan strategi yang preventif dan adaptif untuk menanggapi ancaman perubahan lingkungan global.

b. Prinsip sosio-politik

- 1) Dari hambatan lingkungan atau ekologi
- 2) Dari kriteria sosio-politik

Prinsip selanjutnya yaitu untuk memelihara atau meningkatkan integritas ekosistem, serta mengembangkan dan menerapkan ukuran-ukuran rehabilitasi untuk ekosistem yang sangat rusak, seperti dampak industri limbah minyak yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kriteria pembangunan berkelanjutan menurut Martopo dan Mitchell (1995:21) adalah sebagai berikut:

- 1) Integritas ekologi: mempertahankan sistem penyangga kehidupan, melestarikan keanekaragaman hayati dan meyakinkan pemakaian spesies dan ekosistem yang berlanjut.
- 2) Efisiensi.
- 3) Keadilan.
- 4) Integritas budaya.
- 5) Masyarakat: mendorong kemampuan lokal untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga menjadi bagian dalam mendapatkan kriteria lain, seperti pemenuhankebutuhan dasar, pemerataan, integritas ekologi dan budaya.
- 6) Keterpaduan/keseimbangan/keselarasan.
- 7) Pembangunan sebagai realisasi potensi: mendorong kemampuan di semua tingkat; dari desa. Ke provinsi, ke nasional, untuk mengenalkan kebutuhan dan memperbaiki kualitas kehidupan.

3. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pengertian pembangunan berkelanjutan dapat ditemukan baik secara eksplisit maupun implisit dalam berbagai perjanjian internasional dan berbagai instrumen lainnya. Laporan komisi (Silalahi, 2003:15) pada tahun 1987 merupakan pengertian hukum yang luas dan dianut secara luas yang memberikan pengertian *sustainable development: development that meets the needs off the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs*. Ada dua konsep penting dalam rumusan di atas. Pertama, konsep kebutuhan (*needs*) terutama kebutuhan dasar generasi saat ini, dan kedua, ide keterbatasan yang didasarkan pada pertimbangan kemajuan teknologi dan organisasi sosial untuk menetapkan daya dukung lingkungan yang mampu menopang kehidupan generasi sekarang dan generasi masa depan.

Brundtland (Silalahi 2003:15) mengidentifikasi beberapa masalah kritis yang perlu dijadikan dasar kebijakan lingkungan bagi konsep pembangunan berkelanjutan:

- 1) Mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kualitas.
- 2) Mendapat kebutuhan pokok mengenai pekerjaan, makanan energi, air, dan sanitasi.
- 3) Menjamin tingkat pertumbuhan penduduk yang mendukung keberlanjutan.
- 4) Melakukan konservasi dan kemampuan sumber daya.
- 5) Orientasi teknologi dan mengelola resiko.
- 6) Memadukan pertimbangan lingkungan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan.

Pembangunan berkelanjutan atau yang biasa dikenal dengan *sustainable development* merupakan salah satu kunci besar bagi kelestarian lingkungan. Pembangunan yang berpola pada penggunaan sumber daya yang bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan manusia sekaligus melestarikan lingkungan. Tujuan akhirnya nanti adalah pada pemenuhan kebutuhan yang dipenuhi tidak hanya untuk masa sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Proses pembangunan tersebut juga harus mengoptimalkan dan menyelaraskan sumber daya alam dan manusia dalam proses pembangunannya. Menurut Salim, konsep pembangunan berkelanjutan ini didasari oleh lima ide pokok besar, yaitu sebagai berikut :

Pertama, proses pembangunan harus berlangsung secara berlanjut, terus-menerus dan kontinyu yang ditopang oleh sumber alam, kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berlanjut pula. Kedua, sumber alam (terutama udara, air, dan tanah) memiliki ambang batas, dimana penggunaannya akan menciutkan kuantitas dan kualitasnya. Ketiga, kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup. Keempat, bahwa pola penggunaan sumber alam saat ini mestinya tidak menutup kemungkinan memilih opsi atau pilihan lain di masa depan. Dan yang kelima, pembangunan berkelanjutan mengandalkan solidaritas transgenerasi sehingga kesejahteraan bagi generasi sekarang tidak mengurangi kemungkinan bagi generasi selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraan pula.

Pada intinya pembangunan berkelanjutan sebagai suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam dan manusia dalam pembangunan. Dalam hal ini ada dua gagasan penting yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut :

- a. Gagasan kebutuhan merupakan gagasan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia dalam keberlangsungan hidup dengan prioritas utamanya adalah masyarakat miskin.
- b. Gagasan keterbatasan merupakan keterbatasan kemampuan alam atau lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan baik kebutuhan masa kini maupun untuk kebutuhan di masa yang akan datang.

Dengan berpedoman pada kedua gagasan tersebut, proses pembangunan berkelanjutan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Melalui gagasan kebutuhan, proses pembangunan bisa mengacu pada kondisi dan kemampuan masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ditambah dengan beberapa prediksi dan rencana untuk kehidupan masyarakat tersebut dimasa yang akan datang. Dari sinilah proses pembangunan bisa berjalan sesuai dengan kemampuan dan kondisi masyarakat sekitar. Kemudian gagasan keterbatasan adalah acuan dari proses pembangunan dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang ada. Dari gagasan tersebut bisa diprediksi dan direncanakan seberapa mampukah sumber daya alam yang ada bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Tidak hanya berprioritas pada pemenuhan kebutuhan masa sekarang tapi juga harus memperhatikan dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dimasa yang akan datang. Dan dari kedua gagasan tersebut proses pembangunan berkelanjutan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan saat ini telah menjadi perhatian dan agenda internasional. Dapat dikatakan bahwa semua negara di dunia baik negara maju maupun negara berkembang telah menyadari berapa pentingnya konsep pembangunan berkelanjutan tersebut. Dengan kesadaran tersebut harapannya adalah negara bisa memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan masyarakatnya baik untuk saat ini maupun untuk masa mendatang. Dalam pelaksanaannya, pembangunan berkelanjutan ini memiliki tiga tujuan utama dalam proses pembangunan yang sifatnya berkelanjutan yaitu sebagai berikut :

a. Tujuan Ekonomi

Di artikan sebagai tujuan pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan perekonomian untuk masa yang akan datang. Tujuan ekonomi ini terkait dengan masalah efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam proses pembangunan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi haruslah berorientasi pada pembangunan dimasa depan. Karena memang pertumbuhan ekonomi harus bisa stabil antara kondisi saat ini dengan kondisi yang akan datang.

b. Tujuan Ekologi

Sistem keberlanjutan berorientasi pada lingkungan harus mampu menjaga kestabilan sumber daya alam yang ada. Di samping itu proses eksploitasi sumber daya alam yang berdampak negatif juga harus bisa dihindari dari proses pembangunan yang berkelanjutan. Hal terpenting dari

pembangunan ini adalah konservasi sumber daya alam yang menunjang proses pembangunan tersebut.

c. Tujuan Sosial

Pembangunan yang berprioritas pada sosial dapat diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender dan akuntabilitas politik. Tujuan tersebut terkait pada masalah pengurangan kemiskinan dan pemerataan.

Dengan demikian, tujuan dari pembangunan berkelanjutan pada dasarnya terletak pada adanya harmonisasi antara tujuan ekonomi, tujuan ekologi dan tujuan sosial. Proses pembangunan ketiga aspek tersebut harus berjalan secara seimbang antara aspek satu dengan aspek yang lain tanpa harus meninggalkan salah satu aspek tersebut. Dalam pelaksanaannya saat ini antara negara maju dengan negara berkembang memiliki proses dan upaya yang berbeda dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Di negara maju, penekanan utama pembangunan berkelanjutan adalah pada bagaimana memadupadankan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan. Dengan pusat pertama dari negara maju pada kemajuan perekonomiannya. Berbeda dengan negara berkembang yang lebih ditekankan pada aspek lingkungannya. Karena memang kondisi lingkungan negara berkembang lebih digantungkan oleh negara maju yang pada dasarnya kondisi lingkungannya sudah berupa negara metropolitan. Di samping itu negara maju juga menekankan pada prioritas pembangunan berkelanjutan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia saat ini,

serta menjamin kelangsungan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, penekanannya lebih pada pemerataan antar generasi dari pada lintas generasi.

E. Sektor Migas

1. Pengertian Migas

Minyak bumi dan gas atau biasa disebut dengan migas, merupakan salah satu sumber daya alam atau hasil bumi yang saat ini menjadi perhatian khusus dari negara-negara di dunia. Kegunaan dan manfaat dari migas sendiri sangatlah banyak dan hampir seluruh negara menggunakan dan membutuhkan migas tersebut. Tetapi yang menjadi kendala adalah keberadaan migas tersebut tidak merata ke seluruh pelosok dunia, melainkan hanya di beberapa belahan dunia. Salah satu penghasil migas terbesar hingga saat ini adalah di kawasan timur tengah.

Migas sendiri merupakan minyak bumi dan gas yang berasal dari binatang-binatang laut yang kecil maupun yang besar hidup dilaut dangkal yang selanjutnya mati dan kemudian terendapkan, sehingga dalam kurun waktu yang lama akan tertutup oleh lapisan yang tebal. Secara ilmiah, pengaruh waktu, tekanan dan temperatur yang tinggi merubah makhluk tersebut menjadi Petroleum (minyak bumi dan gas) atau yang biasa disebut dengan migas. Jika dilihat dari fungsi atau kegunaan utama dari migas sendiri adalah sebagai bahan bakar yang baik. Oleh karena itu banyaknya teknologi saat ini menggunakan bahan bakar migas sebagai bahan penggerak. Dan karena keberadaannya yang sangat terbatas,

banyak negara maju yang berlomba untuk mendapatkan minyak bumi tersebut melalui kerjasama asing. Salah satu perhatian dari negara maju seperti Amerika adalah migas yang berada di Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa sumber daya alam dan hasil bumi yang dimiliki Indonesia begitu melimpah. Dan salah satu hasil bumi yang menjadi perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia adalah migas yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

2. Pengolahan Sektor Migas

Migas sendiri merupakan salah satu elemen penting bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan migas yang maksimal. Secara tidak langsung pengelolaan migas di Indonesia ini memang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun. Dan melalui migas tersebut pembangunan ekonomi di arahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang kuat dalam meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Saat ini Indonesia dihadapkan pada tiga tantangan besar dalam segi perekonomian yaitu nilai tukar rupiah yang menembus Rp. 10.000,00, cadangan devisa yang berkurang serta indeks harga saham yang menurun. Melihat dari tiga faktor tersebut, sektor migas diakui telah menjadi salah satu penyelamat keuangan negara. Untuk itu, perlu ada semacam pengetahuan bagi publik untuk tidak mengganggu sektor migas dan menjaga keberadaannya. Dalam proses pengelolaan migas sendiri ada lima tahapan kegiatan yaitu, eksploitasi, produksi, pengolahan, transportasi dan pemasaran. Kemudian lima kegiatan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan hulu dan kegiatan hilir.

Kegiatan hulu migas sendiri terdiri dari kegiatan eksploitasi dan produksi. Kegiatan eksploitasi sendiri merupakan kegiatan yang meliputi studi geologi, studi geofisika dan pengeboran eksplorasi. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan awal dari seluruh kegiatan pengelolaan migas. Sedangkan kegiatan hilir terdiri dari kegiatan pengolahan, transportasi dan pemasaran. Jadi kegiatan hilir adalah kegiatan akhir setelah migas tersebut berhasil diproduksi.

3. Kontribusi Sektor Migas

Sektor migas merupakan salah satu sumber daya alam atau hasil bumi yang fungsi dan kegunaannya sangat banyak. Baik secara langsung maupun tidak langsung keberadaan migas di suatu daerah sangat berpengaruh terhadap daerah tersebut. Baik dari segi sosial, ekonomi maupun lingkungan sekitar. Dalam segi pemanfaatan, kontribusi yang diberikan sektor migas terhadap sebuah daerah penghasil sangatlah besar. Kontribusi yang berkaitan dengan perkonomian maupun kontribusi dalam bentuk pembangunan. Peran pemerintah dan swasta sangat dibutuhkan dalam proses pengelolaan kontribusi dari sektor migas tersebut. Pemerintah yang merupakan pihak pengontrol dan pengambil keputusan dalam setiap pengelolaannya. Begitupula dengan pihak swasta yang berperan aktif dalam pengelolaan dan produksi sektor migas tersebut. Dalam pengelolaan kontribusi sektor migas tersebut ada beberapa program pendukung baik dari pemerintah maupun dari swasta. Salah satunya adalah program Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan salah satu bentuk pengelolaan sektor migas dari pemerintah. Program tersebut merupakan salah satu program yang mengontrol bentuk pembagian hasil produksi di sektor migas sesuai dengan ketentuan yang telah di atur sebelumnya.

Hasil DBH tersebut akan masuk kedalam Pendapatan Asli Daerah yang kemudian dialokasikan untuk kebutuhan daerah tersebut.

Dari segi perusahaan pengelola migas juga terdapat beberapa program yang dibentuk untuk mengelola hasil produksi migas tersebut. Salah satu program tersebut adalah *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang merupakan program bentuk pertanggung jawaban perusahaan bersangkutan terhadap sosial dan lingkungan daerah sekitar perusahaan tersebut berada. Melalui program tersebut diharapkan keberadaan perusahaan tersebut dapat memberikan dampak dan pengaruh positif terhadap lingkungan sekitar. Bentuk kegiatan dari program CSR diantaranya adalah pemberian jaminan pendidikan kepada masyarakat tidak mampu demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Selain itu juga ada jaminan kesehatan terhadap masyarakat sekitar, perbaikan infrastruktur dilingkungan sekitar hingga pemberian alokasi dana khusus untuk menunjang pembangunan daerah tersebut.

Corporate Sosial Responsibility (CSR) merupakan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berada. CSR sendiri merupakan bentuk fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder*-nya. Fenomena tersebut muncul sejak era dimana kesadaran akan *sustainability* perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar *profitability*. Pada dasarnya, CSR merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan dan juga tanggung jawab perusahaan

terhadap para pemegang saham. Dewasa ini pengertian CSR masih beraneka ragam dan memiliki perbedaan definisi antara satu dengan yang lainnya. Secara global bahwa CSR adalah suatu komitmen perusahaan yang memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan perusahaannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang. Definisi CSR menurut World Bank dalam Maghfir (2011) sebagai berikut :

CSR adalah komitmen bisnis untuk kontribusi pengembangan ekonomi bekerja dengan karyawan dan representative mereka, komunitas lokal dan masyarakat secara luas dan meningkatkan kualitas kehidupan, dimana keduanya baik untuk bisnis dan pengembangannya. Jadi CSR merupakan konsep yang terus berkembang baik secara teoritis maupun praktis. Konsep CSR masih belum baku dan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan itu sendiri serta menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek dalam pelaksananya.

Dengan adanya CSR tersebut, perusahaan akan lebih mengedepankan *sustainability* daripada *profitability* perusahaan. Di mana melalui tindakannya tersebut akan membawa perbaikan dan juga akan membawa dampak positif pada perusahaan berupa *image* perusahaan yang semakin baik di mata masyarakat. Secara garis besar CSR lebih banyak berdampak positif dari pada berdampak

negarif. Karena bagaimanapun juga sesuatu hal yang akan membawa perbaikan dalam hidup (lingkungan, sosial dan ekonomi) adalah sebuah tindakan positif. Contoh bentuk pertanggung jawaban tersebut bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

Sedangkan Tujuan dari *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dapat dijabarkan sebagai berikut:

Program CSR sudah mulai bermunculan di Indonesia seiring telah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adapun isi Undang-Undang yang berkaitan dengan CSR yaitu pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 kenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biasa (*cost centre*) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (*profit centre*). Program CSR sendiri merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain masyarakat mempertanyakan apakah perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimalkan keuntungan-keuntungan ekonomis yang memiliki komitmen moral untuk mendistribusikan keuntungan-keuntungannya membangun masyarakat lokal. Karena seiring berjalannya waktu, masyarakat tidak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab sosial. Pengelolaan CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Dengan pemahaman tersebut, maka pada dasarnya CSR memiliki fungsi dan tujuan strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen resiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial. Selai itu tujuan CSR adalah untuk membangun reputasi perusahaan seperti meningkatkan citra perusahaan maupun pemegang sahamnya, posisi perusahaan hingga bidang usaha perusahaan. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa CSR berbeda dengan charity atau sumbangan sosial. CSR sendiri harus dijalankan diatas suatu program dengan memperhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Tujuan lain dari CSR sendiri juga untuk menimbulkan lingkaran emas yang dapat dinikmati oleh perusahaan dan lingkungan sekitar. Melalui CSR, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal maupun masyarakat luas akan

lebih terjamin. Kondisi ini pada dasarnya akan menjamin kelancaran seluruh proses atau aktivitas produksi perusahaan serta pemasaran hasil produksi perusahaan. Sedangkan untuk terjaganya kelestarian dan alam, selain menjamin kelancaran proses produksi juga menjamin ketersediaan pasokan bahan baku produksi yang diambil dari alam.

Manfaat *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dapat dijabarkan sebagai berikut:

Secara harfiah CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial dari perusahaan. Sedangkan menurut World Bank, CSR adalah komitmen dari bisnis untuk berkontribusi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup sehingga berdampak baik bagi bisnis sekaligus baik bagi kehidupan sosial. Para pengamat bisnis juga ada yang mengartikan sebagai bentuk komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersama dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal dan masyarakat secara lebih luas. Dari definisi tersebut ada beberapa manfaat yang diberikan dari adanya program CSR tersebut, salah satunya adalah manfaat bagi masyarakat.

CSR akan lebih berdampak positif bagi masyarakat, tergantung pada orientasi dan kapasitas lembaga dan orientasi lainnya terutama pemerintah. Studi Bank Dunia menunjukkan, bahwa peran pemerintah yang terkait dengan CSR meliputi pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi. Pelaksanaan CSR sendiri membutuhkan dukungan

pemerintah daerah, kapasitas hukum, dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah sendiri dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Proses pengawasan antara pelaku bisnis dengan kelompok lain juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menghindari proses manipulasi dari pihak swasta atau pelaku bisnis terhadap pemerintah. Jadi pada intinya manfaat CSR bagi masyarakat yaitu dapat mengembangkan diri dan usahanya sehingga sasaran untuk mencapai kesejahteraan dapat tercapai. Keberadaan CSR sendiri juga memiliki manfaat bagi perusahaan diantaranya :

1. Meningkatkan citra perusahaan.

Dengan melakukan kegiatan CSR, konsumen dapat lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan baik bagi masyarakat sekitar.

2. Memperkuat brand perusahaan.

Melalui kegiatan memberikan pengetahuan produk kepada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis, dapat menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan posisi brand perusahaan.

3. Mengembangkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan.

Dalam melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan tentunya tidak mampu mengerjakan sendiri, jadi harus dibantu dengan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat dan

universal lokal. Maka perusahaan dapat membuka relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut.

4. Membedakan perusahaan dengan pesaingnya

Jika CSR dilakukan sendiri oleh perusahaan, perusahaan mempunyai kesempatan menonjolkan keunggulan komparatifnya, sehingga dapat membedakannya dengan pesaing yang menawarkan produk atau jasa yang sama.

5. Menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan.

Memilih kegiatan CSR yang sesuai dengan kegiatan utama perusahaan memerlukan kreativitas, merencanakan CSR secara konsisten dan berkala dapat memicu inovasi dalam perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan peran dan posisi perusahaan dalam bisnis global.

Ruang Lingkup CSR yang dijalankan oleh perusahaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pengertian CSR apabila dilihat dari beberapa konsep yang ada maka dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan komitmen perusahaan yang tidak hanya untuk kepentingan perusahaan semata melainkan juga komitmen perusahaan terhadap kepentingan para stakeholder. Artinya, dapat dibenarkan apabila perusahaan mengejar keuntungan sebesar-besarnya, namun bukan berarti perusahaan tersebut dapat mengorbankan kepentingan masyarakat ataupun pihak lainnya dalam mencapai keuntungan mereka. Perusahaan harus bertanggung

jawab atas kegiatan dari usaha mereka yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan itu berada.

Brodshaw dan Vogel dalam Wahyudi dan Azheri (2008:46) menyatakan bahwa ada tiga dimensi dari garis besar ruang lingkup CSR, yaitu:

- 1) *Corporate Philantrophy*, adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dimana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha-usaha amal ini dapat berupa tanggapan langsung perusahaan atas permintaan dari luar perusahaan atau juga berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola amal tersebut.
- 2) *Corporate responsibility*, adalah usaha-usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
- 3) *Corporate Policy*, adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang meliputi posisi suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi baik bagi perusahaan atau masyarakat secara keseluruhan.

Ruang lingkup CSR berdasarkan tiga dimensi di atas, ternyata dalam prakteknya ada beberapa terminologi yang berkaitan dan bahkan cenderung disamakan dengan CSR antara lain pemberian amal perusahaan, kedermwanaan perusahaan, relasi kemasyarakatan perusahaan dan pengembangan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Metode penelitian adalah suatu alat yang atau secara ilmiah untuk mendapatkan data dan mencapai tujuan penelitian yang sesuai dan konsisten dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Arikunto (1990:30) bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini berusaha menyajikan suatu uraian yang deskriptif yang menggambarkan secara jelas, faktual, sistematis dan cermat pokok-pokok persoalan yang dijumpai dan akibat-akibatnya dan kemudian mencari jalan keluarnya bagi masalah-masalah yang dijumpai.

Adapun yang menjadi dasar pemikiran penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah untuk menggambarkan situasi dan kondisi atau suatu kejadian di lapangan sesuai dengan apa adanya. Definisi pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong(2008:4) dijelaskan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penggunaan pendekatan ini dipandang lebih mendukung dalam memberikan arti dan makna yang berguna dalam menyerap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Bertolak pada penjabaran dari penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif tersebut, maka penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan sektor migas untuk meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dan juga mendeskripsikan mengenai kontribusi sektor tersebut dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.

B. Fokus Penelitian

Menurut Lexi J. Moleong (2008:93), fokus penelitian adalah penempatan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari jawaban. Faktor dalam hal ini dapat berupa konsep, data empiris, pengalaman, atau unsur yang lainnya yang mana apabila keduanya ditempatkan

secara berpasangan akan menimbulkan sejumlah tanda tanya atau kesulitan. Di dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Kontribusi sektor migas terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Bojonegoro:
 - a. Kontribusi sektor migas terhadap penerimaan DBH
 - b. Kontribusi Sektor migas terhadap penerimaan dana perimbangan daerah
 - c. Kontribusi sektor migas dalam meningkatkan APBD Bojonegoro
2. Kontribusi migas di sektor lain dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah
 - a. Penggerak pembangunan daerah
 - b. Membuka lapangan pekerjaan
 - c, Kontribusi migas melalui CSR
3. Faktor pendukung dan penghambat pengembangan sektor migas dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro.
 - a. Faktor Pendukung : Potensi sumber daya alam yang tersedia
 - b. Faktor Penghambat :Terbatasnya wewenang pemerintah daerah terhadap pengelolaan sektor migas

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Penentuan lokasi dan situs penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan data. Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan

penelitian. Adapun lokasi yang akan digunakan sebagai tempat penelitian adalah di Kabupaten Bojonegoro. Penentuan lokasi ini ditentukan dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi yang sangat besar di sektor migas. sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat atau lokasi dimana peneliti memperoleh data dan informasi yang valid dan aktual yang digunakan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang ingin diteliti. Adapun situs penelitian adalah pemerintah Kabupaten Bojonegoro Bagian SDA dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Penetapan situs penelitian didasarkan bahwa tempat-tempat tersebut akan diperoleh validitas dan aktualisasi data yang berhubungan dengan penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2009:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Ada dua jenis data, yakni data primer dan sekunder. Kedua data tersebut sangat penting atau diperlukan untuk ketepatan sejumlah informasi yang relevan dengan data tentang variabel-variabel penelitian dan untuk menyederhanakan data yang akan dikumpulkan agar dalam penelitian dapat membuat kesimpulan-kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Penjelasan mengenai dua jenis data primer dan data sekunder sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan masyarakat sekitar. Di mana untuk mendapatkan data primer ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat bantu lainnya. Sumber data primer bersumber atau didapatkan langsung dari sumbernya (subyek penelitian) yang langsung berhubungan dengan peneliti dan mampu memberikan informasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, jurnal-jurnal dan artikel-artikel, serta arsip-arsip yang ada relevansinya dengan penelitian. Data yang peneliti ambil berasal dari dokumen dan arsip-arsip dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro, dan jurnal internet.

2. Sumber Data

Arikunto (2006:129) menjelaskan bahwa dalam rangka mempermudah dan mengklasifikasikan data, sumber data dapat diidentifikasi menjadi tiga yaitu :

- *Person*, yaitu sumber data bisa memberikan data yang berupa jawaban lisan atau jawab tertulis melalui angket atau questioner.

- *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan data-data berupa huruf, angka, simbol dan lainnya.
- *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau bergerak.

Untuk itu, peneliti membagi sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut :

- Informan, peneliti dalam menentukan informasi awal melakukan pengamatan terlebih dahulu dan pra riset, kemudian peneliti memilih informasi secara *purposive*, pada subyek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti. Kemudian untuk mendapatkan informasi selanjutnya, peneliti meminta kepada informan awal untuk menentukan siapa aktor selanjutnya yang kompeten dan bisa memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian.
- Dokumen, yakni teknik dokumentasi yang dipakai untuk memperoleh data melalui bahan-bahan tertulis berupa peraturan atau kebijakan-kebijakan yang lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sektor migas dalam meningkatkan pembangunan daerah Bojonegoro. Selain itu peneliti juga mencari data yang berhubungan dengan profil lokasi penelitian. Teknik ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi informasi peneliti dan untuk mendapatkan data yang akurat.
- Tempat atau peristiwa sebagai sumber data tambahan yang dilakukan melalui kegiatan observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang

berkaitan dengan kontribusi sektor migas terhadap penerimaan daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang mana cara tersebut menunjuk pada suatu abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya (Sugiyono, 2011 : 224). Dalam penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Marshall (dalam Sugiyono, 2011 : 226) yaitu melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Teknik ini dapat juga digunakan secara bersamaan pada saat wawancara, pengambilan dokumentasi dan survey lapangan. Sehingga dengan observasi ini peneliti dapat memahami perilaku dari obyek penelitian.

2. Wawancara

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk memperoleh data berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan dalam mencari data dengan mencatat langsung yang tersedia pada sumber data peneliti berupa foto-foto hasil kegiatan, arsip-arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang berwujud sarana/benda (Arikunto, 2002). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut :

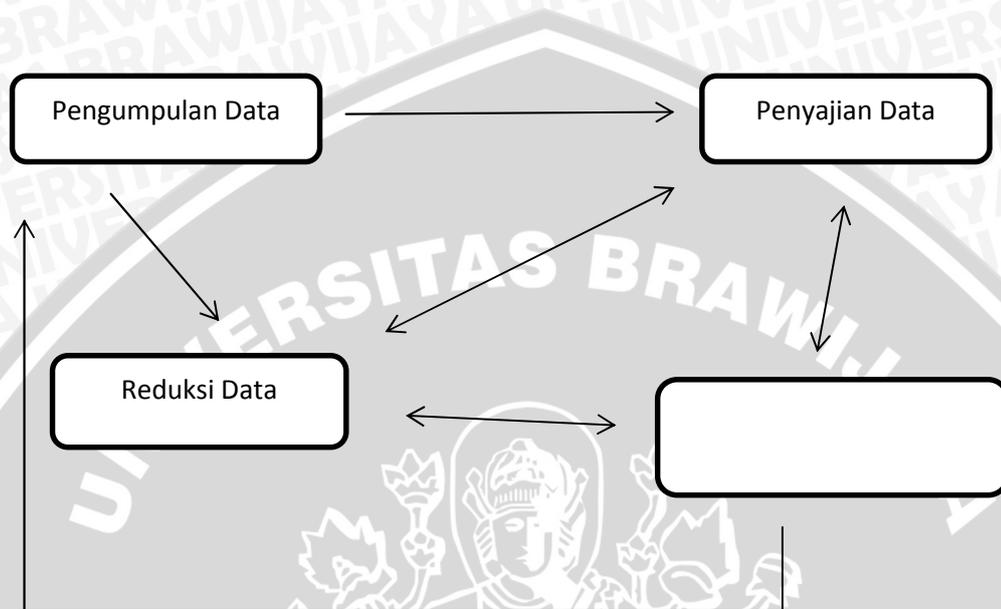
1. Peneliti sendiri, yang merupakan sarana pengumpul data utama, terutama pada proses wawancara dan analisis data. Serta peneliti menggunakan alat panca indera untuk melakukan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.
2. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan wawancara untuk memandu proses wawancara agar dapat terarah pada obyek yang diinginkan/diperlukan dalam penelitian.
3. Buku catatan laporan adalah catatan lapangan yang dibuat oleh peneliti sewaktu mengadakan pengamatan, wawancara, atau menyaksikan kejadian tertentu yang dilakukan terhadap responden dan terjadi di lapangan.

G. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010 : 246) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model Miles dan Huberman yang sering disebut sebagai analisis data model

interaktif. Adapun tahap-tahap analisis data kualitatif dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

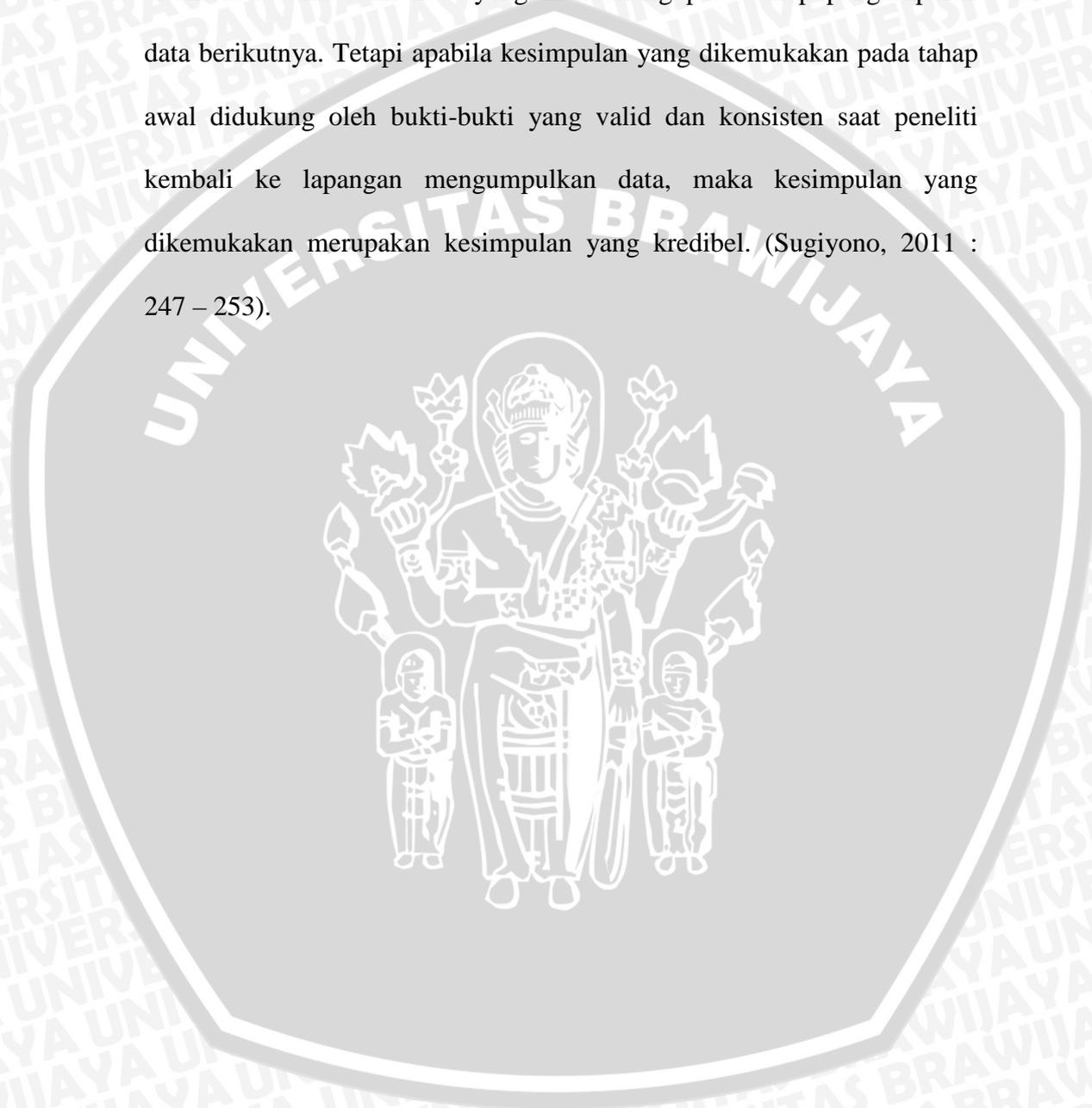


Gambar 3.1 Model Interaktif Analisis Data Miles dan Huberman
Sumber : Miles, M. B and Huberman AM, An Expenden Source Book, Qualitative Data Analysis (London: Sage Publication, 1984), diolah

Memperhatikan gambar di atas, Miles dan Huberman, 1992 berpendapat bahwa analisis data kualitatif memiliki langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam memperoleh dan mengumpulkan data yang valid.
2. Reduksi data, memilih hal-hal, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
3. Penyajian data, peneliti menyusun informasi yang didapatkan. Kemudian digunakan dalam melaporkan hasil penelitian, sehingga mudah untuk dipahami.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dalam hal ini kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono, 2011 : 247 – 253).



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Daerah ini merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah dan merupakan salah satu daerah bagian utara dari Provinsi Jawa Timur. Jarak antara Kabupaten Bojonegoro dengan Surabaya kurang lebih 110 km atau dua jam perjalanan darat. Sebagian besar penduduk Bojonegoro menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian. Bojonegoro yang merupakan salah satu daerah yang merupakan daerah perbukitan, menjadikan Bojonegoro sebagai salah satu daerah yang sukses dalam bidang kehutanan dan pertanian. Terbukti dengan 40 persen wilayah Bojonegoro merupakan kawasan hutan jati yang dikuasai oleh negara melalui Perhutani. Disamping itu Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi SDA berupa minyak bumi yang melimpah. Kondisi tersebutlah yang menjadikan Bojonegoro saat ini menjadi daerah eksplorasi dan eksploitasi migas.

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Bojonegoro memiliki luas 230.706 hektar dengan jumlah penduduk sebesar 1.176.386 jiwa. Bojonegoro merupakan bagian dari wilayah provinsi Jawa Timur dengan jarak kurang lebih 110 kilometer dari ibukota

provinsi Jawa Timur. Topografi Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang daerah aliran sungai Bengawan Solo merupakan daerah dataran rendah, sedangkan di bagian selatan merupakan dataran tinggi di sepanjang kawasan gunung pandan, kramat dan gajah. Dari wilayah seluas di atas, sebanyak 40,15 persen merupakan hutan negara, sedangkan yang digunakan untuk sawah tercatat sekitar 32,58 persen. Sementara itu, untuk menanggulangi kekurangan air untuk keperluan pengairan lahan pertanian di musim kemarau, dilakukan dengan cara menaikkan air dari sungai bengawan solo melalui pompanisasi. Sedangkan untuk batas wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah :

- Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Tuban
- Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Lamongan
- Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk
- Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Blora

b. Kondisi Perekonomian

Kabupaten Bojonegoro berkembang seiring dengan meningkatnya kualitas dalam berbagai aspek. Mulai dari pendidikan, pariwisata, perdagangan, birokrasi pemerintahan, eksplorasi dan eksploitasi SDA, perhotelan hingga olahraga. Dari segi pendidikan sendiri, kualitas pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat menengah mengalami kenaikan. Kondisi tersebut didukung dari perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam meningkatkan sarana prasarana penunjang pembelajaran. Karena 5 persen Dana Bagi Hasil yang di dapat Bojonegoro dari sektor migas dialokasikan untuk pendidikan. Kualitas anak didik pun juga

meningkat seiring dengan banyaknya anak-anak daerah yang menempuh pendidikan hingga tingkat kuliah.

Dibidang pariwisata sendiri, Bojonegoro memiliki beragam tempat wisata berupa Kayangan Api dan Waduk Pacal. Dua tempat wisata alam tersebut merupakan tempat wisata kebanggaan dari Kabupaten Bojonegoro. Kayangan Api yang merupakan wisata alam dengan bentuk wisata berupa kobaran api yang keluar dari dalam tanah. Sedangkan untuk Waduk Pacal merupakan wisata berupa waduk yang terletak di kawasan hutan lindung dari perhutani Bojonegoro. Tidak hanya bidang pariwisata yang menjadi kebanggaan dari bojonegoro, tetapi bidang olahraga juga menjadi salah satu bidang yang membanggakan bagi Bojonegoro. Prestasi yang sangat membanggakan dibidang olahraga adalah masuknya Persatuan Sepak Bola Bojonegoro (PERSIBO) dalam devisi utama. Dari prestasi tersebut menjadikan Bojonegoro sebagai daerah yang memiliki kualitas persepakbolaan yang tinggi. Disisi lain juga ada prestasi dicabang panahan yang telah berhasil mengharumkan Bojonegoro dengan mengirim atletnya ke China.

Bojonegoro yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah menjadikan Bojonegoro sebagai daerah penghasil migas di Indonesia. Sejak ditemukanya sumber-sumber potensial migas pemerintah pusat menjadikan Bojonegoro sabagai daerah eksplorasi dan eksploitasi migas. Kondisi tersebut berdampak positif terhadap perekonomian dan pembangunan yang ada di Bojonegoro. Banyak penduduk yang secara tidak langsung mendapatkan lapangan pekerjaan karena keberadaan perusahaan-perusahaan migas yang ada. Disamping

itu pendapatan daerah juga terus naik seiring naiknya hasil produksi migas yang ada di bojonegoro.

c.. Potensi Migas Bojonegoro

Bojonegoro saat ini menjadi salah satu daerah eksplorasi dan eksploitasi yang ada di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan ditemukannya cadangan-cadangan migas yang berada di wilayah Bojonegoro. Sektor migas merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat banyak sekali manfaat dan kegunaannya. Kondisi tersebut menjadi tanggung jawab baru bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengelola hasil migas tersebut. Karena secara tidak langsung keberadaan migas tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan negara maupun daerah.

Potensi cadangan minyak bumi di Kabupaten Bojonegoro sendiri mencapai lebih dari 1.200 MMBOE. Sampai dengan tahun 2012 pendaagunaannya ada yang baru tahap eksplorasi maupun telah masuk tahap eksploitasi yang dilaksanakan oleh beberapa Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S), baik kontraktor lokal maupun asing, yaitu :

- 1) Pertamina EP yang mengerjakan Lapangan Kawengan (eksploitasi) dan Blok Nona (eksplorasi)
- 2) Exxon Mobile yang mengerjakan Lapangan Banyuurip (eksploitasi)
- 3) Petrochine East Java yang mengerjakan Lapangan Sukowati (eksploitasi) melalui *Join of Body* dengan Pertamina

Tabel 4.1
Realisasi Produksi Minyak Bumi Tahun 2012

K3S	Prognosa APBN 2012	Prognosa PABPN 2012	Realisasi Lifting Tahun 2012							
			Tw I Des-Feb	Tw II Mar-Mei	s/d Tw II Des-Mei	Tw III Jun-Ags	s/d Tw III Des-Ags	Tw IV Sep-Nop	s/d Tw IV Des-Nop	% Real
Exxon	8.052.000	8.784.000	1.962.317 21.803	1.997.816 22.197	3.960.134 22.000	1.990.836 22.120	5.590.971 22.040	2.157.480 23.976	8.108.812 22.524	92,31
Petrochina	3.158.810	3.068.090	689.058 7.656	605.000 6.722	1.294.058 7.189	812.375 9.026	2.106.433 7.801	700.000 7.777	2.806.433 7.795	91,47
Pertamina	330.620	285.230	123.000 1.366	50.324 559	173.324 962	41.317 459	214.642 794	90.627 1.006	305.269 847	107,03
Unitisasi Sukowati	12.754.990	12.471.710	2.701.263 30.014	3.460.756 38.452	6.162.019 34.233	2.591.942 28.799	8.753.961 32.422	2.722.879 30.254	11.476.840 31.880	92,02
Total	24.296.420	24.609.030	5.475.639	6.113.897	11.589.536	5.436.470	17.026.007	5.671.347	22.697.354	92,23
Rata-rata/hari			60.840	67.932	64.386	60.405	63.059	63.014	63.014	

Sumber : Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten Bojonegoro

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil produksi memenuhi target perencanaan APBN yang ada adalah pertamina dengan realisasi yang melebihi target yaitu sebesar 107,03%. Untuk perusahaan lain masih belum memenuhi target karena realisasi produksi yang dihasilkan masih dibawah target perencanaan yang ada. Jika dilihat dari tingginya hasil produksi, unitisasi sukowati memiliki hasil produksi yang paling tinggi. Dari perhitungan selama setahun pada triwulan IV dapat dilihat bahwa hasil produksi mencapai 11,5 milyar rupiah. Tetapi dalam realisasinya unitisasi sukowati masih dibawah target yang telah direncanakan. Dari tabel tersebut juga nampak bahwa hasil produksi rata-rata perhari disetiap triwulannya tidak begitu mengalami penurunan maupun peningkatan yang signifikan.

Produksi minyak bumi tersebut diperkirakan baru mencapai *Full Production* sekitar 165.000 BOPD pada tahun 2016 mendatang setelah semua pengerjaan eksploitasi Lapangan Banyuurip selesai dikerjakan. Sedangkan produksi minyak bumi Lapangan Sukowati yang dikelola JOB Pertamina – Petrochine East Java telah mengalami stagnan bahkan cenderung menurun.

Sedangkan potensi cadangan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro mencapai lebih dari 6 TCF. Sampai dengan tahun 2012 pendaayagunaannya melalui eksploitasi masih sangat kecil, yaitu 10 MMBTU, sedangkan terhadap potensi cadangan yang lain masih pada tahap eksplorasi. Beberapa Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S), baik kontraktor lokal maupun kontraktor asing dalam pengelolaan gas bumi, yaitu :

- 1) Pertamina EP Cepu (PEP C) yang mengerjakan Lapangan Tiung Biru dan Blok Nona (eksplorasi)
- 2) Exxon Mobile yang mengerjakan Lapangan Jambaran (eksplorasi), Lapangan Kedung Keris (eksplorasi), Lapangan Alas Tua Barat dan Timur (eksplorasi).
- 3) Petrochine East Java yang mengerjakan Lapangan Sukowati (eksploitasi) melalui JOB dengan Pertamina

Adapun produksi gas bumi yang berasal dari lapangan gas wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagaimana daftar table berikut :

Tabel 4.2
Realisasi Produksi Gas Bumi Tahun 2012

K3S	Prognosa PABPN 2012	Realisasi Lifting Tahun 2012							
		Tw I Des-Feb	Tw II Mar-Mei	s/d Tw II Des-Mei	Tw III Jun-Ags	s/d Tw III Des-Ags	Tw IV Sep-Nop	s/d Tw IV Des-Nop	% Real
Unitisasi Sukowati	9.581.150	622.711	894.255	1.516.966	504.263	2.021.230	836.592	2.857.822	29,83
JOBPEJ	1.489.830	155.677	223.563	379.241	126.060	506.302	209.148	714.450	47,96
Total	11.070.980	778.388	1.117.819	1.896.208	630.323	2.526.532	1.045.740	3.572.272	32,27

Sumber : Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten Bojonegoro

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi gas bumi dari unitisasi sukowati dan JOBPEJ masih dibawah target. Hampir realisasi yang ada masih berada dibawah 50% dari target perencanaan yang telah direncanakan. Tetapi jika dilihat dari tabel tersebut realisasi gas bumi dari JOBPEJ lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi unitisasi sukowati yang hanya mencapai 29,83%. Untuk hasil produksi tiap triwulannya antara unitisasi sukowati dan JOBPEJ masih belum ada peningkatan yang signifikan.

Dengan potensi cadangan minyak yang mencapai 1.200 MMBOE dan potensi gas mencapai 6 TCF sebagaimana dijelaskan diatas, maka diperkirakan Kabupaten Bojonegoro turut memberikan kontribusi pada negara lebih dari 1.000 Triliyun Rupiah dengan asumsi ICP *lifting* minyak nasional 90US\$/barel dan *price* gas nasional 3 US \$/MMBTU. Sangat wajar jika Bojonegoro berharap minimal 1% dari investasi proyek Banyuurip dapat dilakukan oleh konten lokal sebagai wujud pemberdayaan masyarakat sesuai amanah Peraturan Daerah Nomor

23 Tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan data hasil produksi minyak dan gas bumi tersebut dapat dibuktikan bahwa potensi sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi yang ada di Bojonegoro sangatlah besar. Dengan hasil minyak yang melimpah dan pengelolaan yang benar hasil produksi minyak tersebut sangat berpengaruh besar terhadap daerah. Didukung dengan potensi gas yang juga sangat tinggi menjadi pelengkap bahwa sektor migas tersebut potensinya sangatlah besar. Besarnya potensi migas di Bojonegoro tersebut secara tidak langsung berpengaruh besar terhadap daerah melalui hasil produksinya. Pengaruh terbesar dari hasil produksi migas tersebut adalah terhadap pendapatan daerah. Ketika hasil produksi migas tersebut naik maupun turun juga akan berpengaruh terhadap naik turunnya pendapatan daerah. Jadi potensi migas yang sangat besar di Bojonegoro sangatlah besar peran dan pengaruhnya terhadap perkembangan daerah Bojonegoro.

2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro

a. Kedudukan Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro

- 1) Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah dibidang Pendapatan dan tugas lainnya yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- 2) Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan.
 - d. Pelaksanaan pengembangan pembangunan di bidang Pendapatan
 - e. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang Pendapatan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

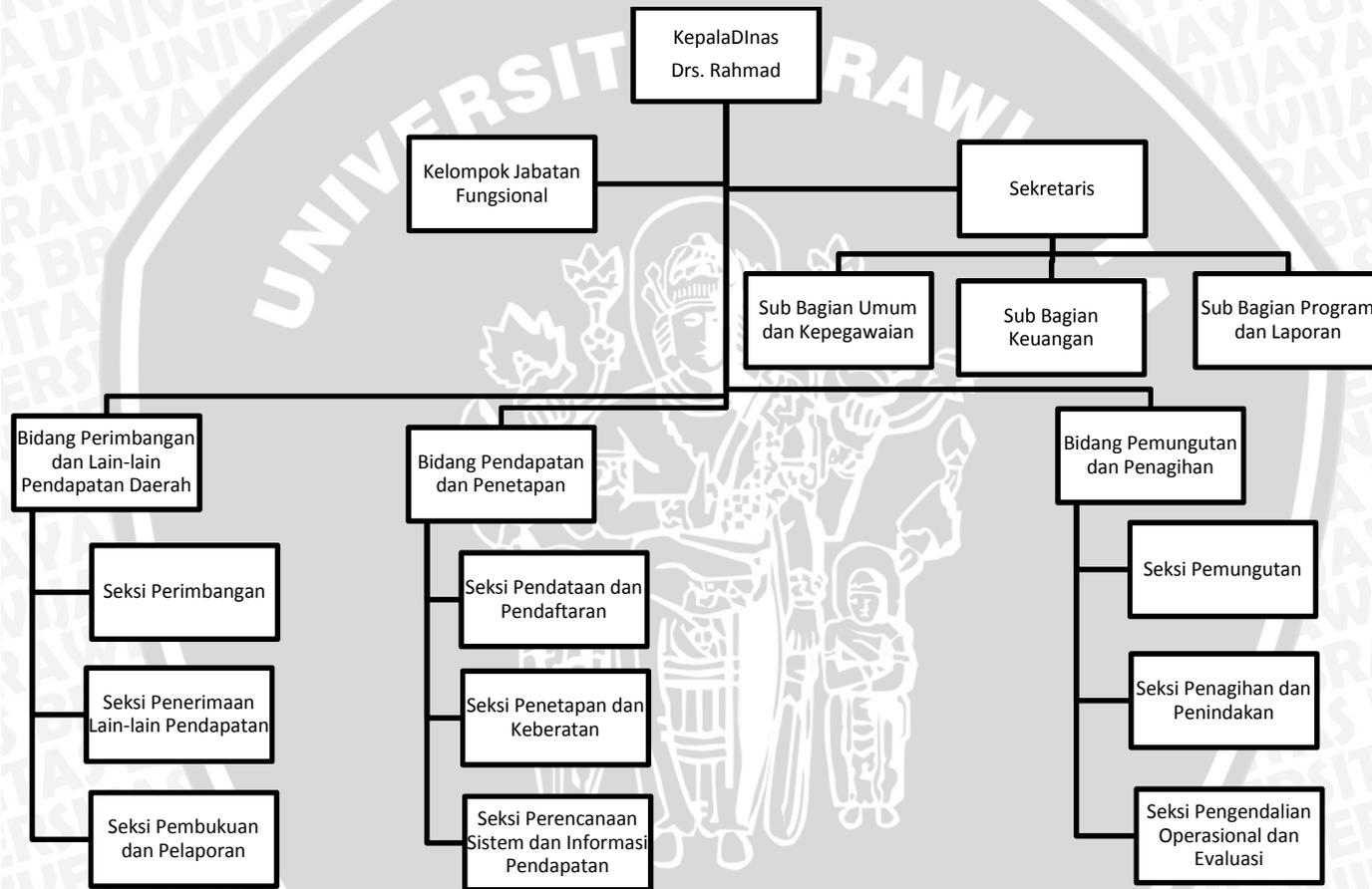
b. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro mengacu pada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program dan Laporan
3. Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah, membawahi :
- a. Seksi Perimbangan
 - b. Seksi Penerimaan Lain-lain Pendapatan
 - c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
4. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
- a. Seksi Pendapatan dan Pendaftaran
 - b. Seksi Penetapan dan Keberatan
 - c. Seksi Perencanaan Sistem Informasi Pendapatan
5. Bidang Pemungutan dan Penagihan, membawahi :
- a. Seksi Pemungutan
 - b. Seksi Penagihan dan Penindakan
 - c. Seksi Pengendalian Operasional dan Evaluasi
6. UPTD
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro



c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah

1 Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan memberikan pelayanan administrasi.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja
- b) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan kinerja
- c) Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional
- d) Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan.
- e) Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program dan laporan
- f) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Program dan Laporan

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi urusan umum dan urusan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga
- b) Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan
- c) pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pension pegawai
- d) penyusunan informasi dan perencanaan pegawai
- e) penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian
- f) penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai
- g) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2 Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun anggaran

- b) Penyiapan penyusunan rancangan, anggaran pendapatan dan belanja daerah
- c) Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja
- d) Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi
- e) Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai
- f) Pengurusan keuangan perjalanan dinas
- g) Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan
- h) Pelaksanaan fungsi-fnngsi yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

1.3 Sub Bagian Program dan Laporan

Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas pelayanan administrasi dalam penyiapan bahan penyusunan, penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, evaluasi Program dan Laporan. Untuk melaksanakan tugas ini,

Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai fungsi :

- a) Pengumpulan dan pengadaan sistematis data untuk bahan penyusunan program
- b) Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik
- c) Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program
- d) Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan
- e) Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- f) Penyelenggaraan kerja sama pengawasan

- g) Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan proyek
- h) Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan
- i) Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana
- j) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah

Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam rangka melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka menyiapkan bahan perumusan program dan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan serta pengendalian kegiatan dibidang perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi vertikal dengan pemerintah pusat terkait dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah

- b) Pelaksanaan koordinasi dan konfirmasi dengan pemerintah provinsi terkait bantuan keuangan provinsi, bagi hasil pajak provinsi dan penerimaan lain-lain provinsi
- c) Pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah
- d) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Perimbangan
- b. Seksi Penerimaan Lain-lain Pendapatan
- c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1 Seksi Perimbangan

Kepala Seksi Perimbangan mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah dalam perencanaan alokasi dana perimbangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Perimbangan mempunyai tugas :

- a) Pelaksanaan klarifikasi, perhitungan dan koordinasi teknis penetapan dana perimbangan dengan pemerintah pusat yang terkait Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
- b) Pemberian saran masukan terkait dengan ketentuan tentang dana perimbangan
- c) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

2.2 Seksi Penerimaan Lain-lain Pendapatan

Kepala Seksi Penerimaan Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah dalam perencanaan alokasi dana lain-lain pendapatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Penerimaan Lain-lain Pendapatan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi dan konfirmasi pendapatan lain-lain dari pemerintah pusat terkait dana darurat dan dan usaha penyesuaian otonomi khusus
- b) Pelaksanaan koordinasi dan konfirmasi dengan pemerintah Provinsi terkait dana bagi hasil pajak provinsi
- c) Pelaksanaan koordinasi dan konfirmasi terkait bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah lainnya dan sumbangan pihak ketiga

- d) Pelaksanaan koordinasi, analisa, pemantauan penerimaan lain-lain pendapatan
- e) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

2.3 Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah dalam menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan pendapatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan pembukuan serta pelaporan pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- b) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi semua jenis penerimaan daerah
- c) Pelaksanaan pengelolaan benda berharga
- d) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

3. Bidang Pendapatan dan Penetapan

Bidang Pendapatan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Kepala Bidang Pendapatan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam perumusan kebijakan,

menyiapkan bahan perumusan program pendapatan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pendapatan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a) Pendataan, pendaftaran, perhitungan, penetapan, pemeriksaan serta pemrosesan keberatan, banding pajak daerah dan retribusi daerah
- b) Pelaksanaan analisa pendapatan dan penyediaan sistem informasi pendapatan
- c) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Pendapatan dan Penetapan terdiri dari :

- a) Seksi Pendapatan dan Pendaftaran
- b) Seksi Penetapan dan Keberatan
- c) Seksi Perencanaan Sistem Informasi Pendapatan

Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pendapatan dan Penetapan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1 Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pendataan dan Penetapan dalam menyelenggarakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pendataan dan pendaftaran mempunyai fungsi :

- a) Pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pendaftaran wajib pajak/retribusi
- b) Penyusunan daftar induk wajib pajak daerah retribusi daerah
- c) Penghimpunan, pengelolaan data obyek dan subyek pajak/retribusi daerah serta mengendalikan kartu wajib pajak daerah
- d) Penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak – Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP – PBB) kepada wajib pajak dan penerimaan kembali dari wajib pajak
- e) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

3.2 Seksi Penetapan dan Keberatan

Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pendataan dan Penetapan dalam menyelenggarakan penetapan, keberatan, perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah
- b) Pelaksanaan peninjauan kembali ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah
- c) Pelaksanaan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah

- d) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Perjanjian Angsuran dan Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah lainnya
- e) Pemrosesan administrasi perubahan obyek/subyek pajak daerah dan retribusi daerah
- f) Penindaklanjutan keberatan yang diajukan wajib pajak/retribusi serta menghitung dan menetapkan kembali
- g) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

3.3 Seksi Perencanaan Sistem Informasi Pendapatan

Kepala Seksi Perencanaan Sistem Informasi Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pendataan dan Penetapan dalam merencanakan dan mengendalikan sistem informasi pendapatana daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Perencanaan Sistem Informasi Pendapatan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan analisa terhadap obyek/subyek pajak/retribusi daerah dan potensi pengembangan sistem pendapatan daerah
- b) Penyiapan bahan pengembangan rancang bangunan dan pemanfaatan sistem informasi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah
- c) Penyiapan bahan penataan data base, program aplikasi, jaringan, perangkat komputer dan pendukungnya
- d) Penyiapan bahan pengendalian sistem informasi

- e) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

4. Bidang Penagihan

Kepala Bidang Pemungutan dan Penagihan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Kepala Bidang Pemungutan dan Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pendapatan Asli Daerah. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemungutan dan Penagihan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah
- b) Pelaksanaan pengendalian teknis operasional, evaluasi pemungutan dan penagihan pajak daerah atau retribusi daerah
- c) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Pemungutan dan Penagihan terdiri dari :

- a) Seksi Pemungutan
- b) Seksi Penagihan dan Penindakan
- c) Seksi Pengendalian Operasional dan Evaluasi

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemungutan dan Penagihan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1 Seksi Pemungutan

Kepala Seksi Pemungutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pemungutan dan Penagihan dalam pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemungutan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah berdasarkan ketetapan yang telah dikeluarkan
- b) Pelaksanaan pengawasan, penerimaan dan penyetoran pajak daerah atau retribusi daerah
- c) Pelaporan realisasi hasil pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah secara berkala
- d) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

4.2 Seksi Penagihan dan Penindakan

Kepala Seksi Penagihan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pemungutan dan Penagihan dalam penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang melewati jatuh tempo serta prosedur tindakannya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Penagihan dan Penindakan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan dan perumusan pedoman kebijakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah
- b) Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi yang lewat jatuh tempo
- c) Pelaksanaan penagihan kepada wajib pajak dan wajib retribusi
- d) Pelaksanaan penindakan kepada wajib pajak dan wajib retribusi yang melewati jatuh tempo dan mengendalikan kartu piutang
- e) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

4.3 Seksi Pengendalian Operasional dan Evaluasi

Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pemungutan dan Penagihan dalam pengendalian pemungutan dan penagihan, serta penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a) Perumusan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati serta petunjuk teknis lainnya tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- b) Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan serta tata hubungan kerja dengan SKPD teknis yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- c) Pelaksanaan pengendalian pemungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah

- d) Penyusunan perencanaan intensifikasi pemungutan atau penagihan
- e) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Sumber Daya Aparatur Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang professional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Mewujudkan profesionalisme dikalangan PNS memerlukan proses yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan PNS yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier PNS, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.

1. Jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan jabatan

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam susunan suatu organisasi.

Tabel 4.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Eselon	Formasi	Terisi	Kurang	Laki-laki	Perempuan
1.	II	1	1	0	1	0
2.	III	4	4	0	4	0
3.	IV	12	12	0	8	4
	Jumlah	17	17	0	13	4

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

2. Jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan pangkat dan golongan

Pegawai negeri sipil Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pangkat dan golongan berjumlah 37 orang dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 4.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1.	Gol IV	5	5	-
2.	Gol III	22	13	9
3.	Gol II	8	8	-
4.	Gol I	2	2	-
	Jumlah	37	28	9

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Dari jumlah PNS yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah 37 orang, 17 orang diantaranya menduduki jabatan eselon, maka jumlah staff non eselon 20 orang, ini dirasakan masih kekurangan dalam melaksanakan tugas khususnya adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah yaitu PBB menjadi pajak daerah yang diberlakukan mulai tahun 2013.

3. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Tabel 4.5

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	SD	SLTP	SLTA	D.II	D.III	S.1	S.2
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	1
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	2	2
3.	Eselon IV	-	-	2	-	1	4	5
4.	Staf	1	2	12	-	-	4	1
5.	Pegawai Tidak Tetap	1	-	1	-	-	-	-
6.	Tenaga Harian Lepas	-	-	5	-	-	-	-
	Jumlah	2	2	20	-	1	10	9

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

B. Hasil dan Pembahasan

1. Kontribusi Sektor Migas Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Sektor energi dan sumber daya mineral memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, terutama dalam mendukung perekonomian daerah baik melalui sisi fiskal maupun sektor riil, bahkan dalam kebijakan makro perencanaan jangka menengah mencanangkan Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi negeri. Pada tahun 2012 saja tercatat kontribusi sektor pertambangan migas saja menyumbang hampir 12,4 Triliyun Rupiah atau 43,38% dari total PDRB sebesar 28,6 Triliyun Rupiah (ADHB) dan kontribusi 2,5 Triliyun Rupiah atau 28,93% dari total PDRB sebesar 8,8 Triliyun Rupiah (ADHK). Kondisi ini menunjukkan sektor energi dan sumber daya mineral mempunyai peran strategis dalam memperkuat struktur perekonomian daerah meski strategi kebijakan Kabupaten Bojonegoro tetap meletakkan sektor agrobisnis sebagai sektor andalan untuk jangka menengah dan panjang.

Migas sebagai salah satu elemen energi dan sumber daya mineral juga telah menapakkan perannya sedemikian strategis di Kabupaten Bojonegoro. Dari struktur fiskal kapabilitas APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2012, tercatat dari total target rencana pemerintah daerah sebesar Rp.1.537.694.091.064,00 kontribusi target penerimaan dari sektor migas mencapai Rp. 294.782.704.618,82 atau 19,17% sedangkan realisasi penerimaannya mencapai Rp. 460.497.275.662,00.

Untuk menjaga dan mengelola sektor migas yang ada di Bojonegoro tersebut pemerintah daerah juga telah membuat Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Serta Pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro. Mulai dari bentuk kerjasama, aturan hingga sanksi diatur didalamnya. Dalam perda tersebut pada pasal 19 juga dijelaskan mengenai kewajiban sektor migas atau perusahaan-perusahaan migas yang ada di Bojonegoro dalam menjalankan eksplorasi dan eksploitasi migas sebagai berikut :

1. Mendirikan kantor perwakilan di wilayah Kabupaten Bojonegoro
2. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka pembangunan fasilitas penunjang sarana produksi
3. Mengantisipasi sejak dini kemungkinan munculnya bencana/dampak negatif kegiatan, serta memberikan sosialisasi secara transparan pada pemerintah kabupaten dan masyarakat terhadap dampak negatif dari setiap tahapan eksplorasi dan eksploitasi migas
4. Melakukan reklamasi lahan serta perbaikan fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat dampak eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan migas berikut mobilitas peralatan berat yang digunakannya
5. Memberikan informasi secara transparan terkait jenis kegiatan pembangunan yang dilakukan berikut peluang yang dapat dimanfaatkan oleh penyedia barang dan jasa loka, BUMD, BUMDes dan koperasi
6. Memasukkan unsur kegiatan pelatihan keterampilan kerja tepat sasaran sebagai salah satu fokus utama program kemasyarakatan atau CSR
7. Menawarkan setiap paket pekerjaan yang dilaksanakan kepada kontraktor lokal jika pekerjaan itu bisa dilaksanakan oleh pengusaha lokal, BUMD, BUMDes dan koperasi
8. Membantu pengusaha lokal, BUMD, BUMDes dalam meningkatkan kapabilitas tehnik dan kelengkapan persyaratan dasar atau kualifikasi untuk ikut berperan dalam proses pengadaan barang dan jasa

9. Menghormati dan mentaati adat istiadat serta kebiasaan dan kepatutan yang berlaku secara umum di masyarakat sekitar lokasi proyek.

Jadi keberadaan sektor migas di Bojonegoro memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan dan ditaati sesuai peraturan daerah yang telah dibuat. Peran aktif dari pemerintah untuk mengimplimentasikan peraturan daerah tersebut sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan peran sektor migas dalam pembangunan daerah Bojonegoro.

Peran sektor migas dalam meningkatkan pembangunan daerah sangatlah besar baik dibidang pendapatan daerah maupun bidang pembangunan fisik daerah. Proses pembangunan daerah tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah dan swasta atau perusahaan terkait dalam pelaksanaannya. Maka dari itu peran sektor migas dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui dua jalan yaitu peran migas melalui pemerintah daerah dan peran migas melalui swasta atau perusahaan terkait yang bergerak dibidang migas. Dimaksud peran migas melalui pemerintah daerah adalah peran migas terhadap pembangunan yang berasal dari perencanaan dan pengawasan pemerintah daerah. Sedangkan peran migas melalui swasta adalah peran migas yang langsung dilakukan oleh perusahaan tersebut dari hasil keuntungan sebagai salah satu tanggung jawab perusahaan terhadap daerah. Adapun peran migas melalui pemerintah daerah adalah pengelolaan pendapatan daerah yang mengalami peningkatan dari sektor migas, perencanaan pembangunan dan pembekalan masyarakat sekitar. Semua kegiatan tersebut tidak terlepas dari peran migas terhadap pembangunan daerah. Sedangkan peran migas melalui perusahaan adalah salah satunya melalui program

CSR yang terdiri dari berbagai kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, social dan perekonomian masyarakat sekitar.

a. Kontribusi Sektor Migas Terhadap Penerimaan DBH

Potensi sektor migas yang ada di Bojonegoro yang besar, berpengaruh besar terhadap daerah Bojonegoro. Pengaruh besar yang terlihat jelas adalah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro. Pengaruh sektor migas tersebut memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap pendapatan Bojonegoro. Pengaruh tersebut dapat dirasakan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang di terima pemerintah daerah. Sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat bahwa penentuan DBH sektor migas yang diterima oleh Bojonegoro ditentukan oleh pemerintah pusat. Penentuan tersebut disesuaikan dengan hasil produksi sektor migas di setiap tahunnya. Pembagian DBH tersebut juga telah di atur dengan berbagai ketentuan mulai dari penerima yang berhak atas DBH tersebut hingga jumlah nominal yang akan diterima.

Hasil produksi migas di setiap tahunnya memang mengalami peningkatan secara signifikan. Hal tersebut didukung dari besarnya potensi migas yang tersedia di Bojonegoro. Bertambahnya pihak pengelola yang turut serta dalam membuka kawasan baru untuk melakukan pengelolaan juga menjadi salah satu pendukung meningkatnya hasil produksi tersebut. Dari laporan hasil produksi yang di dapat oleh pemerintah daerah melalui Bagian SDA Kabupaten Bojonegoro menunjukkann bahwa hasil produksi dari tiap industri atau perusahaan terus mengalami peningkatan. Peningkatan hasil produksi tersebut merata pada semua

industri yang ada di Bojonegoro. meningkatnya hasil produksi tersebut berpengaruh besar terhadap penentuan alokasi DBH yang akan di peroleh daerah.semakin tingginya hasil produksi, maka akan semakin tinggi pula alokasi DBH yang akan di dapat daerah nantinya. Berikut data penerimaan DBH sektor migas yang diperoleh Bojonegoro disetiap tahunnya :

Tabel 4.6
Data Pendapatan DBH Bukan Pajak Tahun 2009

Jenis Pungutan	No. Rekening	Target APBD Perubahan 2009	Realisasi	%
Dana Hasil Bukan Pajak/SDA	4 2 1 02	67.848.181.678,00	39.623.032.759,00	58,40
PSDH	120 120 05 00 00 4 2 1 02 02	4.936.430.667,00	1.361.504.468,00	27,58
Perikanan	120 120 05 00 00 4 2 1 02 07	248.447.205,00	140.570.995,00	56,58
Minyak Bumi	120 120 05 00 00 4 2 1 02 08	61.876.033.000,00	37.925.000.420,00	61,29
Gas Alam/Bumi	120 120 05 00 00 4 2 1 02 09	781.163.000,00	192.040.490,00	24,58
Pertambangan Umum	120 120 05 00 00 4 2 1 02 11	6.107.806,00	3.916.422,00	64,12

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Tabel 4.7

Data Pendapatan DBH Bukan Pajak Tahun 2010

Jenis Pungutan	No. Rekening	Target APBD Perubahan 2010	Realisasi	%
Dana Hasil Bukan Pajak/SDA	4 2 1 02	135.604.770.698,01	169.441.103.806,00	124,95
PSDH	120 120 05 00 00 4 2 1 02 02	1.200.000.000,00	223.806.610,00	18,65
Perikanan	120 120 05 00 00 4 2 1 02 07	163.213.161,00	133.334.511,00	81,69
Minyak Bumi	120 120 05 00 00 4 2 1 02 08	131.405.142.796,01	164.021.709.307,00	124,82
Gas Alam/Bumi	120 120 05 00 00 4 2 1 02 09	379.759.000,00	0,00	0,00
Pertambangan Umum	120 120 05 00 00 4 2 1 02 11	6.896.573,00	5.939.338,00	86,12
DBH Migas Untuk Pendidikan	120 120 05 00 00 4 2 1 02 12	2.449.759.168,00	5.056.319.040,00	206,40

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Tabel 4.8

Data Pendapatan DBH Bukan Pajak Tahun 2011

Jenis Pungutan	No. Rekening	Target APBD Perubahan 2011	Realisasi	%
Dana Hasil Bukan Pajak/SDA	4 2 1 02	175.273.109.734,00	222.766.366.511,00	
PSDH	120 120 05 00 00 4 2 1 02 02	1.250.000.000,00	1.318.025.378,00	
Perikanan	120 120 05 00 00 4 2 1 02 07	163.213.161,00	261.048.242,00	
Minyak Bumi	120 120 05 00 00 4 2 1 02 08	167.900.000.000,00	213.506.987.605,00	
Gas Alam/Bumi	120 120 05 00 00 4 2 1 02 09	720.000.000,00	657.894.937,00	
Pertambangan Umum	120 120 05 00 00 4 2 1 02 11	6.896.573,00	28.951.208,00	
DBH Migas Untuk Pendidikan	120 120 05 00 00 4 2 1 02 12	5.233.000.000,00	6.993.459.141,00	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 4.9
Data Pendapatan DBH Bukan Pajak Tahun 2012

Jenis Pungutan	No. Rekening	Target APBD Perubahan 2012	Realisasi	%
Dana Hasil Bukan Pajak/SDA	4 2 1 02	296.202.814.352,82	462.104.911.445,00	154,01
PSDH	120 120 05 00 00 4 2 1 02 02	1.250.000.000,00	1.256.434.238,00	100,51
Perikanan	120 120 05 00 00 4 2 1 02 07	163.213.161,00	343.988.219,00	210,75
Minyak Bumi	120 120 05 00 00 4 2 1 02 08	283.596.896.064,82	442.873.078.488,00	156,16
Gas Alam/Bumi	120 120 05 00 00 4 2 1 02 09	3.061.479.000,00	2.815.779.501,00	91,97
Pertambangan Umum	120 120 05 00 00 4 2 1 02 11	6.896.573,00	7.215.326,00	104,62
DBH Migas Untuk Pendidikan	120 120 05 00 00 4 2 1 02 12	8.122.329.554,00	14.806.417.673,00	182,32

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Dana Bagi hasil Bukan Pajak/SDA yang terdiri dari PSDH, Perikanan, Minyak Bumi, Gas Alam, Pertambangan Umum serta Dana Bagi Hasil untuk Pendidikan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hasil realisasi PSDH sendiri tidak stabil karena mengalami peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya, terlihat pada tahun 2010 realisasi pemasukan PSDH mengalami penurunan dan kemudian meningkat lagi di tahun berikutnya. Untuk hasil perikanan sendiri hasil realisasi pemasukan cenderung kecil dan tidak stabil. Dari tahun 2009 tingkat realisasi pemasukan bidang perikanan tidak lebih dari empat ratus juta. Untuk hasil realisasi pemasukan gas bumi sendiri hampir sama dengan bidang perikanan, tetapi yang membedakan pada tahun 2012 realisasi pemasukan dibidang gas bumi mengalami peningkatan yang sangat drastis. Dan realisasinya sendiri hampir mendekati target yang telah ditentukan

sebelumnya dengan prosentase 91,97%. Dari sekian sektor dana bagi hasil bukan pajak, sektor minyak bumi yang menjadi pemasok terbesar dan mengalami peningkatan yang pesat tiap tahunnya. Hal tersebut juga didukung oleh hasil produksi minyak bumi yang ada di Bojonegoro yang selalu meningkat tiap tahunnya. Prosentase realisasi pendapatan di sektor minyak bumi sendiri juga mengalami peningkatan dan melampau target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk realisasi DBH migas untuk pendidikan di setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Karena pada dasarnya produksi migas berupa minyak bumi juga mengalami peningkatan. Jadi secara tidak langsung berpengaruh terhadap realisasi DBH migas untuk pendidikan.

Dari data laporan tahunan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang pertumbuhan target dan realisasi pendapatan asli daerah, pemasok terbesar pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro berasal dari dana bagi hasil. Lebih lanjut Bapak Drs. Muhadi selaku Kepala Bidang Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro lebih lanjut menjelaskan tentang dana bagi hasil sektor migas daerah yang ada di Bojonegoro sebagai berikut :

“Pendapatan terbesar untuk APBD Bojonegoro memang berasal dari bidang perimbangan, lebih tepatnya dari sektor migas. Kalau tidak salah dampak besar sektor migas terhadap pendapatan Bojonegoro dimulai pada tahun 2006 melalui dana bagi hasil atau yang biasa disebut DBH dengan 0,5 anggaran tersebut dialokasikan untuk pendidikan. Hasil produksi migas setiap tahunnya juga mengalami peningkatan sehingga DBH yang didapat oleh Bojonegoro pun juga mengalami peningkatan sesuai hasil produksi migas tersebut.” (wawancara pada tanggal 19 Februari 2014 pukul 09.30)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum ini memiliki realisasi peningkatan setiap tahunnya. Dana bagi hasil bukan pajak atau dana bagi hasil dari sektor sumber daya alam merupakan salah satu dana yang realisasi pemasukannya mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Dari target yang telah di buat oleh daerah hampir setiap tahunnya dana bagi hasil bukan pajak ini selalui melampaui target. Meningkatnya hasil produksi migas tiap tahunnya juga berpengaruh terhadap meningkatnya DBH yang diperoleh pemerintah daerah dari pusat. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap DBH yang khusus dialokasikan untuk pendidikan sebesar 0,5%. Terbukti empat tahun terakhir produksi migas yang ada di Bojonegoro terus mengalami peningkatan secara signifikan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap DBH yang diperoleh Bojonegoro.

b. Kontribusi Sektor Migas Terhadap Penerimaan Dana Perimbangan Daerah

Pengaruh sektor migas terhadap daerah sangatlah besar terutama dibidang pendapatan daerah. Berawal dari hasil produksi sektor migas yang terus mengalami peningkatan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan DBH migas yang diperoleh daerah. Dari data penerimaan DBH yang didapat Bojonegoro di setiap tahunnya membuktikan bahwa sektor migas berkontribusi besar terhadap penerimaan DBH yang diperoleh oleh daerah. Perolehan DBH yang diterima oleh daerah sangat besar dan hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap kondisi APBD Kabupaten Bojonegoro.

DBH migas merupakan salah satu penerimaan daerah yang termasuk dalam penerimaan daerah dalam bidang perimbangan atau salah satu penerimaan dari dana perimbangan daerah. Dana perimbangan sendiri merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari DBH hasil pajak, DBH bukan pajak/SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jadi pada dasarnya DBH adalah salah satu pemasuk penerimaan dana perimbangan yang nantinya juga menjadi salah satu bagian dari penerimaan terhadap APBD Bojonegoro.

Berikut perkembangan penerimaan dana perimbangan daerah Bojonegoro :

Tabel 4.10
Perkembangan Dana Perimbangan 2009

Uraian	Target	Realisasi		Pertumbuhan	
	Target APBD	Realisasi	%	Target	Realisasi
DANA PERIIMBANGAN	829,927,408,852.00	789,419,617,973.00	95.12%	6.91%	1.25%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	190,574,348,852.00	150,076,354,973.00	78.75%	6.23%	-17.92%
Bagi Hasil Pajak	122,726,167,174.00	110,453,322,178.00	90.00%	16.51%	20.33%
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	67,848,181,678.00	39,623,032,795.00	58.40%	-8.39%	-56.48%
Dana Alokasi Umum	596,440,060,000.00	596,430,263,000.00	100.00%	1.64%	1.64%
Dana Alokasi Umum	596,440,060,000.00	596,430,263,000.00	100.00%	1.64%	1.64%
Dana Alokasi Khusus	42,913,000,000.00	42,913,000,000.00	100.00%	327.34%	327.34%
Dana Alokasi Khusus	42,913,000,000.00	42,913,000,000.00	100.00%	327.34%	327.34%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Tabel 4.11
Perkembangan Dana Perimbangan 2010

Uraian	Target	Realisasi		Pertumbuhan	
	Target APBD	Realisasi	%	Target	Realisasi
DANA PERIIMBANGAN	899,845,352,872.01	938,267,774,726.00	104.27%	8.42%	18.86%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	258,708,620,872.01	297,131,042,726.00	114.85%	35.75%	97.99%
Bagi Hasil Pajak	123,103,850,174.00	127,689,938,920.00	103.73%	0.31%	15.61%
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	135,604,770,698.01	169,441,103,806.00	124.95%	99.87%	327.63%
Dana Alokasi Umum	583,763,532,000.00	583,763,532,000.00	100.00%	-2.13%	-2.12%
Dana Alokasi Umum	583,763,532,000.00	583,763,532,000.00	100.00%	-2.13%	-2.12%
Dana Alokasi Khusus	57,373,200,000.00	57,373,200,000.00	100.00%	33.70%	33.70%
Dana Alokasi Khusus	57,373,200,000.00	57,373,200,000.00	100.00%	33.70%	33.70%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Tabel 4.12
Perkembangan Dana Perimbangan 2011

Uraian	Target	Realisasi		Pertumbuhan	
	Target APBD	Realisasi	%	Target	Realisasi
DANA PERIIMBANGAN	1,025,176,410,838.00	1,084,868,983,770.00	105.82%	13.93%	15.62%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	292,041,220,838.00	351,733,793,770.00	120.44%	12.88%	18.38%
Bagi Hasil Pajak	116,768,111,104.00	128,967,427,259.00	110.45%	-5.15%	1.00%
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	175,273,109,734.00	222,766,366,511.00	127.10%	29.25%	31.47%
Dana Alokasi Umum	665,218,290,000.00	665,218,290,000.00	100.00%	13.95%	13.95%
Dana Alokasi Umum	665,218,290,000.00	665,218,290,000.00	100.00%	13.95%	13.95%
Dana Alokasi Khusus	67,916,900,000.00	67,916,900,000.00	100.00%	18.38%	18.38%
Dana Alokasi Khusus	67,916,900,000.00	67,916,900,000.00	100.00%	18.38%	18.38%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Tabel 4.13
Perkembangan Dana Perimbangan 2012

Uraian	Target	Realisasi		Pertumbuhan	
	Target APBD	Realisasi	%	Target	Realisasi
DANA PERIIMBANGAN	1,274,375,264,178.82	1,438,583,301,357.00	112.89%	24.31%	32.60%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	420,443,268,178.82	584,651,305,357.00	139.06%	43.97%	66.22%
Bagi Hasil Pajak	124,240,453,826.00	122,546,393,912.00	98.64%	6.40%	-4.98%
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	296,202,814,352.82	462,104,911,445.00	156.01%	69.00%	107.44%
Dana Alokasi Umum	785,584,826,000.00	785,584,826,000.00	100.00%	18.09%	18.09%
Dana Alokasi Umum	785,584,826,000.00	785,584,826,000.00	100.00%	18.09%	18.09%
Dana Alokasi Khusus	68,347,170,000.00	68,347,170,000.00	100.00%	0.63%	0.63%
Dana Alokasi Khusus	68,347,170,000.00	68,347,170,000.00	100.00%	0.63%	0.63%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Dari data perkembangan dana perimbangan tersebut dapat dilihat bahwa kondisi dana perimbangan Bojonegoro terus mengalami peningkatan yang signifikan disetiap tahunnya dihitung dari tahun 2009. Realisasi penerimaan dana perimbangan secara keseluruhan disetiap tahunnya telah melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya. Bahkan realisasi dana perimbangan tersebut jauh melampaui target yang telah ditentukan dengan prosentase lebih dari 100%. Meningkatnya dana perimbangan tersebut tidak terlepas dari sumber-sumber dana yang ada mulai dari DBH baik pajak maupun bukan pajak/SDA hingga sumber dari DAU maupun DAK. Peningkatan penerimaan yang terlihat jelas adalah pada sumber DBH pajak maupun bukan pajak/SDA yang terus mengalami peningkatan dan terus melampaui target penerimaan realisasinya. Meningkatnya penerimaan DBH tersebut baik pajak maupun bukan pajak/SDA tidak terlepas dari pengaruh

sektor migas yang ada di Bojonegoro. Sesuai dengan peningkatan DBH Bojonegoro yang terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya berpengaruh langsung terhadap kondisi dan peningkatan dana perimbangan daerah Bojonegoro. Hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan sektor migas tersebut berpengaruh besar terhadap penerimaan daerah. Karena pada dasarnya, dana perimbangan ini akan berpengaruh dan menentukan kondisi APBD Kabupaten Bojonegoro.

Dari data laporan tahunan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang pertumbuhan target dan realisasi pendapatan asli daerah, pemasok terbesar pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro berasal dari dana bagi hasil yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kondisi dana perimbangan daerah. Lebih lanjut Bapak Drs. Muhadi selaku Kepala Bidang Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro lebih lanjut menjelaskan tentang kondisi dana perimbangan daerah yang ada di Bojonegoro sebagai berikut

“Pendapatan daerah akhir-akhir ini memang mengalami peningkatan, khususnya dibidang perimbangan pada dana perimbangan sendiri. Empat tahun terakhir kondisi dana perimbangan Bojonegoro memang mengalami peningkatan yang signifikan. Ada beberapa sektor dalam mendukung peningkatan dana perimbangan muali dari DBH baik pajak maupun SDA, DAU dan DAK. Tapi dari beberapa sumber penerimaan tersebut yang terlihat mengalami peningkatan secara signifikan memang pada DBH SDA. Terutama DBH sektor migas yang memiliki andil besar terhadap peningkatan dana perimbangan Bojonegoro. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap sumber lain yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan dana perimbangan Bojonegoro.” (wawancara pada tanggal 19 Februari 2014 pukul 09.45)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan daerah Bojonegoro terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Peningkatan tersebut terbukti dengan hasil laporan pertumbuhan dana perimbangan yang

disetiap tahunnya terus mengalami peningkatan secara signifikan. Peningkatan dana perimbangan sendiri tidak terlepas dari beberapa sumber penerimaan yang menjadi pemasok penerimaan dana perimbangan daerah. Beberapa sumber penerimaan dana perimbangan, DBH merupakan salah satu sumber yang berpengaruh terhadap peningkatan dana perimbangan daerah. Peningkatan DBH tersebut juga berpengaruh terhadap sumber lain yang juga mengalami peningkatan. Jika diulas peningkatan DBH adalah hasil atau dampak dari keberadaan sektor migas yang ada di Bojonegoro. Jadi kondisi dana perimbangan Bojonegoro terus mengalami peningkatan karena sumber penerimaan dana perimbangan yang terus mengalami peningkatan terutama dari DBH.

c. Kontribusi Sektor Migas Dalam Meningkatkan APBD Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah agraris yang perekonomiannya didominasi oleh pertanian. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Komoditas utama yang dihasilkan antara lain padi, jagung kedelai dan ubi kayu. Tembakau di Bojonegoro juga merupakan komoditas andalan yang cukup terkenal kualitasnya. Juga hasil hutan, kayu jati Bojonegoro cukup terkenal sebagai jati nomor satu. Saat ini Kabupaten Bojonegoro juga disebut sebagai daerah migas dengan cadangan minyak sekitar 600 juta – 1,4 milyar barel dan cadangan gas sekitar 1,7 – 2 triliun kaki kubik terbesar di Indonesia. Tentunya dengan adanya sumber daya alam migas yang ada di Bojonegoro harus memberikan dampak positif dengan memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berusaha secara maksimal agar industri migas tidak hanya mengambil (eksplorasi) tetapi juga memberi dan

berkontribusi kepada masyarakat sehingga nantinya rakyat tidak hanya jadi penonton saja tetapi juga turut menikmati sekaligus berdaya dan mandiri.

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana diketahui, anggaran daerah atau yang lebih lazim disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah, oleh karenanya anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya meningkatkan kapabilitas, efektivitas dan pembangunan pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan APBD Kabupaten Bojonegoro ada beberapa sumber pendapatan yang merupakan faktor pemasok pendapatan daerah, yaitu :

- 1) Jenis pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah :
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g) Pajak Air Bawah Tanah
 - h) Pajak Sarang Burung

- i) Pajak Parkir
 - j) Pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - k) Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan
- 2) Jenis Retribusi yang pemungutannya dikelola oleh SKPD Penghasil :
- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP/KK
 - d) Retribusi Parkir
 - e) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - f) Retribusi biaya Cetak Peta
- 3) Retribusi Jasa Usaha
- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b) Retribusi Terminal
 - c) Retribusi Penginapan/Villa
 - d) Retribusi Rumah Pemotongan Hewan
 - e) Retribusi Tempat Rekreasi/Olah Raga
- 4) Retribusi Perizinan Tertentu
- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b) Retribusi Izin Gangguan
 - c) Retribusi Trayek
- 5) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah (BUMD)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri dari :

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Giro, Penerimaan Bunga, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan dari BLUD dan Pendapatan Asli Daerah Lain-lain.

Sumber-sumber Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

- a) Dana Bagi Hasil Pajak
- b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA
- c) Dana Alokasi Umum (DAU)
- d) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sumber-sumber Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

- a) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
- b) Dana Penyesuaian Otonomi Khusus
- c) Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Untuk melihat perkembangan penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Bojonegoro tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14

Perkembangan Penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2008-2012

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
2008	776.256.184.830,58	779.701.133.986,00	100,4%
2009	829.927.408.852,00	789.419.617.973,00	95,12%
2010	899.845.352.872,01	938.267.774.726,00	104,27%
2011	1.025.176.410.838,00	1.084.868.983.770,00	105,82%
2012	1.274.375.264.178,82	1.438.583.301.357,00	112,89%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Tabel 4.15

Perkembangan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2008-2012

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
2008	50.330.470.748,00	53.469.478.928,00	106,24%
2009	55.353.228.703,58	68.439.432.007,00	123,64%
2010	186.767.114.687,70	200.417.331.224,00	107,31%
2011	244.536.575.246,00	258.606.931.711,00	105,75%
2012	261.463.332.694,00	263.556.649.609,00	100,80%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Tabel 4.16
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008-2012

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
2008	55.761.002.870,35	58.690.962.773,99	105,25%
2009	61.728.560.270,27	70.233.938.303,98	113,78%
2010	81.250.000.000,00	79.832.681.985,32	98,26%
2011	105.568.186.939,53	164.638.733.460,32	155,95%
2012	150.374.556.077,89	159.247.616.976,74	105,90%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan dana perimbangan terus mengalami peningkatan secara signifikan. Realisasi setiap tahunnya hampir memenuhi target hanya pada tahun 2009 yang masih dibawah target yaitu 95,12%. Tetapi tidak terpenuhinya target pada tahun 2009 tidak berdampak negatif karena kondisi penerimaan masih lebih tinggi dari tahun sebelumnya atau masih bisa dikatakan mengalami peningkatan pada tahun tersebut. Dari realisasi penerimaan lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami peningkatan signifikan disetiap tahunnya. Bahkan prosentase realisasi disetiap tahunnya jauh melebihi target yang telah direncanakan. Meningkatnya penerimaan dana perimbangan dan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap perkembangan pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa pendapatan asli daerah tiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Prosentase realisasi juga masih stabil namun tidak kesesuaian target realisasi terjadi pada tahun 2010

dengan prosentasi sebesar 98,26% masih dibawah target perencanaan. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan daerah ada kaitannya dengan peningkatan pada dana perimbangan. Jadi peningkatan yang terjadi pada dana perimbangan secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro. Berikut data pertumbuhan APBD Kabupaten Bojonegoro :

Tabel 4.17
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Bojonegoro

Tahun	Uraian	Target	Realisasi		Pertumbuhan	
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
2009	Pendapatan	947.009.197.825,45	928.092.988.283,98	98%	7,33%	4,06%
2010	Pendapatan	1.167.862.467.559,71	1.218.517.787.935,32	104,34%	23,32%	31,29%
2011	Pendapatan	1.375.281.173.023,53	1.508.114.648.941,32	109,66%	17,76%	23,77%
2012	Pendapatan	1.686.213.152.950,71	1.861.387.567.942,74	110,39%	22,61%	23,42%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupate Bojonegoro

Dari data pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro diatas, terlihat bahwa pendapatan daerah di setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan tersebut didukung oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang memang ada peningkatan di beberapa sektor yang dimiliki Bojonegoro. Peningkatan penerimaan dari beberapa sektor tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan dan peningkatan APBD Kabupaten Bojonegoro.

2. Kontribusi Migas di Sektor Lain Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Daerah

a. Penggerak Pembangunan Daerah

Seiring dengan kondisi membaiknya perekonomian nasional, perubahan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro juga mengalami peningkatan yang semakin positif. Hal mendasar yang mempengaruhi progres laju pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Bojonegoro diantaranya adalah peningkatan signifikan pada beberapa sektor produksi serta dorongan dari terkendalinya tingkat inflasi. Sektor produksi yang sangat berperan aktif dan memberikan kontribusi yang besar adalah sektor migas. Hampir setiap tahunnya dari tahun 2008 hingga tahun 2012, hasil produksi migas terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut juga berdampak pada pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Bojonegoro. Selain berperan penting sebagai sumber penerimaan daerah, sektor migas juga berperan penting dalam penggerak pembangunan daerah.

Dari meningkatnya hasil produksi migas tiap tahunnya, juga mempengaruhi tingkat pembangunan daerah secara fisik baik di wilayah kota maupun desa. Dilihat dari kondisi perkotaan atau pusat pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro, perkembangan pesat mulai terlihat baik dari segi infrastruktur bangunan maupun jalan. Perbaikan terus dilakukan demi memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Bojonegoro. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Bappeda), program rencana pembangunan kota dan daerah terus di galakan. Melihat kondisi

perekonomian daerah Bojonegoro saat ini, segala bentuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan terhadap masyarakat terus diperbaiki dan diperbarui. Berikut adalah data sarana prasarana umum yang ada di Bojonegoro dan terus dilakukan perbaikan di beberapa aspeknya :

Tabel 4.18
Data Sarana Prasana Umum Kabupaten Bojonegoro

No	Bidang	Sarana	Jumlah
1	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah Sakit Umum Daerah • Rumah Sakit Swasta • Apotek • Puskesmas • Puskesmas Pembantu • Polindes • Posyandu 	<p>9</p> <p>0</p> <p>48</p> <p>26</p> <p>68</p> <p>329</p> <p>1575</p>
2	Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang Jalan Kabupaten 	628,789 Km
3	Hotel	<ul style="list-style-type: none"> • Hotel 	12
4	Terminal	<ul style="list-style-type: none"> • Terminal 	1
5	Stasiun	<ul style="list-style-type: none"> • Stasiun 	1

Sumber : Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten Bojonegoro

Secara umum fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro yang mengalami peningkatan paling menonjol yakni ketersediaan apotek dan polindes. Pada tahun 2009 jumlah apotek 39 dan jumlah polindes 325, dan mulai tahun 2010 mengalami peningkatan dengan jumlah apotek sebanyak 48 dan polindes sebanyak 329 hingga saat ini. Dari 8 RSUD yang ada di Kabupaten Bojonegoro, 2 diantaranya dilakukan pembangunan dan perbaikan oleh pemerintah daerah yaitu RSUD Dr R Sosodoro Djatikoesoemo dan Rumah Sakit Asyiah. Untuk RSUD Dr

R Sosodoro yang saat ini sedang dilakukan pembangunan lokasi baru dengan luas dan bangunan yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Sedangkan Rumah Sakit Aisyah memperbaiki dan menambah jumlah gedung dan fasilitas.

Dari segi sarana jalan, secara umum kondisi jalan di kabupaten Bojonegoro pada tahun 2010 terpantau baik sepanjang 430,779 km, pada kondisi sedang 14,424 km, rusak ringan sepanjang 111,800 km dan rusak berat 71,786 km. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus melakukan perbaikan hingga jalan tingkat pedesaan. Salah satu inovasi baru dalam perbaikan jalan adalah dengan mengganti aspal sebagai bahan dasar jalan diganti dengan paving atau yang dikenal dengan perbaikan pavingisasi. Hal tersebut dikarenakan menggunakan paving lebih lama kualitas dan ketahanan jalan dan didukung dengan biaya operasionalnya yang lebih murah. Proses pavingisasi ini masih difokuskan pada jalan-jalan kecil yang ada di tingkat desa. Kemudian dari segi perhotelan, jumlah hotel yang ada di Bojonegoro juga mengalami peningkatan yang pada tahun 2008 sebanyak 10 hotel dan saat ini berkembang menjadi 12 hotel. Meningkatnya jumlah dan fasilitas hotel kelas atas adalah efek dari keberadaan migas. Hal serupa juga terjadi pada jumlah restoran yang juga mengalami peningkatan jumlahnya. Peningkatan hotel dan restoran tersebut adalah efek dari keberadaan sektor migas yang ada di Bojonegoro. Banyaknya investor asing dan tenaga kerja atau karyawan yang berasal dari sektor migas di Bojonegoro merupakan alasan utama meningkatnya jumlah hotel dan restoran. Hal tersebut dikarenakan banyaknya investor asing maupun karyawan yang membutuhkan tempat penginapan dan tempat makan dengan fasilitas tinggi.

Pengaruh tersebut juga berdampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar yang juga mulai menikmati adanya hotel dan restoran kelas atas. Lokasi hotel dan restoran yang terbanyak yakni berada di pintu masuk kota yang juga berdekatan dengan daerah migas sumur Sukowati. Seperti halnya RSUD Dr R Sosodoro, terminal Bojonegoro juga dilakukan pemindahan dengan lokasi dan bangunan yang lebih luas dari sebelumnya. Hal tersebut juga membuktikan bahwa sarana prasarana umum yang ada di Kabupaten Bojonegoro terus mengalami peningkatan.

Untuk saat ini ada beberapa fokus pembangunan sarana prasana umum yang masih terus berjalan. Diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana umum wilayah, seperti renovasi total Masjid Agung Darussalam di Jalan Hasyim Ashari depan Alun-alun Kota. Dengan direnovasinya Masjid Agung ini nantinya akan dijadikan sebagai wisata religi, karena letaknya yang strategis di pusat kota. Karena itu, bangunan masjid tersebut rencananya akan dibuat megah dan indah agar memberi kesan Kota Ledre memiliki pusat ibadah yang bagus dan besar. Selain itu, perbaikan fasilitas Gedung Olah Raga (GOR) yang selama ini dianggap kurang maksimal pemanfaatannya dalam kegiatan olah raga. GOR tersebut akan diberikan tambahan fasilitas untuk meningkatkan prestasi olah raga dan mencetak atlet-atlet baru yang berbakat. Kemudian pembangunan Jembatan Kasiman-Padangan yang nantinya dapat menghubungkan dua kecamatan yaitu kecamatan Kasiman dan kecamatan Padangan. Tujuan utama dibangunnya jembatan layang yang membentang di atas Sungai Bengawan Solo itu adalah untuk membuka kran isolasi antara wilayah bagian utara dan selatan bengawan. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan dan dapat menumbuhkembangkan

perekonomian secara merata. Dan yang terakhir adalah pembangunan gedung Dinas Pendidikan (Diknas) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Untuk gedung diknas akan dibangun satu gedung besar pada satu lokasi karena sebelumnya lokasi diknas terpecah menjadi dua tempat. Untuk memudahkan segala urusan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan, oleh karenanya diknas akan dijadikan data lokasi. Kemudian untuk gedung dispenda akan dilakukan renovasi besar karena dirasa masih terbatasnya tempat atau ruangan yang dimiliki saat ini. Fokus perbaikan adalah menambah dan memperbesar ruangan pelayanan pembayaran pajak. Karena saat ini ruangan tersebut masih dirasa sempit dan kurang efektif.

Dalam segi kebijakan, pemerintah daerah juga telah membuat kebijakan dalam proses pengelolaan hasil produksi migas yang terus naik di setiap tahunnya. Salah satunya adalah program pembangunan melalui kebijakan Anggaran Dana Desa (ADD) yang merupakan anggaran yang dialokasikan khusus untuk seluruh desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Tujuan dari ADD sendiri adalah agar proses pembangunan bisa merata hingga level desa. Karena bagaimanapun juga dampak positif atas keberadaan migas harus bisa dirasakan hingga tingkat desa. Lebih lanjut Bapak Dadang Aris, S, ST selaku Sub. Bagian Penataan dan Konservasi Bagian SDA Kabupaten Bojonegoro lebih lanjut menjelaskan tentang Anggaran Dana Desa yang ada di Bojonegoro sebagai berikut :

“Keberadaan dan pengaruh sektor migas sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Bojonegoro dalam mengelolanya agar sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan. Selama ini pemerintah daerah terus membuat kebijakan-kebijakan untuk mengelola dan memanfaatkan dari adanya sektor migas tersebut. Yang saya ketahui kebijakan yang ada

kaitannya dengan Dispenda adalah dibuatnya program ADD, mewajibkan tenaga kerja sektor migas untuk memiliki NPWP dan pembentukan BUMD terkait migas. Saya rasa program ADD ini lah yang sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan daerah khususnya desa. Karena desa mendapatkan jatah ADD sendiri dan memiliki wewenang untuk menggunakan ADD tersebut dan bisa dilihat sendiri lah perkembangan desa-desa sekarang jauh lebih baik terutama di bidanng infrastrukturnya” (wawancara pada tanggal 19 Februari 2014 pukul 09.30)

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah membuat kebijakan terkait dalam mengelola dan memanfaatkan sektor migas, seperti yang telah dijelaskan dari hasil wawancara diatas bahwa program ADD yang berpengaruh besar terhadap pembangunan daerah khususnya di tingkat desa. Untuk pembagian ADD sendiri disesuaikan dengan kondisi wilayah yang telah dibagi dalam tiga wilayah atau yang biasa disebut dengan tiga ring. Untuk ring pertama adalah daerah atau wilayah desa yang menjadi kawasan eksplorasi dan eksploitasi. Untuk ring kedua adalah daerah atau wilayah desa yang dekat dengan kawasan eksplorasi dan eksploitasi migas. Dan yang terakhir adalah daerah ring tiga yang merupakan wilayah atau desa yang letaknya jauh dari kawasan eksplorasi dan eksploitasi migas. Untuk pembagian anggarannya sendiri, daerah atau desa ring satu menjadi desa yang mendapatkan alokasi ADD tertinggi begitu pun sebaliknya, daerah ring tiga mendapatkan alokasi ADD paling kecil karena daerahnya jauh dari kawasan eksplorasi dan eksploitasi migas. Pembagian wilayah dan anggaran tersebut disesuaikan dengan pengaruh atau dampak dari keberadaan aktivitas migas tersebut terhadap kehidupan masyarakat desa sekitar. Seluruh desa yang ada di Bojonegoro mendapatkan jatah ADD sesuai dengan daerah ring yang telah dibagi dan ditentukan sebelumnya. Desa yang mendapatkan ADD memiliki wewenang

dalam mengelola dan menggunakan anggaran tersebut termasuk diantaranya pembangunan infrastruktur desa. Hasil dari program ADD tersebut sudah mulai terlihat dengan meningkatnya perbaikan dan pembaharuan infrastruktur desa seperti kantor desa, jalan desa dan infastruktur lainnya.

b. Membuka Lapangan Pekerjaan

Keberadaan industri minyak dan gas di Kabupaten Bojonegoro merupakan sebuah kesempatan yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh atas pemanfaatan dari keberadaannya industri migas tersebut. Pemanfaatan yang harus di kelola adalah pemanfaatan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Secara tidak langsung keberadaan industri tersebut akan berdampak terhadap ketiga aspek tersebut, baik berdampak positif maupun berdampak negatif. Untuk itu pemerintah daerah memiliki tugas untuk memaksimalkan dampak positif tersebut dari pada dampak negatifnya. Dari segi lingkungan sendiri pemerintah serta perusahaan harus bisa mengelola dan menjaga kondisi lingkungan di sekitar industri tersebut agar tidak mengalami pencemaran. Pengelolaan lingkungan sekitar industri tidak hanya tugas pemerintah saja tapi juga tugas dari perusahaan-perusaah serta masyarakat sekitar.

Dari keberadaan industri tersebut, dampak positif terhadap ekonomi yang paling penting untuk diperhatikan baik dari pemerintah maupun dari perusahaan pengelola industri tersebut. Dampak positif tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap perekonomian daerah melainkan perekonomian masyarakat sekitar yang

harus juga diperhatikan. Keberadaan industri migas memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi APBD Kabupaten Bojonegoro yang terus mengalami peningkatan semenjak adanya industri migas. Dari data yang ada pada Dispenda dijelaskan bahwa setiap tahunnya PAD Bojonegoro terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Salah satu pemasok terbesar meningkatnya PAD Kabupaten Bojonegoro adalah dari bidang perimbangan yang terdiri dari pendapatan dibidang sumber daya alam. Harapan pemerintah dengan adanya industri sektor migas tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian daerah saja, melainkan juga dapat berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat sekitar industri.

Melalui Disnakertransos dan Bagian SDA melakukan inventarisasi tenaga kerja ahli yang bisa direkrut untuk pengerjaan proyek produksi migas yang ada di Bojonegoro. Pemerintah daerah terus berupaya untuk bisa memasukkan warganya agar bisa andil dalam mengelola sektor migas yang ada di daerah. Dalam hal ini Disnakertransos terus melakukan inventarisasi jumlah tenaga kerja aktif yang masih dalam lingkaran pengangguran untuk dapat di promosikan di perusahaan-perusahaan sektor migas. Kerjasama antar perusahaan dengan pemerintah daerah sangatlah dibutuhkan, karena melalui kerjasama tersebut pemerintah daerah dapat terus melakukan promosi tenaga ahli agar dapat bekerja di sektor migas. Dari Bagian SDA Kabupaten Bojonegoro memiliki tugas untuk melakukan pelatihan tentang sektor migas terhadap masyarakat sekitar yang masih belum memiliki kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan di sektor migas. Ada beberapa tenaga

kerja yang dibutuhkan dalam pengelolaan sektor migas diantaranya adalah tenaga pemasangan pipa, tukang las dan teknisi mesin produksi hingga teknisi bidang transportasi. Bagian SDA memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelatihan terhadap masyarakat dibidang tersebut agar bisa diprososikan dan direkrut di industri migas yang ada di daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2011 pasal 9 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal berisikan bahwa pihak industri migas juga diwajibkan untuk menempatkan prioritas pemberdayaan dan rekrutmen tenaga kerja lokal. Tujuan dari perda tersebut adalah untuk mengupayakan agar masyarakat sekitar dapat terlibat langsung dalam proses pengolahan migas sebagai tenaga kerja. Pemerintah daerah juga berupaya agar keberadaan sektor migas tersebut benar-benar memberikan pengaruh terhadap masyarakat sekitar melalui rekrutmen tenaga kerja lokal tersebut. Peraturan daerah tersebut juga telah mendiskripsikan mengenai kategori-kategori tenaga kerja hingga aturan upah atau gaji tenaga kerja lokal tersebut sesuai dengan upah minimum Kabupaten Bojonegoro. Jadi melalui peraturan daerah tersebut pemerintah daerah dapat memaksimalkan manfaat dari keberadaan sektor migas di Bojonegoro terutama dalam bidang rekrutmen tenaga kerja lokal.

Wawancara dengan Bapak Dadang Aris, S, ST selaku Sub. Bagian Penataan dan Konservasi Bagian SDA Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 18 Februari 2014 pukul 09.30 WIB di Ruang Penataan dan Konservasi, menjelaskan sebagai berikut :

“Dalam hal pelatihan untuk mencetak tenaga kerja baru khususnya dibidang migas merupakan tanggung jawab dari Bagian SDA Bojonegoro. Merekomendasikan tenaga kerja terhadap Disnakertransos dan Perusahaan Migas juga merupakan tanggung jawab dari kami yang bertugas di Bagian SDA.”

Dari data Disnakertransos, jumlah tenaga kerja ahli di berbagai bidang di Bojonegoro yang siap terlibat di dalam proyek migas tercatat ada 302 tenaga kerja yang lokasinya tersebar di 21 kecamatan. Jumlah tenaga kerja tersebut terbanyak di Kecamatan Kalitidu, yang masih kawasan ring satu migas sebanyak 138 tenaga kerja. Sementara itu, di Kecamatan Ngasem terdapat 15 tenaga kerja, Kecamatan Malo 50 tenaga kerja, Kota 34 tenaga kerja, Trucuk 14 tenaga kerja dan tenaga kerja lainnya yang tersebar di Kecamatan Kepohbaru, Kedungadem, Bourno, Kapas, Bubulan dan Kecamatan lainnya. Tenaga kerja tersebut merupakan tenaga kerja yang telah siap untuk di promosikan dan direkrut untuk bekerja di sektor migas. Setiap tahunnya pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja agar bisa terlibat dalam proyek migas yang ada di daerah. Secara tidak langsung keberadaan sektor migas telah memberikan banyak lowongan pekerjaan yang cukup besar untuk masyarakat Bojonegoro. Kondisi taraf hidup masyarakat Bojonegoro pun juga mengalami peningkatan seiring bertambahnya masyarakat Bojonegoro yang terus terlibat dalam proyek sektor migas tersebut.

Jadi pemerintah daerah Bojonegoro memiliki peran aktif dalam mendukung proses rekrutment tenaga kerja lokal sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Karena pelatihan hingga penyediaan tenaga kerja lokal juga menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah agar masyarakat dapat

merasakan secara langsung keberadaan sektor migas tersebut. Jadi keberadaan sektor migas di Bojonegoro tersebut dapat dimaksimalkan peran dan manfaatnya baik terhadap daerah maupun langsung terhadap masyarakat.

c. Kontribusi Sektor Migas Melalui CSR

Kontribusi sektor migas terhadap pembangunan daerah sangatlah besar baik yang melalui pemerintah daerah dengan kebijakan dan perencanaan-perencanaan yang telah dibuat maupun langsung dari perusahaan terkait yang bergerak di bidang migas. Proses pembangunan yang ada di Bojonegoro sangat besar dan hal tersebut merupakan tanggung jawab dan tugas dari pemerintah daerah. Dari beberapa proses pembangunan tersebut, didasari atas meningkatnya pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah sendiri terus berusaha mengupayakan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi melalui proses pembangunan sarana prasarana umum yang diharapkan bisa memudahkan dan membantu masyarakat sekitar. Peran sektor migas di bidang pembangunan ini sangatlah besar, tetapi proses pembangunan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja melainkan dari perusahaan yang bergerak di sektor migas juga ikut terlibat dalam proses pembangunan daerah. Sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai perusahaan terhadap daerah, perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar baik terhadap kemajuan ekonomi maupun sosial masyarakat sekitar. Salah satu tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat adalah melalui program *Cooperate Sosial Responsibility* (CSR).

CSR sendiri merupakan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berada. Begitupula dengan industri migas yang ada di Bojonegoro juga memiliki tanggung jawab terhadap daerah sekitar. Proses perumusan atau penentuan kegiatan hingga pelaksanaan kegiatan CSR tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah daerah. Karena dalam setiap pelaksanaan program tersebut harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Program CSR sendiri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2011 tentang percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro. Segala bentuk peraturan yang bersangkutan dengan pengelolaan sektor migas telah di atur didalamnya. Peraturan daerah tersebut mengatur mulai dari kewajiban dan larangan industri migas hingga program CSR sebagai salah satu program pendukung percepatan pembangunan dari industri migas tersebut.

Berikut isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2011 tentang program CSR:

1. Pihak Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta pengolah migas wajib bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pelaksanaan program CSR.
2. Program CSR dari masing-masing Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta pengolah migas harus dirumuskan berdasar kebutuhan riil masyarakat Bojonegoro dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, yang pelaksanaannya dapat melibatkan organisasi masyarakat sipil lokal.
3. Program CSR sebagaimana ayat (1) wajib merujuk pada Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) dan/atau Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDdes).

Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa program CSR tersebut sudah diatur perumusan hingga pelaksanaannya. Peraturan daerah tersebut merupakan salah satu tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk mengatur dan memaksimalkan pelaksanaan program CSR tersebut. Mulai dari mewajibkan pihak industri untuk bertanggung jawab terhadap pengembangan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui program CSR. Untuk perumusan atau penentuan kegiatan CSR yang akan dilakukan juga harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk menyingkronkan kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut juga untuk menghindari ketimpangan pembangunan antara pemerintah dengan pihak swasta. Setiap program CSR yang telah berjalan juga harus dilaporkan kepada pemerintah daerah sebagai bukti bahwa kegiatan tersebut telah berjalan sesuai dengan kesepakatan yang juga telah diatur dalam perda tersebut pada pasal 24 dan 25 yang mewajibkan pihak migas untuk menyampaikan dan melaporkan proses pelaksanaan hingga hasil pelaksanaan kepada pemerintah daerah sebagai bukti bahwa program tersebut telah selesai dilaksanakan.

Lebih lanjut Bapak Wiega Bagus A. SE, SST selaku Staff Sub. Bagian Penataan dan Konservasi Bagian SDA Kabupaten Bojonegoro lebih lanjut menjelaskan tentang peran CSR yang ada di Bojonegoro sebagai berikut :

“Dalam pengelolaan sektor migas pemerintah juga memiliki peran terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan migas yang ada. Salah satunya adalah dalam kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan dalam pelaksanaan program CSR dari perusahaan terkait. Dalam pelaksanaan CSR, perusahaan selalu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah dalam pelaksanaan dan penentuan kegiatan CSR. Hal ini dilakukan agar perusahaan mengetahui kebutuhan yang sedang di butuhkan oleh masyarakat pada saat itu. Disamping itu juga supaya tidak terjadi ketimpangan program antara pemerintah dengan perusahaan dalam

proses pembangunan daerah. Tapi dalam pelaksanaannya di lapangan, pemerintah sama sekali tidak ikut terlibat didalamnya. Jadi dalam pelaksanaannya, perusahaan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaannya. Perlu diingat juga bahwa bentuk CSR yang diberikan perusahaan bukan berupa anggaran melainkan berupa barang, peralatan maupun kegiatan lainnya.” (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Februari pukul 09.30)

Dapat disimpulkan bahwa CSR sendiri memiliki beberapa program tergantung kemampuan dari perusahaan tersebut diantaranya di bidang kesehatan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur daerah sekitar. Pelaksanaan program CSR tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah mengenai kebutuhan dan kekurangan apa saja yang perlu untuk di bantu dari perusahaan. Koordinasi tersebut dilakukan untuk menghindari ketimpangan antara program pemerintah dengan perusahaan dalam proses pembangunan daerah. Dari koordinasi dan kesepakatan antara pemerintah daerah dengan perusahaan, program tersebut dibidang apa akan dilaksanakan setelah semua disepakati. Berikut ini adalah beberapa program dari perusahaan yang berperan aktif dalam proses pembangunan daerah :

Tabel 4.19

Program Kemasyarakatan dari Perusahaan di Bojonegoro

No	Perusahaan	Sasaran	Lokasi	Program
1.	JOB Pertamina – Petrochine EJ	Masyarakat	Desa Ngampel	Pelatihan peningkatan keterampilan pengelolaan waluh
2	JOB Pertamina – Petrochine EJ	Masyarakat	Desa Campurejo	<ul style="list-style-type: none"> • Paving Jalan • Pengecetan pagar makam • Pembuatan selokan
3	JOB Pertamina – Petrochine EJ	Masyarakat	Desa Campurejo	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Polindes • Layanan kesehatan gratis
4	JOB Pertamina – Petrochine EJ	Masyarakat	Desa Campurejo	Pelatihan dan pemberian modal usaha peternakan
5	Mobile Cepu Ltd (MCL)	Pelajar	SDN Gayam I,II,III, SDN Mojodelik I,II,III, SDN Bonorejo, SDN Baged. SDN Brabowon, SDN Begadon, MI ringintunggal, MU Uluyul Ulum Gayam	Pembekalan dan motivasi peserta PKS (Patroli Keamanan Sekolah) terkait dengan program peningkatan infrastruktur pedesaan/public
6	PT. Tripatra-Samsung	Guru TK-SMA se Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	Seminar Neuro Linguistic Programming (NLP)
7	ExxonMobil Foundation	Masyarakat	Lingkungan Nasional	Peningkatan fasilitas sekolah dan motode mengajar
8	PT. Tripatra Enggineers & Constructors	Guru dan Pelajar	Sekolah Tingkat TK-SMA di sekitar proyek Banyuurip Blok Cepu	Sosialisasi Undang-undang lain di sekolah seputar proyek
9	Mobil Cepu LTD (MCL)	Sekolah	Desa Katur Kecamatan Kalitidu dan Dander Bojonegoro	Perbaikan lima gedung sekolah dasar <ul style="list-style-type: none"> • SLB Kalitidu • SDN II Sudu • SDN II Katur • MI Miftahul Huda Katur • SDN I Ngulanan Dander
10	Mobil Cepu Ltd (MCL)	Pelajar	Taman Pendidikan AL Qur'an (TPQ) Bi'ru'ul Huda Talok Kalitidu	Pemeriksaan gigi gratis

Sumber : Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten Bojonegoro

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang berperan aktif dalam pembangunan daerah tidak hanya dari pihak pemerintah melainkan dari pihak perusahaan juga terlibat secara langsung dalam proses pembangunan daerah. Sebagian besar perusahaan yang ada di Bojonegoro, perusahaan yang bergerak di sektor migas lebih aktif dalam proses pembangunan daerah sekitar. Karena dalam kesepakatan keberadaan perusahaan-perusahaan migas di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya bertindak sebagai pengeksplorasi dan eksploitasi migas saja, tapi keberadaan perusahaan migas juga harus ikut berperan aktif dalam pembangunan daerah. Keberadaan perusahaan migas juga harus memperhatikan kondisi lingkungan disekitar tempat pengeboran. Karena dalam hal ini limbah yang dihasilkan perusahaan harus diperhatikan pengelolaannya. Kurangnya perhatian terhadap keberadaan limbah tersebut akan mengakibatkan kerugian terhadap lingkungan sekitar yang akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Bahkan kondisi tersebut juga akan merugikan masyarakat sekitar apabila terjadi pencemaran lingkungan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Sektor Migas Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan pembangunan daerah, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Bagian SDA Kabupaten Bojonegoro pasti mengalami hambatan dan dukungan yang beragam. Berikut dijelaskan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami dalam pembangunan yang optimal.

a. Faktor Pendukung

Potensi Sumber Daya Alam yang Tersedia

Letak Kabupaten Bojonegoro yang strategis, menjadikan daerah tersebut sebagai daerah dengan sumber daya alam yang melimpah. Potensi sumber daya alam yang terkandung sangatlah beragam mulai dari hasil tanam hingga hasil tambang. Sebagian besar masyarakat Bojonegoro masih menggantungkan hidupnya pada hasil tanam karena kondisi tanah di Bojonegoro memang terkenal subur. Banyak hasil tanam yang dapat dihasilkan dikabupaten bojonegoro mulai dari padi, jagung dan yang dibanggakan Bojonegoro adalah hasil tembakaunya yang sangat baik kualitasnya. Hampir dipastikan setiap memasuki musim kemarau sebagian besar petani di Bojonegoro menanam tembakau. Karena harga jual tembakau yang lumayan tinggi dan kondisi alam yang sangat mendukung untuk ditanami tembakau. Disisi lain potensi hutan jati yang ada di Bojonegoro juga merupakan salah satu kebanggaan dari Kabupaten Bojonegoro. Hingga saat ini pemerintah daerah melalui perhutani terus melakukan perbaikan hutan demi menjadi identitas Bojonegoro sebagai daerah potensi hutan jati.

Seiring berjalannya waktu, potensi sumber daya alam yang ditemukan di Bojonegoro sangatlah banyak dan beragam. Akhir-akhir ini yang menjadi pusat perhatian adalah sumber daya alam berupa migas yang terdapat di Bojonegoro. Potensi migas yang terkandung di Bojonegoro sangatlah besar, dan hal tersebut yang menjadikan Bojonegoro sebagai daerah potensial. Saat ini Kabupaten Bojonegoro juga disebut sebagai daerah migas dengan cadangan minyak sekitar

600 juta – 1,4 milyar barel dan cadangan gas sekitar 1,7 – 2 triliun kaki kubik terbesar di Indonesia. Berhasilnya pengelolaan sektor migas yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dan berpengaruh terhadap pembangunan daerah tidak terlepas dari potensi sumber daya alam yang terkandung di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Diantara sektor lain, potensi sumber daya alam di sektor migas merupakan sektor unggulan saat ini yang ada di Bojonegoro. Dapat dipastikan bahwa hampir 20% kandungan migas Indonesia berada di wilayah Bojonegoro. Tingginya kandungan dan potensi migas yang ada di Bojonegoro merupakan faktor utama dari proses pengembangan dan pengelolaan sektor migas tersebut. Terbukti sejak tahun 2008 hasil produksi migas yang ada di Bojonegoro terus mengalami peningkatan secara signifikan. Dampak dari peningkatan hasil produksi tersebut dapat dirasakan baik oleh pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat sekitar. Dari hasil survei pihak perusahaan dinyatakan bahwa dari sekian titik potensi sumber minyak dan gas bumi yang terkandung di wilayah Bojonegoro, masih banyak titik potensial yang belum dilakukan eksplorasi dan eksploitasi untuk pengelolaannya. Titik-titik potensial tersebut hampir tersebar di wilayah Bojonegoro bagian barat dan utara. Masih banyaknya titik-titik potensial yang belum dikerjakan, membuktikan bahwa kandungan migas yang ada di Bojonegoro sangat melimpah.

Lebih lanjut Bapak Dadang Aris, S, ST selaku Sub. Bagian Penataan dan Konservasi Bagian SDA Kabupaten Bojonegoro lebih lanjut menjelaskan tentang potensi migas yang ada di Bojonegoro sebagai berikut :

“Saya rasa potensi migas yang ada di Bojonegoro sangatlah besar sekali. Kurang lebih hampir 20% kandungan migas yang ada di Indonesia itu berada di wilayah Bojonegoro. Sekian banyak titik-titik potensial migas yang telah dilakukan eksplorasi dan eksploitasi, masih banyak titik-titik lain yang masih belum dilakukan pengerjaan. Itu membuktikan bahwa potensi migas yang ada di Bojonegoro ini sangatlah besar. Ditambah lagi sumur-sumur tua bekas pertambangan migas yang telah ditinggalkan oleh pihak pengelola hingga saat ini masih di olah oleh masyarakat sekitar dengan pertambangan manual karena sumber tersebut masih mengeluarkan migas. Tingginya potensi migas yang ada di Bojonegoro inilah yang saya pikir menjadi faktor utama dalam proses pengembangan sektor migas yang terbukti terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Dan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pembangunan daerah Bojonegoro sendiri.” (wawancara pada tanggal 18 Februari 2014 pukul 09.40)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi migas yang ada di Bojonegoro sangatlah besar. Tingginya potensi migas yang ada tersebut menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan migas secara maksimal. Terbukti sejak tahun 2008 hasil produksi migas secara keseluruhan terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Banyak dampak positif dari ditemukannya sektor migas yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Pengelolaan sektor migas yang terus dilakukan baik dari pihak swasta maupun pemerintah diharapkan dapat memberikan perubahan terhadap Bojonegoro sebagai daerah potensi migas. Setiap tahunnya produksi migas yang ada terus mengalami peningkatan yang pada akhirnya berdampak baik terhadap perekonomian daerah. Berawal dari meningkatnya pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan yang diantaranya terdiri dari sumber pendapatan sektor migas. Sektor migas sendiri merupakan pemasok tertinggi pendapatan daerah sesuai dengan hasil produksi migas tiap tahunnya. Dari

tingginya pendapatan daerah tersebut maka tinggi pula perencanaan dan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

Lebih lanjut Bapak Dadang Aris, S, ST selaku Sub. Bagian Penataan dan Konservasi Bagian SDA Kabupaten Bojonegoro lebih lanjut menjelaskan tentang peran potensi migas yang ada di Bojonegoro sebagai berikut :

“Dulunya sumber pendapatan Kabupaten Bojonegoro sangatlah kecil dan minim, tapi semenjak ditemukannya potensi migas yang ada di Bojonegoro ada peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan tersebut berawal dari tahun 2008 dimana hasil produksi migas yang mengalami peningkatan hingga saat ini. Dari kondisi tersebutlah pemerintah daerah terus melakukan perbaikan pada daerah khususnya di bidang pembangunan mengingat kondisi APBD daerah yang sangat tinggi. Pembangunan pun dilakukan mulai dari pembangunan infrastruktur daerah hingga pembangunan perekonomian daerah. Jadi saya pikir sektor migas memang mejadi faktor pendukung utama dan memiliki andil besar dalam proses pembangunan yang ada di Bojonegoro.” (wawancara pada tanggal 18 Februari 2014 pukul 09.30)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa potensi migas yang ada di Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu faktor utama dalam proses pembangunan daerah. Pendapatan daerah yang berasal dari sektor migas yang terus mengalami peningkatan, menjadi faktor besarnya tingkat pembangunan daerah yang ada di Bojonegoro mulai dari pembangunan perekonomian hingga pembangunan fisik atau infrastruktur daerah. Jadi pada dasarnya potensi sumber daya alam yang terkandung di Bojonegoro merupakan salah satu faktor utama dalam pengembangan serta pembangunan daerah Bojonegoro.

b. Faktor Penghambat

Terbatasnya Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Sektor Migas

Dalam proses pengembangan serta pengelolaan sektor migas dan meningkatkan pembangunan daerah khususnya di bidang pendapatan banyak hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah salah satunya adalah terbatasnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sektor migas tersebut. Proses pengelolaan dan perkembangan sektor migas merupakan tanggung jawab penuh dari pemerintah pusat. Bahkan dalam proses perjanjian dan kesepakatan dengan perusahaan terkait juga menjadi wewenang penuh pemerintah pusat. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki wewenang yang sangat terbatas dalam proses pengelolaan sektor migas meskipun sektor migas tersebut berada di wilayah Bojonegoro. Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Drs. Fajar Yudhy Hartanto selaku Kepala Bagian SDA Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

“Minimnya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam proses pengelolaan sektor migas juga menjadi salah satu faktor penghambat dari pengembangan sektor migas yang ada di Bojonegoro. Secara penuh kewenangan pengelolaan sektor migas menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, mulai dari pembuatan kerjasama, pengelolaan hingga pemasaran menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat. Dalam hal ini pemerintah daerah hanya diberi wewenang dalam urusan perizinan mulai dari IMB, AMDAL dan pembebasan lahan.” (wawancara dilakukan pada tanggal 21 Februari 2014 pukul 10.00)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan penuh atas pengelolaan dan pengembangan sektor migas adalah pemerintah pusat.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan terbatas dalam urusan perizinan atas

lahan atau tempat eksplorasi dan eksploitasi. Minimnya kewenangan daerah terlibat langsung dalam proses pengelolaan sektor migas menjadi salah satu faktor penghambat dalam meningkatkan pendapatan daerah. Karena pemerintah daerah kesulitan dalam meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat apabila pemerintah daerah tidak terlibat langsung dalam proses pengelolaan migas. Pemerintah daerah sama sekali tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan migas. Hal tersebut lah yang menjadi hambatan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor migas dan meningkatkan pendapatan daerah karena tidak mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam proses pengelolaan sektor migas.

Terbatasnya kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor migas diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kecilnya Peran Pemerintah Daerah dalam Ikut Serta Perencanaan Tata Kelola Sektor Migas

Dalam setiap tahunnya pengelolaan sektor migas memiliki perencanaan untuk kedepannya baik perencanaan pengembangan industri maupun peningkatan hasil produksi. Proses perencanaan tersebut menjadi salah satu hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengembangan dan peningkatan pembangunan daerah. Karena pemerintah daerah memiliki peran yang terbatas dalam ikut serta merencanakan pengembangan sektor migas dalam meningkatkan pembangunan daerah. Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Drs. Fajar Yudhy Hartanto selaku Kepala Bagian SDA Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

“Dalam setiap pengelolaan sektor migas selalu ada perencanaan setiap tahunnya. Tapi tidak setiap perencanaan target tata kelola sektor migas masih dirasa kurang proposional dalam pembagiannya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah hanya mendapatkan porsi dalam perencanaan masalah sosial saja. Untuk pengelolaan sektor migas semuanya menjadi tugas dari pemerintah pusat. Dan saya rasa *Plan of Development* (POD) masih belum sesuai proposinya antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.” (wawancara dilakukan pada tanggal 21 Februari 2014 pukul 10.00)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keterbatasan wewenang yang dimiliki pemerintah daerah menjadi faktor penghambat dalam pengembangan sektor migas untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pembangunan daerah merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah, tetapi dalam segi sektor migas pemerintah daerah memiliki wewenang yang terbatas dalam perencanaan pembangunan khususnya dibidang pendapatan. Pembagian proporsi tanggung jawab antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dirasa masih kurang. Dari keterbatasan tersebutlah yang menjadi kendala pemerintah daerah dalam proses perencanaan peningkatan pendapatan daerah.

2. Tidak Transparasinya Laporan Hasil Pengelolaan dan Produksi Migas Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintah Daerah

Peningkatan pendapatan daerah lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya hasil produksi migas. Data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa pemasok terbesar pendapatan daerah adalah dari bidang perimbangan yang salah satunya adalah dari sektor migas. Peningkatan pendapatan tersebut sangat berpengaruh terhadap perencanaan dan proses pembangunan daerah Bojonegoro. Seiring dengan

meningkatnya pendapatan daerah, perencanaan pembangunan juga akan ditingkatkan. Tetapi dalam proses perencanaan dan proses pembangunan daerah terdapat beberapa hambatan, salah satunya adalah transparansi hasil produksi migas.

Dalam proses pengelolaan migas, pemerintah pusat menjadi pengendali utama dalam proses pengelolaan migas yang ada di Bojonegoro. Laporan atas hasil produksi migas dari pihak industri setiap tahunnya dilaporkan kepada pemerintah pusat sebagai penanggung jawab atas pengelolaan sektor migas. Jadi setiap perkembangan hasil produksi pelaporannya ditujukan kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menerima laporan akhir hasil produksi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut Bapak Drs. Fajar Yudhy Hartanto selaku Kepala Bagian SDA Kabupaten Bojonegoro lebih lanjut menjelaskan tentang hambatan pemerintah dalam proses pengelolaan migas untuk pembangunan daerah yang ada di Bojonegoro sebagai berikut :

“Hambatan pemerintah dalam proses pengelolaan sektor migas adalah transparansi hasil produksi migas, dan saya rasa hambatan tersebut juga berpengaruh terhadap proses perencanaan pembangunan daerah. Dalam setiap data hasil produksi maupun data pengelolaan yang berhubungan dengan sektor migas, pemerintah daerah sama sekali tidak mengetahui asal usul data tersebut. Pemerintah daerah dalam hal ini hanya mendapatkan data akhir dari pemerintah pusat. Jadi dalam proses pengelolaan data-data tersebut sepenuhnya diurus oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah. Dari sinilah pemerintah daerah kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di daerah mulai dari ekonomi, sosial dan lingkungan yang berhubungan dengan sektor migas karena pemerintah daerah tidak tahu menahu permasalahan yang ada selama proses pengelolaan migas tersebut.” (wawancara dilakukan pada tanggal 21 Februari 2014 pukul 10.00).

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam setiap data hasil produksi maupun data pengelolaan migas, pemerintah daerah hanya mendapatkan hasil akhirnya dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak bisa mengetahui perkembangan pengelolaan produksi migas tersebut karena tidak terlibat dalam proses pengelolaan data-data tersebut. Dari sinilah pemerintah daerah kesulitan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan sektor migas. Keberadaan lokasi eksplorasi dan eksploitasi yang berada di wilayah Bojonegoro, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Bojonegoro apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan sektor migas. Masih rendahnya perekonomian Bojonegoro, banyaknya masyarakat yang masih menjadi pengangguran dan masih rendahnya pembangunan daerah merupakan beberapa masalah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Berkaitan dengan keberadaan potensi migas yang ada di Bojonegoro, seharusnya bisa meningkatkan perekonomian, pembangunan dan taraf hidup masyarakat sekitar. Namun karena tidak transparannya data hasil produksi migas, pemerintah daerah pun juga sulit dalam merencanakan segala bentuk perencanaan demi meningkatkan pendapatan untuk daerah. Pemerintah daerah tidak bisa merencanakan dan menentukan target penerimaan apabila pemerintah daerah tidak tahu perkembangan hasil produksi secara signifikan dan permasalahan yang terjadi di sektor migas tersebut. Jadi tidak adanya transparansi hasil produksi migas merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan sektor migas dan pembangunan daerah.

C. Analisis Data Penelitian

1. Kontribusi Sektor Migas Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Bojonegoro.

Setelah penyajian data-data dari hasil penelitian di lapangan mengenai obyek penelitian maupun data fokus penelitian tentang peran sektor migas dalam meningkatkan pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data sebagai berikut :

a. Kontribusi Sektor Migas Terhadap Penerimaan DBH

Pemerintah Bojonegoro sebagai salah satu daerah di Jawa Timur memiliki upaya sendiri dalam mengelola keuangan daerah, salah satu upaya tersebut adalah dengan meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor migas. Bojonegoro yang merupakan daerah potensial migas memiliki tugas untuk bisa mengelola dan memanfaatkan sumber migas yang terkandung di Bojonegoro. Dari tahun 2008 hingga tahun 2012 hasil produksi migas Bojonegoro terus mengalami peningkatan. Hasil produksi migas tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah ditetapkan oleh pusat, Bojonegoro memperoleh pemasukan dari sektor migas tersebut. DBH sendiri adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengaturan DBH sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah. Dengan alokasi DBH 0,5%

merupakan alokasi khusus untuk pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penerimaan DBH dari pemerintah pusat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelolanya. Penerimaan daerah melalui DBH sendiri terus mengalami peningkatan secara signifikan di setiap tahunnya. Meningkatnya penerimaan DBH tersebut tidak terlepas dari meningkatnya hasil produksi migas disetiap tahunnya. Karena penentuan dan pengalokasian DBH didasarkan atas hasil produksi sektor migas tersebut. Jadi peningkatan hasil produksi migas selalu diikuti dengan peningkatan DBH yang diterima daerah. Dari beberapa sektor atau sumber penerimaan DBH khususnya bukan pajak/SDA, diantara sektor lain DBH dari sektor minyak dan gas bumi memiliki realisasi penerimaan tertinggi. Realisasi tersebut tidak terlepas dari tingginya hasil produksi migas dan mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Jadi sektor migas merupakan salah satu sektor unggulan dalam memasok pendapatan daerah melalui DBH tersebut. Meskipun DBH migas merupakan salah satu penerimaan unggulan tapi dari sektor lain seperti kehutanan, perikanan, serta pertambangan umum juga memiliki pemasukan yang cukup besar. Semua sektor tersebut pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kondisi dana perimbangan daerah yang juga akan berpengaruh terhadap kondisi APBD Bojonegoro. Dari DBH pemerintah daerah memiliki beberapa program dalam pengelolaannya salah satunya adalah program Anggaran Dana Desa (ADD). ADD sendiri adalah program yang dibuat untuk memnfaatkan DBH yang di dapat pemerintah Bojonegoro dari pemerintah pusat dengan alokasi 12% dari DBH yang di dapat. Pembagian ADD dialokasikan berdasarkan ring atau kawasan desa tersebut. Dalam program ADD pembagian

desa dibagi kedalam tiga ring, ring pertama adalah desa yang menjadi kawasan eksplorasi dan eksploitasi migas, ring dua adalah desa yang dekat dengan kawasan migas dan ring tiga adalah desa yang jauh dari kawasan migas. Untuk daerah ring satu adalah desa yang mendapatkan ADD paling besar dari pada desa ring dua dan tiga. Hal tersebut karena daerah ring satu merupakan daerah yang kawasannya digunakan untuk proses eksplorasi dan eksploitasi dengan berbagai dampak positif dan negatifnya. Bapak Drs. Eko Puji Wahyono, SH, M.Si selaku Kasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro menegaskan bahwa sektor migas merupakan penerimaan unggulan yang ada di Kabupaten Bojonegoro dengan pemasukan yang besar dan terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

b. Kontribusi Sektor Migas Terhadap Penerimaan Dana Perimbangan Daerah

Dana perimbangan adalah salah satu bagian dari beberapa penerimaan daerah, termasuk di Kabupaten Bojonegoro. Sumber penerimaan dana perimbangan berasal dari DBH hasil pajak, DBH bukan pajak/SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari berberapa sektor tersebut, disetiap sektornya memiliki peran sendiri-sendiri sebagai pemasok dana perimbangan daerah. Dari hasil DBH sektor migas khususnya, terlihat bahwa penerimaan dari DBH terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya pula hasil produksi sektor migas yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap penentuan alokasi DBH yang akan didapat oleh daerah.

Dari sekian banyak sumber penerimaan di bidang dana perimbangan, peningkatan penerimaan memang terjadi di semua sektor. Dari penerimaan DAU dan DAK peningkatan terlihat disetiap tahunnya secara signifikan. Begitupula dengan peningkatan DBH baik pajak maupun bukan pajak yang juga mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Meningkatnya semua sektor penerimaan di bidang perimbangan menjadikan pertumbuhan dana perimbangan mengalami peningkatan yang signifikan. Bentuk realisasi dana perimbangan hampir memenuhi target yang ditentukan dari setiap tahunnya. Kondisi dana perimbang tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap kondisi pendapatan daerah Bojonegoro. Dana perimbangan yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang banyak berkontribusi terhadap peningkatan dan pertumbuhan pendapatan daerah Bojonegoro. Terbukti meningkatnya dana perimbangan diikuti dengan meningkatnya pendapatan atau kondisi APBD Bojonegoro.

Jadi dalam hal ini peningkatan pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh keberadaan sektor migas yang ada di Bojonegoro. Meningkatnya hasil produksi sektor migas berpengaruh terhadap meningkatnya alokasi DBH terhadap daerah. dan meningkatnya DBH tersebut berpengaruh besar terhadap peningkatan dana perimbangan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Peningkatan DBH sendiri tidak hanya berasal dari sektor migas tapi dari sektor lain seperti kehutanan, perikanan serta pertambangan umum juga ikut mendukung dalam meningkatnya DBH daerah secara keseluruhan. Jadi pemasukan dari setiap sektor juga berpengaruh terhadap peningkatan DBH secara keseluruhan.

c. Kontribusi Sektor Migas Dalam Meningkatkan APBD Bojonegoro

Dalam sistem pemerintahan unsur utama berjalannya suatu pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun daerah adalah keuangan atau anggaran. Di sistem pemerintahan, anggaran tersebut biasanya disebut sebagai APBN untuk tingkat pusat dan APBD untuk tingkat daerah. Baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang sendiri untuk mengelola anggaran tersebut. Dari segi pemerintahan daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang sendiri dalam mengurus dan mengelola keuangan daerah melalui sistem desentralisasi. Desentralisasi sendiri merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Dasar dari sistem tersebut adalah untuk memudahkan pemerintah daerah dalam mengatur dan mensejahterakan masyarakatnya. Melalui sistem tersebut lah pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keuangan daerahnya baik penerimaan maupun pengeluaran. Keuangan daerah sendiri adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (pasal 1 butir 55 PP No. 58 Tahun 2005).

Kuangan daerah sendiri memiliki berbagai sumber penerimaan mulai dari penerimaan pajak atau retribusi hingga penerimaan non pajak atau hasil alam. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki tugas untuk menyeimbangkan APBD agar pemasukan dan pengeluaran daerah dapat berjalan dengan seimbang. Tindakan rasional yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah dengan

meningkatkan pendapatan asli daerah dan meminimalisir pengeluaran daerah agar keuangan daerah dapat terkontrol dengan baik. Dalam proses meningkatkan penerimaan asli daerah pemerintah daerah harus mengetahui potensi daerah sebagai pemasok pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pemasukan daerah lain-lain yang dianggap sah (Mardiasmo, 2002:132).

Bojonegoro yang merupakan daerah potensial migas memiliki tugas untuk bisa mengelola dan memanfaatkan sumber migas yang terkandung di Bojonegoro. dari tahun 2008 hingga tahun 2012 hasil produksi migas Bojonegoro terus mengalami peningkatan. Peningkatan hasil produksi tersebut secara tidak langsung berdampak terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro dana perimbangan yang merupakan dana bersumber dari pajak dan non pajak sumber daya alam. Berdasarkan data dari Dispenda bahwa penerimaan dana perimbangan Kabupaten Bojonegoro terus mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Peningkatan tersebut adalah efek dari meningkatnya hasil produksi migas yang ada di Bojonegoro. Hampir disetiap tahunnya dana perimbangan mencapai target realisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Peningkatan dana perimbangan tersebut secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Bojonegoro. Hampir disetiap tahunnya, PAD Bojonegoro mengalami peningkatan dan terus mencapai target realisasi terhitung dari tahun 2008. Dari penjelasan Bapak Drs. Muhadi selaku Kepala Bidang Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro, pemasok terbesar meningkatnya pendapatan asli

daerah Bojonegoro adalah dari dana perimbangan yang lebih khususnya berasal dari sektor migas. Secara tidak langsung pertumbuhan dan perkembangan sektor migas yang ada di Kabupaten Bojonegoro memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan peningkatan pendapatan Bojonegoro.

Banyak manfaat yang diperoleh Bojonegoro dari meningkatnya pendapatan daerah karena sektor migas tersebut. Manfaat tersebut mulai dirasakan sejak tahun 2008 ketika hasil produksi migas mengalami peningkatan hingga tahun 2012. Salah satu manfaat dari keberadaan sektor migas tersebut adalah meningkatnya pendapatan daerah Bojonegoro yang berpengaruh terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut menjadi tugas baru dari pemerintah daerah untuk mengelola dan merencanakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Manfaat lain juga dapat dirasakan dari meningkatnya investasi daerah yang dilakukan pemerintah daerah. Investasi tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi pemerintah daerah Bojonegoro untuk masa mendatang. Dapat dikatakan bahwa investasi tersebut sebagai tabungan pemerintah daerah apabila dimasa mendatang sektor migas sudah tidak dapat berperan aktif lagi. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah daerah melakukan investasi daerah sebagai salah satu langkah antisipasi dari pemerintah daerah Bojonegoro. Disamping manfaat pada pembangunan daerah, keberadaan sektor migas juga dapat dirasakan manfaatnya hingga masyarakat sekitar melalui dibukanya lowongan pekerjaan di sektor migas untuk masyarakat sekitar. Jadi pengelolaan dan pemanfaatan sektor migas harus terus dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal di setiap tahunnya. Pemerintah daerah sebagai

daerah eksplorasi dan eksploitasi sektor migas memiliki tanggung jawab besar terhadap keberadaan serta pengaruh dari sektor migas tersebut. Pengelolaan pendapatan daerah yang terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelolanya. Seperti yang telah di jelaskan oleh Bapak Drs. Eko Puji Wahyono, SH, M.Si Selaku Kasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro bahwa kondisi dimana pendapatan daerah Bojonegoro yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya harus bisa dimanfaatkan oleh daerah sebaik mungkin. Kondisi tersebut merupakan salah satu kesempatan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mensejahterakan masyarakat. Namun dalam hal ini pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk terlena terhadap keberadaan sektor migas salah satunya dengan menggantungkan pendapatan terhadap DBH. Sektor migas sendiri pada akhirnya akan mengalami penurunan produksinya karena terus di eksploitasi, dan nantinya akan berdampak pula terhadap pendapatan asli daerah Bojonegoro. Kondisi tersebut haruslah sudah diperhatikan mulai saat ini untuk mengantisipasi kedepannya ketika kondisi produksi migas benar-benar mengalami penurunan. Salah satu antisipasi yang dapat dilakukan untuk saat ini adalah dengan melakukan investasi daerah yang pada nantinya dapat digunakan untuk kedepannya.

2. Kontribusi Migas di Sektor Lain Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Daerah

a. Penggerak Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan salah satu bentuk utama dari perkembangan dan kemajuan suatu daerah. Pembangunan sendiri merupakan usaha yang terencana dan terarah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Secara sederhana pembangunan dapat dikatakan sebagai sebuah proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Riyadi dan Baratakusumah, 2004:4). Dalam proses pembangunan suatu daerah dibutuhkan kondisi lingkungan dan kondisi ekonomi yang mendukung. Secara tidak langsung proses pembangunan sangat terkait dengan kondisi lingkungan dan kondisi perekonomian daerah saat itu. Segala bentuk pembangunan haruslah memiliki tujuan dan manfaat baik bagi masyarakat sekitar maupun bagi lingkungan disekitar. Dalam proses pembangunan, kestabilan lingkungan harus tetap terjaga kondisinya. Maka dari itu diperlukannya sebuah pembangunan yang terencana dan terarah yang manfaatnya dapat dirasakan sekarang hingga masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu solusi yang baik untuk meningkatkan serta mengembangkan pembangan suatu daerah. Pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan proses pembangunan yang berprinsip pada pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa merusak pemenuhan kebutuhan mendatang. Jadi pada dasarnya pembangunan berkelanjutan tersebut fungsi dan manfaatnya dapat dirasakan saat ini hingga mendatang. Pembangunan berkelanjutan sendiri

juga berpedoman pada tiga aspek yaitu ekologi, ekonomi dan sosial. Jadi setiap proses pembangunan, pembangunan tersebut harus memperhatikan dan menjaga tiga aspek tersebut. pembangunan harus bisa menjaga dan tidak merusak lingkungan sekitar. Pembangunan juga harus memiliki manfaat tertentu untuk perekonomian daerah sekitar dan juga harus memperhatikan kehidupan sosial masyarakat sekitar.

Tidak terlepas dari pembangunan yang ada di Bojonegoro, merencanakan pembangunan yang terarah dengan baik harus menjadi perhatian khusus. Proses pembangunan yang dilakukan haruslah memperhatikan kondisi lingkungan, ekonomi serta sosial. seiring dengan membaiknya dan cenderung mengalami peningkatan perekonomian di Bojonegoro, proses pembangunan daerah juga mengalami peningkatan yang signifikan. Baik pembangunan infrastruktur daerah maupun pembangunan perekonomian daerah untuk kedepannya. Faktor utama dalam proses pembangunan daerah Bojonegoro tidak terlepas dari kondisi perekonomian Kabupaten Bojonegoro. Kondisi perekonomian Bojonegoro memang mengalami peningkatan, terlihat dari pendapatan asli daerah atau APBD Kabupaten Bojonegoro yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi tersebut tidak terlepas dari keberadaan potensi sektor migas yang ada di Bojonegoro. Produksi minyak dan gas bumi yang ada di Bojonegoro diketahui mengalami peningkatan disetiap tahunnya, hal tersebut juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Bojonegoro yang juga mengalami peningkatan. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan peningkatan pembangunan daerah Bojonegoro. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) pemerintah daerah terus melakukan perencanaan pembangunan guna meningkatkan pembangunan daerah. Sebelum adanya sektor migas di Bojonegoro, proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masih dirasa rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi perekonomian Bojonegoro yang masih rendah, pendapatan daerah rendah dan perencanaan pembangunan masih minim. Secara fisik pembangunan daerah Bojonegoro pada saat itu masih kecil dengan tingginya tingkat kerusakan atau buruknya kondisi fasilitas sarana dan prasarana umum. Tidak meratanya pembangunan juga terjadi akibat terfokusnya perencanaan pembangunan hanya di tingkat pusat daerah. Tingkat kemiskinan dan pengangguran masih sangat tinggi karena masyarakat masih bergantung pada hasil pertanian dan lowongan pekerjaan di swasta masih sangat kecil. Keberadaan sektor migas di Bojonegoro memberika warna baru terhadap perkembangan dan peningkatan pembangunan daerah Bojonegoro. Perlahan tapi pasti proses pembangunan daerah Bojonegoro terus meningkat, mulai dari sarana umum hingga fasilitas pemerintahan. Dengan adanya sektor migas proses pembangunan daerah secara tidak langsung dapat terpenuhi dari perencanaan pembangunan pemerintah. Peran sektor migas dalam proses pembangunan memang sangat besar baik secara langsung melalui perusahaan-perusahaan terkait maupun melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Bentuk dari pembangunan daerah setelah adanya sektor migas di Bojonegoro memang sudah terlihat jelas mulai dari sarana umum maupun sarana pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan yang merata juga dapat tercapai meskipun belum semaksimal dengan yang diharapkan dan direncanakan. Pemerataan pembangunan hingga tingkat desa menjadi fokus

utama dalam perencanaan pembangunan yang ada di Bojonegoro. Wilayah kota atau daerah sekitar pemerintahan Kabupaten Bojonegoro terus dilakukan pembenahan mulai dari pembenahan terhadap fasilitas umum untuk masyarakat hingga pembenahan fasilitas penunjang pemerintahan baik berupa perlengkapan maupun pembangunan gedung dan proses pembangunan tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Terlihat proses pembangunan perbaikan trotoar jalan, perbaikan jalan antar kecamatan dan perbaikan jembatan desa masih berlangsung hingga saat ini. Hal tersebut menjadi bukti bahwa proses pembangunan daerah masih terus berlangsung dan terlaksana hingga sekarang. Hal tersebut terlihat jelas bahwa banyak perbaikan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Bojonegoro dan kondisi Bojonegoro saat ini jauh lebih berkembang dari sebelumnya. Perluasan daerah industri juga diperluas yang pada akhirnya menjadi perhatian pihak swasta untuk berperan didalamnya.

Perhatian pembangunan tidak hanya difokuskan di perkotaan atau di sekitar pusat pemerintahan daerah Bojonegoro melainkan hingga tingkat pedesaan. Menurut Bapak Dadang Aris, S, ST selaku Sub. Bagian Penataan dan Konservasi Bagian SDA Kabupaten Bojonegoro membaiknya perekonomian Bojonegoro juga harus bisa dirasakan hingga tingkat desa yang nantinya pemerataan pembangunan tersebut dapat dirasakan di seluruh wilayah Bojonegoro. Melalui ADD pemerintah Bojonegoro terus meningkatkan perhatiannya terhadap perkembangan dan pembangunan di tingkat desa. 12% DBH yang di dapat oleh Bojonegoro dari pemerintah pusat dialokasikan untuk ADD dengan pembangian sesuai dengan daerah ring. Melalui ADD tersebut desa

memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola ADD dari pemerintah daerah. Sebagian besar desa menggunakan ADD tersebut untuk memenuhi kebutuhan infrastruktu desa mulai dari perbaikan jalan desa, perangkat desa hingga kegiatan desa. Terbukti dengan adanya ADD tersebut kondisi desa di Bojonegoro baik yang berada di ring satu maupun ring tiga sudah mengalami perkembangan pembangunan.

b. Membuka Lapangan Pekerjaan

Sektor migas yang ada di Kabupaten Bojonegoro memiliki peran penting terhadap perkembangan daerah Bojonegoro. Pertumbuhan dan peningkatan pendapatan daerah terus mengalami peningkatan adalah dampak positif dari keberadaan sektor migas tersebut. tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan pembangunan daerah juga merupakan kontribusi dari keberadaan sektor migas tersebut. Secara tidak langsung keberadaan sektor tersebut berpengaruh besar terhadap perkembangan daerah Kabupaten Bojonegoro. Salah satu pengaruh positif lain dari keberadaan sektor tersebut adalah meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat sekitar. Peningkatan perekonomian daerah dapat dilihat buktinya dengan terus meningkatnya pendapatan asli daerah Bojonegoro di tiap tahunnya terhitung sejak tahun 2008. Peningkatan perkonomian tersebut juga dapat dilihat dari perekonomian masyarakat Bojoengoro yang mengalami peningkatan. Hal tersebut adalah dampak dari keberadaan industri sektor migas yang ada di Bojonegoro. Keberadaan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor migas tersebut telah memberikan kesempatan kerja untuk masyarakat Bojonegoro.

Secara tidak langsung keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut menyerap tenaga kerja dari masyarakat. Dalam proses penyerapan tenaga kerja ada oleh perusahaan, terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara perusahaan terkait dengan pemerintah daerah Bojonegoro. Koordinasi tersebut dilakukan untuk menentukan serta mengoordiner tenaga kerja ahli yang dibutuhkan oleh perusahaan terkait. Peran pemerintah daerah disini adalah sebagai pihak yang menyiapkan tenaga kerja ahli yang berasal dari masyrakat sekitar. Keberadaan perusahaan migas tersebut haruslah dapat memberikan kontribusi dan dapat dirasakan maanfaatnya oleh masyarakat sekitar. Pemerintah daerah Bojonegoro terus mengusahakan agar masyarakatnya dapat berperan dalam proses pengelolaan sektor migas tersebut, karena sebelumnya tenaga kerja yang bergerak di sektor tersebut kebanyakan tenaga kerja asing. Dari kondisi tersebut pemerintah sebagai pihak penyedia atau pihak yang merekomendasikan tenaga kerja berusaha keras agar masyarakat sekitar juga dapat andil dalam pengelolaan sektor tersebut. Dengan banyaknya masyarakat Bojonegoro yang terlibat dalam pengelolaan tersebut, secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat.

Peran pemerintah daerah Bojonegoro selaku pihak penyedia dan perekomendasi tenaga kerja ahli dari masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaannya. Melalui bagian SDA dan Disnakertransos, pemerintah daerah terus melakukan kegiatan guna dapat mencetak tenaga ahli dari masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan, pendidikan serta pembekalan terhadap masyarakat. Kegiatan tersebut

disesuaikan terhadap kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja yang akan direkrut. Sebagian besar perusahaan sektor migas banyak membutuhkan tenaga ahli dibidang pemasangan pipa, tukang las, teniksi mesin produksi hingga teknisi bidang transportasi. Setelah proses pelatihan terhadap masyarakat pemerintah daerah berperan untuk mempromosikan tenaga-tenaga ahli yang sudah terlatih tersebut untuk dapat direkrut oleh perusahaan terkait. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Dadang Aris, S, ST dari bagian SDA Bojonegoro bahwa dalam hal pelatihan untuk mencetak tenaga kerja baru serta merekomendasikan kepada perusahaan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Dari penyajian data dapat dilihat bahwa banyak tenaga kerja ahli yang siap untuk di rekomendasikan yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Bojonegoro. Jadi keberadaan sektor migas ini manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar dengan terlibat langsung didalam pengelolaan seabagi tenaga kerja ahli.

Dari Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro, dijelaskan bahwa pihak industri terkait juga harus ikut berpartisipasi dalam mengembangkan usaha lokal baik BUMD, BUMDes maupun Koperasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha dan industri lokal lewat keberadaan sektor migas yang ada di Bojonegoro tersebut. Hal tersebut sangat berkaitan dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil yang harus mengedepankan kerjasama atau biasa disebut dengan kemitraan. Dijelaskan bahwa sebuah kerjasama antara usaha satu dengan usaha lain sangat di diperlukan terutama kerjasama antara

usaha besar dengan usah kecil demi mendukung perkembangan usaha yang masih kecil. Dari sistem kemitraan tersebutlah diharapkan usaha besar dapat membantu perkembangan usaha kecil melalui sistem kemitraan atau kerjasama tersebut. Begitupula dengan kondisi yang ada di Bojonegoro, pemerintah daerah berusaha untuk mengedepankan usaha-usaha kecil baik usaha kecil maupun usaha menengah untuk dapat berkembang dengan melakukan kerjasama dengan usaha besar terutama disektor migas. Pemerintah berupaya melauai perda untuk memberikan kewajiban kepada industri migas untuk dapat bekerjasama dengan usaha lokal yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Tujuannya adalah agar usaha lokal yang ada di Bojonegoro bisa merasakan dampak positif dari keberadaan industri migas yang ada di Bojonegoro. Selain itu diharapkan melalui kerjasama tersebut usaha lokal bisa lebih berkembang dan dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar lagi. Jadi keberadaan sektor migas yang ada di Bojonegoro juga dapat memberikan pengaruhnya terhadap usaha lokal yang ada di Bojonegoro.

Melalui peraturan daerah yang telah dibuat diharapkan pemerintah dapat melaksanakan dan memaksimalkan peran dan manfaat dari keberadaan sektor migas di Bojonegoro. Dengan dibentuknya Perda tersebut proses memaksimalkan peran dan manfaat dari sektor migas dapat ditingkatkan. Melalui peran aktif dari pemerintah daerah, peraturan daerah yang telah dibuat mengenai tenaga kerja lokal dapat memberikan dampak baik terhadap masyarakat sekitar. Jadi implimentasi dari peraturan daerah yang dibuat secara maksimal sangat dibutuhkan dengan didukung peran aktif dari pemerintah daerah.

c. Kontribusi Sektor Migas Melalui CSR

Proses pembangunan daerah tidak hanya berasal dari peran pemerintah daerah melainkan dari perusahaan atau industri yang ada juga memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan daerah. Jadi proses pembangunan yang ada di Bojonegoro tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan besar yang ada di Bojonegoro juga berkontribusi dalam peningkatan pembangunan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Sesuai dengan tanggung jawab perusahaan terhadap daerah, perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar baik terhadap kemajuan ekonomi maupun sosial masyarakat. Salah satu tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan pemerintah daerah adalah melalui *Cooperate Sosial Responsibiliyi* (CSR). Program CSR sendiri sudah disahkan didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Melalui program CSR tersebut diharapkan keberadaan perusahaan di daerah tidak merugikan daerah. Di Bojonegoro sendiri pemerintah daerah telah membuat Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 yang didalamnya juga mengatur tentang CSR. Mulai dari proses perumusan kegiatan hingga laporan hasil kegiatan telah diatur dengan jelas. Perda tersebut bertujuan untuk mengatur dan memaksimalkan segala bentuk pembangunan daerah termasuk didalamnya melalui program CSR tersebut. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam program CSR tersebut, mulai dari pembangunan infrastruktur daerah, pengobatan gratis hingga bantuan beasiswa pendidikan untuk masyarakat sekitar. masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan tersebut. Kontribusi

terbesar dalam pembangunan di Bojonegoro melalui CSR adalah berasal dari perusahaan yang bergerak di sektor migas. Proses perumusan dan pelaksanaan CSR sendiri di koordinasikan antar pihak perusahaan terkait dengan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk menghindari ketimpangan pembangunan yang dilakukan pemerintah dengan perusahaan. Jadi melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, perusahaan dapat mengetahui kekurangan dan keperluan yang dapat dipenuhi perusahaan dalam menjalankan program CSR tersebut. Dalam pelaksanaan CSR perusahaan tidak memberikan bantuan berupa anggaran melainkan berupa kegiatan maupun perlengkapan. Pelaksanaan dari program CSR sendiri merupakan tanggung jawab penuh dari perusahaan, pemerintah daerah hanya berpersan sebagai pihak koordinasi dalam merumuskan program dan kegiatan tersebut. Bentuk program CSR yang dilakukan oleh perusahaan untuk Bojonegoro sangatlah beragam diantaranya adalah perbaikan jalan, pembangunan polindes, layanan kesehatan gratis, pelatihan dan pembekalan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Jadi keberadaan sektor migas di Bojonegoro sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah Bojonegoro hingga tingkat desa. Pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, perusahaan terkait juga berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro.

Jadi proses pelaksanaan pembangunan melalui program CSR tersebut dapat dimaksimalkan pelaksanaannya baik melalui pihak perusahaan terkait maupun melalui peran aktif dari pemerintah daerah sesuai dengan Perda Nomor

23 Tahun 2011. Terbukti pemerintah daerah dan pihak swasta sektor migas memiliki andil besar dalam proses pembangunan daerah.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Sektor Migas Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah dan mengelola sektor migas yang ada di Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Bagian SDA Kabupaten Bojonegoro pasti mengalami hambatan dan dukungan yang beragam. Berikut analisis data berkenaan dengan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami dalam pembangunan yang optimal.

a. Faktor Pendukung.

Potensi Sumber daya Alam yang Tersedia

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan sektor migas hingga pada proses pembangunan daerah Bojonegoro pasti ada beberapa faktor pendukung salah satunya adalah potensi sumber daya alam yang tersedia di Kabupaten Bojonegoro. Potensi SDA yang ada di Bojonegoro sebagai faktor pendukung dalam pembangunan daerah dikarenakan pengaruh dan dampak atas keberadaan potensi SDA sangat besar terhadap perkembangan daerah. Banyak potensi SDA yang terkandung di daerah Bojonegoro mulai dari hasil pertanian, kehutanan hingga hasil tambang yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian. Potensi SDA yang ada di Bojonegoro secara tidak langsung berdampak terhadap kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah. Dari masyarakat sendiri dapat

memanfaatkan SDA tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sebagai pekerjaan dari masyarakat sendiri. Bidang pertanian sendiri masih berjalan dengan baik di Bojonegoro karena sebagian besar masyarakat Bojonegoro masih bercocok tani terutama di daerah pedesaan.

Sektor tambang berupa minyak dan gas bumi adalah salah satu SDA yang sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan daerah di Bojonegoro. Hal tersebut dikarenakan karena potensi migas yang tersedia di wilayah Bojonegoro sangatlah besar. Terbukti dengan banyaknya titik-titik potensial sumber minyak maupun gas bumi yang di temukan di wilayah Bojonegoro dan masih belum dilakukan pengelolaan. Tingginya potensi sumber daya alam berupa migas yang ada di wilayah Bojonegoro menjadi faktor utama dalam proses pengelolaan dan pengembangan sektor migas. Target realisasi hasil produksi dari setiap pengelola yang mendekati 100% menunjukkan bahwa potensi migas terbukti besar. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap meningkatnya hasil produksi migas yang tiap tahunnya juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Hasil produksinya yang tinggi dan terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya, berpengaruh besar terhadap kondisi dan perkembangan daerah Bojonegoro. Secara tidak langsung pengaruh terbesar keberadaan sektor migas tersebut adalah terhadap pendapatan asli daerah Bojonegoro. Melalui DBH yang telah dialokasikan dari pemerintah pusat, pendapatan asli daerah atau kondisi APBD Bojonegoro terus mengalami peningkatan. Alokasi DBH yang didapat Bojonegoro disesuaikan dari hasil produksi migas yang ada di Bojonegoro. Meningkatnya hasil produksi migas secara tidak langsung alokasi DBH juga akan

meningkat begitu pula dengan kondisi APBD Bojonegoro yang juga mengalami peningkatan.

Peningkatan pendapatan asli daerah atau meningkatnya APBD Bojonegoro juga berimbas terhadap pembangunan daerah yang ada di Bojonegoro. Pemerintah daerah menggunakan kesempatan atas keberadaan sektor migas dengan terus melakukan pengelolaan APBD untuk saat ini hingga masa mendatang. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang terjadi ketika potensi migas yang ada di Bojonegoro mengalami penurunan. Salah satu pengelolaan yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan melakukan pembangunan yang berkelanjutan yang nantinya dapat dimanfaatkan fungsinya hingga masa mendatang. Banyak proses pembangunan yang menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan, mulai dari perbaikan infrastruktur daerah hingga membangun fasilitas umum baru. Proses pembangunan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah daerah beserta perusahaan daerah terkait.

Jadi potensi sumber daya alam yang ada di Bojonegoro secara tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan industri migas dan perkembangan daerah Bojonegoro. Tingginya potensi migas yang tersedia di Bojonegoro akan berpengaruh terhadap hasil produksi. Secara tidak langsung kondisi tersebut juga akan berlangsung terhadap perkembangan dan pembangunan daerah. Peran aktif dari pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan kondisi tersebut sangat diperlukan. Karena keberadaan atau potensi SDA nantinya pasti akan mengalami penurunan seiring dengan terus dilakukan eksplorasi dan eksploitasi

terhadap SDA yang ada. Dan diperlukannya antisipasi dari pihak pemerintah daerah dan pusat sebelum kondisi tersebut terjadi.

b. Faktor Penghambat

Terbatasnya Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Sektor

Migas

Salah satu hambatan dari pemerintah dalam mengelola sektor migas adalah terbatasnya wewenang pemerintah daerah terhadap keberadaan sektor migas. Sektor migas sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat mulai dari eksplorasi, eksploitasi hingga pemasarannya. Bahkan keberadaan sektor migas tersebut sangat banyak menguntungkan pemerintah pusat. Segala bentuk permasalahan, kerjasama hingga pemasaran sepenuhnya dikendalikan atas kerjasama antara pemerintah pusat dengan perusahaan terkait. Pemerintah daerah sama sekali tidak memiliki wewenang atas keberadaan sektor migas tersebut. Terbatasnya wewenang tersebutlah yang menjadikan pemerintah daerah sulit untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul karena keberadaan sektor migas tersebut. Pemerintah daerah juga kesulitan dalam proses perencanaan pembangunan karena tidak mengetahui kondisi pendapatan daerah yang berkaitan dengan hasil produksi migas tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Drs. Fajar Yudhy Hartanto selaku Kepala Bagian SDA Kabupaten Bojonegoro bahwa minimnya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam proses pengelolaan sektor migas menjadi salah satu faktor utama penghambat dari pengembangan sektor migas yang ada di

Bojonegoro. Secara penuh kewenangan pengelolaan sektor migas menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, mulai dari pembuatan kerjasama, pengelolaan hingga pemasaran. Dalam hal ini pemerintah daerah hanya diberi kewenangan dalam urusan perizinan mulai dari IMB, AMDAL dan pembebasan lahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewenangan penuh atas pengelolaan dan pengembangan sektor migas adalah pemerintah pusat. Hal tersebutlah yang menjadi kendala dari pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan tersebut. Beberapa bentuk keterbatasannya pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengembangan sektor migas adalah sebagai berikut :

1. Kecilnya Peran Pemerintah Daerah dalam Ikut Serta Perencanaan Tata Kelola Sektor Migas

Keberadaan industri sektor migas yang ada di Bojonegoro sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan daerah. Sektor migas tersebut memberikan kesempatan untuk pemerintah daerah Bojonegoro untuk mengembangkan dan meningkatkan pembangunan daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk bisa menggunakan kesempatan tersebut melalui pengelolaan dan perencanaan pembangunan daerah. Tetapi karena terbatasnya wewenang daerah untuk terlibat langsung dalam proses pengelolaan migas menjadi pembatas peran pemerintah untuk turut andil didalam perencanaan tata kelola sektor migas. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Drs. Fajar Yudhy Hartanto selaku Kepala Bagian SDA Bojonegoro bahwa pemerintah juga ingin mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan tata kelola sektor migas tersebut. Kesempatan tersebut nantinya dapat membantu

pemerintah daerah dalam membuat target dan perencanaan pembangunan daerah apabila pemerintah daerah mengetahui kondisi atau kendala yang ada di sektor migas yang berperan sebagai sumber pendapatan daerah terbesar Bojonegoro.

Dalam proses pengelolaan, pemerintah pusat sebagai pemilik wewenang penuh dan dalam pembagian wewenang terhadap pemerintah daerah dirasa masih kurang proposional. Jadi dalam proses perencanaan target tata kelola sektor migas masih dirasa kurang proposioanal pembagiannya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah hanya mendapatkan porsi atau hanya berperan dalam perencanaan masalah sosial saja. Ditambah kondisi pemerintah daerah yang tidak mengetahui kondisi didalam industri migas tersebut tetapi dituntut untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari migas. Hal tersebut juga menjadi salah satu kendala besar dari pemerintah daerah untuk ikut berperan dalam proses tata kelola sektor migas. Terbatasnya peran pemerintah daerah dalam perencanaan tata kelola sektor migas menjadikan pemerintah daerah kesulitan dalam menata dan merencanakan target pengembangan pembangunan daerah.

2. Tidak Transparasinya Laporan Hasil Pengelolaan dan Produksi Migas Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintah Daerah

Dalam proses pengelolaan sektor migas, ada beberapa hambatan yang menjadi kendala dari pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor migas. salah satunya adalah tidak transparasinya hasil produksi migas terhadap pemerintah daerah. Dalam proses pengelolaan migas, pemerintah pusat menjadi

pengendali utama terhadap pengelolaan migas tersebut. Laporan atas hasil produksi migas setiap tahunnya dilaporkan kepada pemerintah pusat sebagai penanggung jawab atas pengelolaan sektor migas. Jadi setiap perkembangan hasil produksi pelaporannya disampaikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya menerima laporan akhir hasil produksi tanpa mengetahui asal usul dan permasalahan selama proses pengelolaan berlangsung.

Dengan tidak adanya transparansi proses dan hasil produksi terhadap pemerintah daerah, menghambat pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan dan merencanakan pembangunan. Pemerintah daerah sama sekali tidak mengetahui permasalahan yang terjadi didalam industri sektor migas. Ketika permasalahan yang terjadi didalam industri migas tersebut sudah muncul ke masyarakat, pemerintah daerah dituntut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari sini pemerintah daerah kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di masyarakat karena dampak dari sektor migas. Sikap tertutup dari pihak perusahaan juga menjadi salah satu penghambat untuk pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dimasyarakat. Pemerintah daerah hanya mengetahui adanya masalah dimasyarakat seperti demo, perselisihan masyarakat dengan perusahaan hingga penyampaian tuntutan ke ranah hukum. Permasalahan tersebut muncul tanpa diketahui pemerintah daerah awal mula permasalahan tersebut terjadi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Drs. Fajar Yudhy Hartanto selaku Kepala Bagian SDA Bojonegoro bahwa pemerintah merasa kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat industri migas. Kesulitan juga terjadi ketika pemerintah daerah melakukan perencanaan pembangunan

dengan kondisi tidak tahu bagaimana perkembangan migas saat itu. Proses pembangunan di Bojonegoro sendiri masih berpacu terhadap kondisi APBD Bojonegoro dan secara tidak langsung ada kaitannya terhadap sektor migas. Pemerintah daerah yang tidak mengetahui proses pengelolaan migas, tidak bisa melakukan upaya untuk menjaga kestabilan hasil produksi migas yang nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah serta pembangunan daerah.

Jadi transparansi proses pengelolaan dan hasil produksi terhadap pemerintah sangat diperlukan. Hal tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat yang timbul akibat industri migas tersebut. Disamping itu pemerintah daerah juga dapat berupaya dalam menjaga dan mengendalikan hasil produksi migas yang pada akhirnya ada kaitannya dengan pendapatan daerah, perencanaan pembangunan daerah hingga proses pembangunan daerah.

BAB V

PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari bab-bab yang telah diuraikan terlebih dahulu, kemudian atas dasar kesimpulan tersebut diajukan saran yang memberikan manfaat bagi kemajuan, perbaikan dan pengembangan daerah dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro melalui peran sektor migas.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya mengenai peran sektor migas dalam meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro, maka pada bagian penutup berikut ini akan diberikan kesimpulan yang diharapkan dapat bermanfaat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, kesimpulan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Keberadaan sektor migas di Kabupaten Bojonegoro sangat berpengaruh besar terhadap pengembangan dan pembangunan daerah. Sektor migas memiliki banyak kontribusi dalam pembangunan daerah diantaranya adalah, meningkatkan pendapatan daerah, penggerak pembangunan daerah dan membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar.
2. Secara tidak langsung sektor migas berkontribusi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro. Melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pendapatan daerah Bojonegoro terus mengalami

peningkatan. Peningkatan PAD Bojonegoro sesuai dengan peningkatan alokasi DBH dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sesuai dengan hasil produksi migas. Jadi peningkatan hasil produksi migas berpengaruh besar terhadap peningkatan pendapatan daerah Bojonegoro.

3. Sektor migas berperan dan berkontribusi didalam pembangunan daerah Bojonegoro. Proses perencanaan dan pembangunan daerah mengacu pada kondisi perekonomian dan pendapatan daerah Bojonegoro. secara tidak langsung berhubungan juga dengan kondisi sektor migas tersebut. proses pembangunan daerah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja melainkan perusahaan-perusahaan terkait juga berperan dalam proses pembangunan. Melalui program *Cooperate Sosiall Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang terkait dengan sektor migas turut serta dalam proses pembangunan daerah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap daerah tersebut. Jadi keberadaan sektor migas tersebut sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah baik melalui pemerintah daerah maupun melalui perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang migas.
4. Keberadaan sektor migas juga berdampak positif terhadap masyarakat Bojonegoro. Industri sektor migas telah memberikan harapan baru kepada masyarakat Bojonegoro dalam meningkatkan taraf hidup dan perekonomiannya. Keberadaan perusahaan-perusahaan yang bergerak disektor migas membuka lowongan pekerjaan yang cukup besar yang memberikan kesempatan kepada masyarakat Bojonegoro untuk dapat

bekerja didalamnya. Melalui pelatihan dan pembinaan dari pemerintah daerah terhadap masyarakat, pemerintah daerah berupaya agar masyarakat memiliki kemampuan dan dapat di rekrut di perusahaan terkait.

5. Dalam proses pembangunan daerah, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan diantaranya adalah potensi sumber daya alam yang tersedia dan pendapatan daerah yang tinggi. Sedangkan untuk faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sektor migas diantaranya adalah tidak transparasinya proses pengelolaan dan hasil produksi migas, kewenangan pemerintah daerah yang terbatas terhadap sektor migas dan terbatasnya peran pemerintah dalam perencanaan tata kelola sektor migas.
6. Pemerintah daerah memiliki wewenang yang terbatas untuk terlibat dalam proses pengelolaan sektor migas. Wewenang penuh pengelolaan sektor migas adalah milik pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya memiliki wewenang sebatas pemberi izin dalam proses pengelolaan sektor migas tersebut. minimnya wewang pemerintah daerah tersebutlah yang menjadi kendala pemerintah Bojonegoro dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan daerah maupun pembangunan dan pengembangan sektor migas.
7. Keberadaan sektor migas di Bojonegoro menjadikan Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah eksplorasi dan eksploitasi migas. Perkembangan dan pembangunan daerah terlihat jelas mulai dari wilayah sekitar pemerintahan hingga tingkat desa. Pemerintah daerah berupaya

untuk melakukan pemerataan pembangunan hingga tingkat level desa melalui program Anggaran Dana Desa (ADD). ADD sendiri merupakan anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah melalui DBH yang didapat oleh pemerintah Bojonegoro. Dengan adanya ADD tersebut, desa berwenang penuh dalam mengelola anggaran tersebut untuk kebutuhan desa.

B. Saran

Setelah dikemukakannya beberapa kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dalam mengelola sektor migas dan meningkatkan pembangunan daerah. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Keberadaan sektor migas di Kabupaten Bojonegoro harus bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah. Pemerintah daerah tidak boleh terlena dengan kondisi dan keberadaan sektor migas yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap perekonomian daerah Bojonegoro. Pemerintah daerah harus memikirkan pembangunan jangka panjang untuk masa mendatang. Pemerintah daerah hendaknya mulai memikirkan antisipasi mendatang ketika sektor migas sudah menurun potensi dan perannya terhadap pembangunan Bojonegoro. Perlunya meningkatkan investasi daerah adalah salah satu solusi dan antisipasi yang mungkin bisa dilakukan pemerintah daerah. Investasi

daerah atau bisa dikatakan tabungan daerah ini bisa dijadikan antisipasi ketika potensi migas yang ada mengalami penurunan. Investasi tersebut juga dapat menarik Bojonegoro untuk tidak menggantungkan perkembangannya dari sektor migas. Dirasa melalui investasi tersebut pemerintah Bojonegoro juga lebih dapat mengembangkan potensi daerahnya melalui bidang lain.

2. Keterbatasan wewenang dari pemerintah daerah untuk ikut serta dalam pengelolaan sektor migas menjadikan salah satu hambatan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus dapat meningkatkan kerjasama secara langsung dengan perusahaan-perusahaan migas terkait dalam meningkatkan pembangunan daerah. Melalui program CSR pemerintah dapat meningkatkan koordinasi dengan perusahaan terkait untuk merencanakan pembangunan daerah. Pendekatan lebih dari pemerintah daerah kepada perusahaan-perusahaan terkait dirasa sangat diperlukan untuk meningkatkan koordinasi dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah. Melalui program CSR pula, pemerintah daerah dapat mengontrol dan bekerja sama serta mendapatkan informasi dalam proses penyelesaian masalah-masalah yang timbul dari sektor migas tersebut. Jadi peningkatan hubungan baik dalam bentuk kerjasama maupun koordinasi antara pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan terkait dirasa sangat perlu untuk dilakukan.
3. Perlunya peningkatan perhatian terhadap pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat sekitar untuk dapat direkrut di perusahaan-

perusahaan yang bergerak disektor migas. Bentuk tenaga kerja yang dilatih dan dibina hanya sebatas tenaga ahli bidang perlengkapan atau teknisi saja. Pemerintah daerah harus dapat meningkatkan skill masyarakat untuk dapat bekerja ditingkatan yang lebih tinggi baik sebagai team audit, kepala divisi maupun manajer. Karena selama ini masyarakat yang terlibat bekerja di sektor migas masih sebatas pekerja tingkat bawah. Salah satu solusi yang mungkin bisa dilakukan daerah adalah dengan memaksimalkan kurikulum pelajaran pada sekolah menengah kejuruan jurusan migas. Memberikan kesempatan lanjutan untuk meningkatkan pendidikan kejenjang selanjutnya juga dirasa perlu untuk dilakukan demi mendapatkan tenaga kerja ahli dari masyarakat lokal. Untuk itu perlunya peningkatan skill masyarakat dari pemerintah daerah dan perhatian khusus pemerintah daerah terhadap pendidikan sangat diperlukan agar masyarakat lokal dapat berkontribusi lebih banyak lagi dalam proses pengelolaan sektor migas tersebut.

4. Perlunya peningkatan sistem pengawasan terhadap pembangunan daerah agar dapat berjalan maksimal pelaksanaannya. Pembangunan daerah memang terus berjalan baik ditingkat kota maupun daerah, tetapi sistem pengawasannya belum maksimal. Pengawasan dari pemerintah daerah hanya sebatas wilayah kota tetapi pembangunan tingkat desa dirasa sangat kurang. Jadi pengawasan ini dirasa sangat perlu dilakukan agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan target yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 1990 .*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:

Rhineka

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta :

PT. Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Revisi*.

Jakarta : Ghalia Indonesia.

Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintah Daerah*

Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah. Yogyakarta: Rampi.

Fauzi, A. 2004. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. PT. Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta.

Maghfir, Ikvina. 2011. *Implementasi Kebijakan CSRE Exxon Mobil*

terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar. Skripsi FIA UB.

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan ed.Revisi*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.

Martopodan B Mitchell (ed). 1995. Bali: *Balancing environment, economy and*

culture, Departemen of Geography Publication Series No. 44. University of

Waterioo. Waterioo

Mitchell. Bruce, dkk. 2007. *Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan*. Edisi pertama, Cetakan Ketiga. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muluk, Khairul M.R. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Malang: Bayumedia.

Muluk, M.R. Khairul. 2007. *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.

Riyad dan Brata Kusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. PTT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Sjihaduddin, Achmad dan Arselan Harahap. 1998. *Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Jakarta : LP3ES.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sumantri. R. Buku Pelajaran Teknik Reservoir. Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi. Universitas Trisakti. Jakarta. 1998.

Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Andi.

Todaro, Michael P, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Ahli Bahasa, Haris Muhandar; editor Yati Sumiharti. Edisi Ketujuh. Erlangga. Jakarta.

Wahyudi, Isa dan Azheri. 2008. *CSR: Prinsip Peraturandan Implementasi*. Malang: In Trans Publishing.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Di Kabupaten Bojonegoro.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Serta Pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro

website

Silalahi, Daud. 2003 *Pembangunan berkelanjutan dalam rangka pengelolaan (termasuk perlindungan) sumber daya alam yang berbasis pembangunan sosial dan ekonomi.* Makalah disampaikan pada: seminar pembangunan hukum nasional vii. Diakses pada 30 Januari 2014 dari <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Pembangunan520Berkelanjutan%20-%20Daud%20silalahi.pdf>

